

*Rancangan*

**2025-2029**



# **Rencana Strategis (RENSTRA)**



**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Provinsi Sulawesi Selatan**



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
NOMOR 21 TAHUN 2025  
TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);  
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Nomor 340);

6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 341);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Gubernur ini merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah terhitung sejak tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) sampai dengan 2029 (dua ribu dua puluh sembilan).
- (2) Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
  - a. Sekretariat Daerah;
  - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. Inspektorat Daerah;
  - d. Dinas Pendidikan;
  - e. Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah /Rumah Sakit Khusus Badan Layanan Umum Daerah;
  - f. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi;
  - g. Dinas Sumber Daya Air, Cipta Kerja, dan Tata Ruang;
  - h. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;
  - i. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - j. Dinas Sosial;
  - k. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - l. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - m. Dinas Ketahanan Pangan;

- n. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan;
  - o. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - p. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - q. Dinas Perhubungan;
  - r. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
  - s. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  - t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
  - u. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
  - v. Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata;
  - w. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
  - x. Dinas Kelautan dan Perikanan;
  - y. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  - z. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - aa. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
  - bb. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - cc. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  - dd. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
  - ee. Badan Pendapatan Daerah;
  - ff. Badan Kepegawaian Daerah;
  - gg. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - hh. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - ii. Badan Penghubung Daerah; dan
  - jj. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rencana Strategis Perangkat Daerah juga memuat rencana strategis unit kerja Perangkat Daerah yang terdiri:
- a. rencana strategis biro pada Sekretariat Daerah;
  - b. rencana strategis rumah sakit Daerah pada Dinas Kesehatan; dan
  - c. rencana strategis unit pelaksana teknis Daerah pada Perangkat Daerah.

#### Pasal 4

Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

#### Pasal 5

Rencana Strategis Perangkat Daerah dapat diubah apabila:

- a. hasil pengendalian evaluasi menunjukkan ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksiting;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
- c. perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari perundang-

- undangan yang lebih tinggi;
- d. terjadi perubahan mendasar; dan/atau
- e. perubahan Perangkat Daerah.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar

pada tanggal, 26 September 2025



ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

Diundangkan di Makassar

pada tanggal, 26 September 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI SELATAN,



JUERI RAHMAN

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayah-Nya, Draft Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 dapat disusun.

Berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 1/2024 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Menyusun RPJPD 2025-2045 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan Pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan Masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai obyek dan subjek Pembangunan. Hal tersebut didasarkan pada prinsip hak asasi bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, pemerintah daerah harus menitikberatkan masyarakat sebagai penerima manfaat dan pelaku Pembangunan.

RENSTRA Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah dan disusun dengan berpedoman pada RPJMD. Penyusunan Renstra mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, dengan penegasan bahwa perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

RENSTRA Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 ini dirumuskan dengan tahapan, tatacara, serta pendekatan yang diatur dalam peraturan perundangan dalam rangka menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program/kegiatan prioritas sesuai tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2025-2029. Dengan demikian Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman Dinas Kelautan dan Perikanan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah pada khususnya, dan pembangunan nasional pada umumnya. Disamping sebagai pedoman dalam perencanaan, Renstra Perubahan ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu alat evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sehingga pada saatnya nanti dapat terwujud Kepemerintahan yang baik (Good Governance).

Semoga RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025–2029 ini menjadikan arah proses pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan lebih terarah. Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan tenaga dan pemikiran dalam penyelesaian Renstra ini, diucapkan terimakasih. Semoga Renstra ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan keberhasilan pembangunan daerah Sulawesi Selatan yang kita cintai.

Makassar, Juli 2025  
Kepala Dinas

**Dr. M. ILYAS, S.T., M.Sc**

## DAFTAR ISI

SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	9
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan	9
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	9
2.1.2 Sumberdaya Dinas Kelautan dan Perikanan	12
2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	22
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan	47
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	49
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	49
2.2.2 Penentuan isu-isu Strategis	54
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	58
3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	58
3.2 Arah kebijakan dan strategi	64
3.3 Arah kebijakan dan strategi nasional (telaahan renstra K/L)	69
3.4 Arah Kebijakan kewilayaan (telaahan rencana tata ruang wilayah)	71
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
4.1 Program kegiatan san sub program	82
4.2 Uraian Kegiatan	164
4.3 Indikator kinerja utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) 2025-2029	170
BAB V PENUTUP	178

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi PNS Menurut Jenis Kelamin	12
Tabel 2.2	Komposisi PNS Menurut Golongan	13
Tabel 2.3	Komposisi PNS Menurut Golongan	14
Tabel 2.4	Struktur Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Formal	14
Tabel 2.5	Komposisi Diklat PIM Tahun 2018-2024	15
Tabel 2.6	Jumlah Sebaran dan Kebutuhan ASN Lingkup DKP SulSel	15
Tabel 2.7	Daftar Aset yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan	17
Tabel 2.8	Kondisi Sarana Pelabuhan Perikanan di Sulawesi Selatan	18
Tabel 2.9	Jumlah SPDN Provinsi Sulawesi Selatan	20
Tabel 2.10	Sarana dan Prasarana Pendukung	22
Tabel 2.11	Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	23
Tabel 2.12	Subsektor Perikanan terhadap PDRB Sulsel Tahun 2020-2024	25
Tabel 2.13	Produksi Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024	26
Tabel 2.14	Produksi Perikanan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 – 2024	27
Tabel 2.15	Produksi Rumput Laut Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 – 2024	29
Tabel 2.16	Produksi Udang Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020-2024	30
Tabel 2.17	Perkembangan Capaian Produksi Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020-2024	32
Tabel 2.18	Konsumsi Ikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024	32
Tabel 2.19	Cakupan Bina Kelompok Nelayan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024	33
Tabel 2.20	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 -2024	34
Tabel 2.21	Proporsi Tangkapan Ikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 – 2024	35
Tabel 2.22	Rasio Kawasan Lindung Perairan terhadap Total Luas Perairan Teritorial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024	37
Tabel 2.23	Nilai Tukar Nelayan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024	38
Tabel 2.24	Kinerja Program Pengelolaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2020-2024 mendukung sasaran meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah produksi dan produktivitas produksi	39
Tabel 2.25	Kinerja Program Pengelolaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2020 - 2024 mendukung sasaran meningkatnya kelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan	40
Tabel 2.26	Kinerja Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Tahun 2020 - 2024 mendukung sasaran meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah produksi dan produktivitas produksi	41
Tabel 2.27	Kinerja Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024	42
Tabel 2.28	Pengembangan SDM Aparat dan Masyarakat Usaha Perikanan (Berbasis Gender) dalam Mendukung Peningkatan Produksi Perikanan sampai tahun 2018-2022	44

Tabel 2.29 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	48
Tabel 2.30 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	49
Tabel 2.31 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	50
Tabel 2.32 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan yang dituangkan dalam analisis SWOT	52
Tabel 2.33 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	56
Tabel 3.1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah	59
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	60
Tabel 3.3 Tahapan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel	64
Tabel 3.4 Arah Kebijakan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 -2029	64
Tabel 3.5 Arah Kebijakan Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025 -2029	67
Tabel 4.1 Program, kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan	82
Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	132
Tabel 4.3 Daftar sub Kegiatan prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	165
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	171
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	172

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Konsep Dokumen Renstra	3
Gambar 2	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra	4
Gambar 3	Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	12
Gambar.4.1	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD	80

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang**

Provinsi Sulawesi Selatan memiliki panjang garis pantai + 1.937 km dengan 19 kabupaten/kota memiliki potensi perikanan dan kelautan yang cukup besar terutama pada potensi perikanan laut dan pesisir dan 5 kabupaten/kota memiliki potensi perikanan air tawar atau perairan umum. Namun dengan adanya keterbatasan SDM yang terampil, Infrastruktur dan Sarana Prasarana Usaha Perikanan sehingga pengelolaan potensi tersebut belum optimal oleh karena itu, Pemerintah Sulawesi Selatan berupaya agar potensi tersebut dapat dikelola sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku agar sumberdaya kelautan dan perikanan provinsi Sulawesi Selatan dapat lestari dan berkelanjutan. Mengingat perikanan dan kelautan memiliki potensi ekonomi yang sangat besar sehingga sangat logis jika sektor kelautan dan perikanan dijadikan tumpuan dalam perekonomian nasional. Provinsi Sulawesi Selatan memiliki kekayaan maritim yang cukup besar jika dimanfaatkan baik mampu mendatangkan devisa daerah.

Saat ini terdapat sejumlah tantangan dan permasalahan mendasar bagi Provinsi Sulawesi Selatan dalam membangun ekonomi berbasis kelautan dan perikanan, antara lain adalah : (1) identifikasi dan pemanfaatan sumberdaya kelautan; (2) manajemen pemerintah melalui peraturan dan birokrasi; (3) penurunan nilai investasi; dan (4) kompleksitas permasalahan perikanan, yaitu sumberdaya ikan yang kian kritis akibat menurunnya kemampuan areal penangkapan, kondisi cuaca dan iklim yang tidak menentu, tingkat pengetahuan dan peralatan nelayan, dan rendahnya kualitas produk perikanan yang dihasilkan. Kondisi pembangunan sektor kelautan dan perikanan tergambar pada rendahnya kinerja ekspor produk perikanan.

Tekanan inflasi nasional juga meningkatkan biaya operasional di sebagian besar daerah penghasil makanan laut, dan bisa memperburuk akses investasi ke sektor perikanan. Meskipun demikian, kondisi pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan di Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 2018 - 2024 cukup baik di tingkat nasional. Hal ini merupakan indikator bahwa sektor perikanan Sulawesi Selatan masih berpotensi untuk dikembangkan dalam rangka peningkatan ketahanan pangan dan kontribusi terhadap PDRB Sulawesi Selatan.

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2029 disusun untuk melakukan penyesuaian terhadap paradigma pembangunan, isu dan permasalahan nasional dan global serta tindak lanjut dari pergeseran kebijakan pemerintah pusat. Sebagaimana diketahui bahwa rencana strategis ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam mewujudkan kesejahteraan Masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai obyek dan subjek Pembangunan. Hal tersebut didasarkan pada prinsip hak asasi bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, pemerintah daerah harus menitikberatkan Masyarakat sebagai penerima manfaat dan pelaku Pembangunan.

Renstra ini disusun berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategik baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan tantangan yang ada atau timbul serta memuat visi dan misi sebagai penjabaran dalam membina unit kerja serta kebijaksanaan sasaran dan prioritas sasaran dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Sulawesi Selatan memuat Visi Misi Provinsi Sulawesi Selatan, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah, Program Prioritas dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta berpedoman kepada RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2025- 2029 yang bersifat indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Saat ini telah diberlakukan berbagai regulasi yang berpengaruh dan menuntut penyesuaian dalam penyelenggaraan tata pemerintahan dan pembangunan daerah, antara lain Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan penyesuaian terhadap indikator dan target sebagaimana tertuang dalam RPJMD dengan memperhatikan capaian kinerja, kondisi, potensi dan amanat regulasi. Dalam rangka merespon kebijakan nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029, Provinsi Sulawesi Selatan diarahkan untuk Pengembangan Kawasan Wilayah Metropolitan Makassar dan sekitarnya, Kawasan Perkotaan Kecil, Kawasan Industri Takalar, Kawasan Perikanan Budidaya dan Sentra Rumput Laut, Kawasan Sentra Garam, Kawasan Lumbung Pangan Teluk Bone dan sekitarnya serta Kawasan Afirmasi (lampiran ke 4 Perpres Tahun 2025 Nomor 12).

Kemudian untuk mendatangkan devisa daerah maka perlu dilakukan peningkatan pelayanan, perbaikan tata kelola dan kapasitas pelabuhan perikanan, dukungan kepada sistem pelayaran dan logistik perikanan sehingga mampu menguatkan posisi Sulawesi Selatan sebagai Poros Maritim dan Pintu Gerbang Utama Kawasan Timur Indonesia. Oleh karena itu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan terus mendorong peningkatan pertumbuhan produksi dengan fokus pada peningkatan produksi perikanan dan kemaritiman, sementara pada pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan diupayakan melalui pengembangan sarana dan prasarana teknologi yang ramah lingkungan. Belum optimalnya pencapaian tingkat produktifitas usaha perikanan memberi dampak pada kegiatan pembangunan dan pengembangan sektor perikanan secara keseluruhan. Pembangunan usaha Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan kedepan akan menjadi usaha perikanan yang berproduktivitas dan memiliki daya saing yang tinggi baik pasar dalam negeri maupun pasar ekspor. Upaya yang dilakukan diarahkan pada tiga ruang lingkup pengembangan yaitu hilirisasi dan optimalisasi kegiatan produksi melalui pengembangan inovasi teknologi produktif, peningkatan daya saing dan pemasaran melalui penanganan dan penerapan teknologi pengolahan produk hasil perikanan sehingga menghasilkan produk yang kompetitif dan berkarakter, dan pengembangan mekanisme serta jaringan pemasaran yang inklusif. Dengan komitmen ini, pembangunan Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan secara optimal akan mampu memberi kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Sulawesi Selatan dan Nasional.

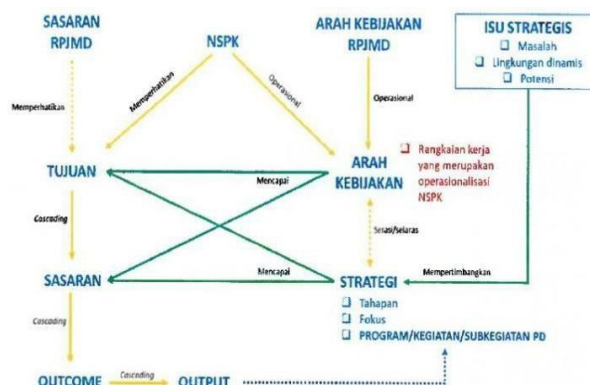
Adanya arahan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan 2021-2024 oleh pemerintah pusat yaitu **Berbasis Ekonomi Biru** dengan output dari penerapan blue economy dibungkus dalam regulasi dan program-program kerja yang tujuannya untuk menyeimbangkan ekologi dan ekonomi dalam pemanfaatan sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun kebijakan tersebut yaitu :

1. Perluasan wilayah konservasi perairan.

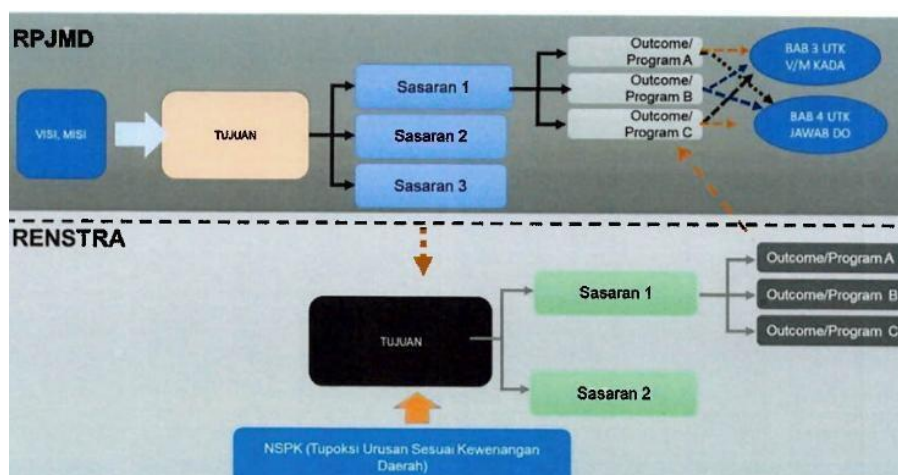
2. Penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan zona penangkapan.
3. Pengembangan perikanan budidaya berkelanjutan di laut, pesisir dan tawar yang berorientasi ekspor dan berbasis kearifan lokal.
4. Pengendalian pesisir dan pulau-pulau kecil pesisir dan laut dari kegiatan ekonomi yang merusak.
5. Pengurangan sampah plastik di laut melalui Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut. Beberapa alasan yang dapat menjadi pertimbangan terhadap pencapaian target pembangunan kelautan dan perikanan Sulawesi Selatan, diantaranya :
  - 1) Pembangunan Sektor Perikanan Budidaya kedepan menekankan pada peningkatan produksi melalui upaya rekayasa teknologi dan upaya perbaikan lingkungan/habitat pemeliharaan;
  - 2) Pembangunan Sektor Perikanan Tangkap diarahkan pada pengendalian pemanfaatan sumberdaya perikanan yang berbasis pada tiga fokus pengembangan, yaitu inovasi dan pengembangan teknologi penangkapan ikan ramah lingkungan (fishing technology), penguasaan dan pengembangan pengetahuan terhadap target tangkapan (fish target), dan peningkatan pemahaman terhadap daerah penangkapan ikan (fishing ground);
  - 3) Adanya Gerakan Peningkatan Produksi Komoditas terhadap 8 komoditi unggulan seperti udang, rumput laut, kepiting, nila, lobster dan tuna tongkol cakalang sebagai wujud dari Hilirisasi Perikanan dan Kelautan;
  - 4) semakin bergairahnya masyarakat pembudidaya untuk berusaha karena lingkungan sumberdaya perikanan yang mendukung;
  - 5) ketersediaan stok ikan mendukung program nasional makanan bergizi gratis.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Lembaga pemerintah diberi mandat untuk mengemban tugas dan tanggungjawab pembinaan, pelayanan kepada masyarakat dimana dituntut untuk menyusun Perencanaan Strategis yang Akuntabel. Hal ini sejalan dengan tuntutan masyarakat kepada aparatur pemerintah untuk merespon atas mandat yang diberikan dalam rangka pencapaian visi misi pembangunan.

Gambar 1. Konsep Dokumen Renstra



Gambar 2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra



## 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum dari penyusunan RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 – 2029 adalah :

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah,
3. INPRES No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Nasional yang mengamanatkan kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk mengintegrasikan gender dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pada seluruh bidang pembangunan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
5. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia;
7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota,
19. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan No.80 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan;
20. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan No 37 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi UPT Balai Penerapan Mutu Produk Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan No 38 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi Cabang Dinas Kelautan;
23. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan No 39 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi Cabang Dinas Kelautan;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 45, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
  26. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 22 Tahun 2019 tentang. Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1. Tahun 2016 tentang tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Daerah;
  27. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomo 22 tahun 2019 terkait Pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang PUG dalam Pembangunan Daerah
  28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Sumber Daya Ikan;
  29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 03 tahun 2022 tentang Rencana Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041;
  30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Ekosistem Mangrove Berkelanjutan ( Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 4)
  31. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah
  32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025- 2029 disusun dengan maksud untuk menjabarkan kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, terutama yang terkait dengan urusan Kelautan dan Perikanan sehingga rumusan program strategis dengan skala prioritas, kebijakan, indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan lebih terarah. Adapun tujuan penyusunan Renstra Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan adalah, 1) sebagai pedoman bagi unit kerja lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (Renja) untuk lima tahun ke depan yang diimplementasikan dalam pelaksanaan program kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, 2) sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan bagi unit kerja lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan instansi terkait dikabupaten/kota dalam mendukung pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan berpedoman pada RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang diimplementasikan melalui dukungan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**Bab I** : Pendahuluan. Bagian ini memuat uraian tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

**Bab II** : Gambaran Pelayanan OPD memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Kelautan dan Perikanan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumberdaya yang dimiliki, dan kinerja pelayanan melalui pelaksanaan Renstra sebelumnya dan capaian program yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode 2025 - 2029 serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan, Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan beserta faktor-faktor yang menganalisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan dapat dioperasionalkan dan secara moral serta estetika birokratis yang dapat dipertanggung jawabkan.

**Bab III** : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, memuat uraian tentang tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang menggambarkan apa yang diharapkan pada yang akan datang, dan menggambarkan langkah - langkah utama yang akan diambil untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian menyajikan Cascading perangkat daerah mulai dari tujuan, sasaran, output, outcome dan indikatornya masing-masing, Strategi dan Arah Kebijakan, memuat uraian tentang penjelasan yang masing-masing tujuan dan sasaran yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya akan dirinci lebih detil bagaimana cara mencapainya melalui strategi dan arah kebijakan yang akan dirumuskan.

**Bab IV** : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Serta Pendanaan, memuat rencana program dan kegiatan serta pendanaan. Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, memuat indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**Bab V** : Penutup.



# Bab II

**GAMBARAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan**

##### **2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah**

Sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan maka tugas dan fungsi organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan yang termuat dalam Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
  1. Subbagian Program;
  2. Subbagian Umum; dan
  3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Kelautan dan Pesisir;
- d. Bidang Perikanan Tangkap;
- e. Bidang Budidaya dan Daya Saing Produk;
- f. Bidang Pengawasan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang dan Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Kelautan dan Pesisir, Budidaya dan Daya Saing, Perikanan Tangkap dan Pengawasan.

Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (5), Pasal 22 ayat (8), Pasal 28 ayat (5), Pasal 41 ayat (5), dan Pasal 49 ayat (5) pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Provinsi Sulawesi Selatan membentuk Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dengan pembentukan dan klasifikasinya mengacu pada Permendagri nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Adapun Cabang Dinas Kelautan yang terbentuk sesuai Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Kelautan yang berkedudukan :

- a. Cabang Dinas Kepulauan Selayar, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Selayar yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kabupaten Kepulauan Selayar;
- b. Cabang Dinas Pangkajene dan Kepulauan, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Pangkep yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kabupaten Kepulauan Pangkajene dan Kepulauan;
- c. Cabang Dinas Luwu Raya, Kelas A berkedudukan di Kota Palopo yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Tana Toraja, dan Kabupaten Toraja Utara;
- d. Cabang Dinas Ajatappareng, Kelas A berkedudukan di Kota Pare-Pare yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kabupaten Barru, Kota Pare-Pare, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidrap, dan Kabupaten Enrekang;
- e. Cabang Dinas Bosowasi, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Bone yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo, dan Kabupaten Sinjai;
- f. Cabang Dinas Wilayah Selatan, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Bulukumba yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bantaeng, dan Kabupaten Bulukumba;
- g. Cabang Dinas Wilayah Mamminasata, Kelas A berkedudukan di Kota Makassar yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar;

Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melalui Bidang Teknis dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Gubernur berdasarkan wilayah kerja. Kepala Cabang Dinas Kelautan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan program sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya;
- b. Koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya;
- c. Koordinasi dan pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya

Selain itu Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) provinsi yang secara geografis mempunyai jangkauan pelayanan cukup luas, untuk memudahkan pelayanan dan pelaksanaan tugas UPTD maka dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja nonstruktural. Unit Pelaksana Teknis adalah satuan kerja atau organisasi bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induk. Penjelasan tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.Pan/11/2008 Tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Adapun Unit Pelaksana Teknis Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur yaitu :

- a. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 35 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Payau/Laut pada Dinas Kelautan dan

Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, dimana Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan pelayanan dan pengelolaan pemanfaatan sumber daya ikan, serta keselamatan operasional kapal perikanan. Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- Perencanaan teknis pelaksanaan pelayanan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan, serta keselamatan operasional kapal perikanan;
  - Pelaksanaan teknis pelayanan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya ikan, serta keselamatan operasional kapal perikanan;
  - Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan pemanfaatan Pelabuhan Perikanan;
  - pelaksanaan administrasi UPT; dan
  - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.
- b. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 36 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Wilayah I dan II pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, dimana Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan pelayanan dan pengelolaan pemanfaatan sumber daya ikan, serta keselamatan operasional kapal perikanan. Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- Perencanaan teknis pelaksanaan pelayanan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan, serta keselamatan operasional kapal perikanan;
  - Pelaksanaan teknis pelayanan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya ikan, serta keselamatan operasional kapal perikanan;
  - Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan pemanfaatan Pelabuhan Perikanan;
  - pelaksanaan administrasi UPT; dan
  - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.
- c. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 37 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Penerapan Mutu Produk Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.

Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan pelayanan pengujian mutu dan keamanan produk perikanan, diversifikasi produk perikanan, dan pemenuhan persyaratan SNI produk perikanan. Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

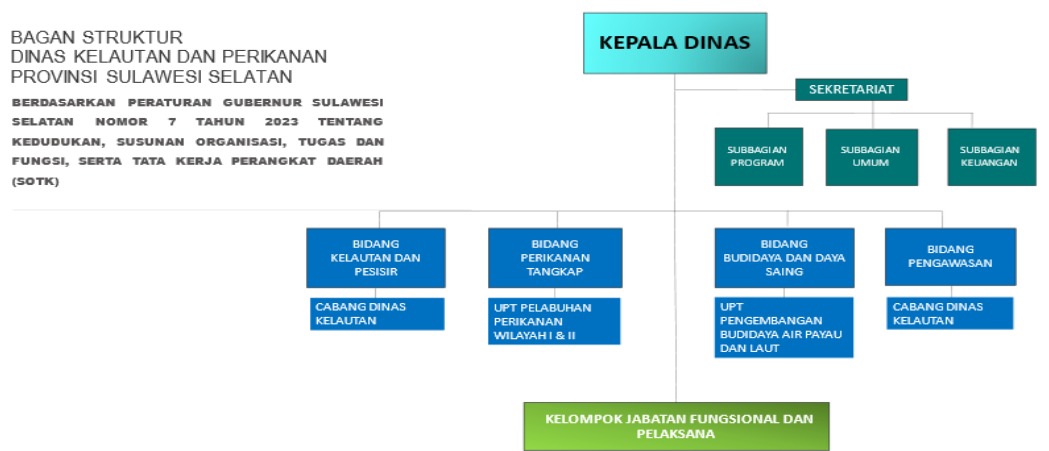
- Perencanaan teknis pelaksanaan pelayanan pengujian mutu dan keamanan produk perikanan, diversifikasi produk perikanan, dan pemenuhan persyaratan SNI pada produk hasil perikanan;
- Pelaksanaan teknis pelayanan pengujian mutu dan keamanan produk perikanan, diversifikasi produk, dan penerapan persyaratan SNI produk perikanan pada produk hasil perikanan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan pengujian mutu dan keamanan produk perikanan, diversifikasi produk, dan penerapan persyaratan SNI pada produk hasil perikanan;
- Pelaksanaan administrasi UPT; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembentukan Cabang Dinas Kelautan dan

Unit Pelaksana Teknis maka Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris membawahi 3 SubBagian
3. Bidang sebanyak 4 Unit
4. UPT sebanyak 4 unit dengan membawahi 1 Bagian Tata Usaha dan 2 Unit Seksi
5. Kepala CDK sebanyak 7 unit dengan membawahi 1 Bagian Tata Usaha dan 2 Unit Seksi

**Gambar 3**  
**Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan**



### 2.1.2 Sumberdaya Dinas Kelautan dan Perikanan

- a. Komposisi PNS Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan menurut Jenis Kelamin Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi terdiri atas 4 bidang teknis, Sekretariat dan didukung 5 Unit Pelayanan Teknis Daerah. Pada unit tersebut telah terdistribusi pegawai dengan jumlah sumberdaya kepegawaian sebagai berikut :

**Tabel 2.1.**  
**Komposisi PNS Menurut Jenis Kelamin**

Unit Kerja	PNS		Jumlah	Non PNS		Jumlah
	Pria	Wanita		Pria	Wanita	
Kepala Dinas	1	0	1	0	0	0
Sekretariat	18	22	40	19	10	29
Bidang PPRLP3K	4	7	11	0	2	2
Bidang Perikanan Tangkap	5	5	10	1	1	2
Bidang Pengawasan SDKP	2	5	7	0	1	1
Bidang Perikanan Budidaya dan DSPKP	4	8	12	0	2	2
CDK Kep. Selayar	3	1	4	3	1	4
CDK Pangkajene dan Kepulauan	7	3	10	7	2	9

Unit Kerja	PNS		Jumlah	Non PNS		Jumlah
	Pria	Wanita		Pria	Wanita	
CDK Luwu Raya	6	4	10	3	1	4
CDK Ajatappareng	4	3	7	4	1	5
CDK Bosowasi	3	3	6	4	3	7
CDK. Wilayah Selatan	2	5	7	7	1	8
CDK Mamminasata	5	2	7	6	2	8
UPT PP Wilayah I	6	6	12	7	6	13
UPT PP Wilayah II	11	1	12	5	9	14
UPT BPMPP	4	6	10	6	8	14
UPT PBAP	7	3	10	11	2	13
Fungsional	2	3	5	0	0	0
Dipekerjakan	0	1	1	0	0	0
Jumlah	94	88	182			

Sumber: Data Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan PrOVINSI Sulawesi Selatan Tahun 2024

Jumlah pegawai pada tahun 2024 terdiri atas PNS sebanyak 182 orang dengan komposisi gender pria sebanyak 94 orang dan wanita sebanyak 88 orang dengan rasio perbandingan 2:1 sedangkan kebutuhan pegawai berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja untuk pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi masih membutuhkan 418 pegawai. Sehingga untuk menanggapi kebutuhan pegawai tersebut maka penempatan tenaga non ASN disebar di beberapa unit kerja untuk menanggapi kebutuhan tersebut. Saat ini tenaga non ASN di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sejumlah 135 orang dengan komposisi gender pria sebanyak 83 orang dan wanita sebanyak 52 orang dengan rasio perbandingan 2:1.

2. Komposisi PNS Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan menurut Golongan Tingkat kepangkatan dan golongan pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan bervariasi dari Golongan I sampai Golongan IV, Adapun strukturnya sebagai berikut:

Tabel 2.2.  
Komposisi PNS Menurut Golongan

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	Golongan IV/d	-	-	-
2	Golongan IV/c	1	0	1
3	Golongan IV/b	5	5	10
4	Golongan IV/a	19	15	34
5	Golongan III/d	33	48	81
6	Golongan III/c	11	8	19
7	Golongan III/b	8	3	11
8	Golongan III/a	9	8	17
9	Golongan II/d	3	0	3
10	Golongan II/c	3	0	3
11	Golongan II/b	1	0	1
12	Golongan II/a	0	1	1

Unit Kerja	PNS		Jumlah	Non PNS		Jumlah
	Pria	Wanita		Pria	Wanita	
13	Golongan I/d		0	0	0	
14	Golongan I/c		1	0	1	
15	Golongan I/b		0	0	0	
16	Golongan I/a		0	0	0	
<b>Jumlah</b>			<b>94</b>	<b>88</b>	<b>182</b>	

Sumber: Data Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

- b. Komposisi PNS Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Eselon Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) harus dibarengi dengan sistem karier yang baik. Tapi sebelumnya harus dilakukan analisis beban kerja. Kepala Dinas harus memiliki komitmen yang kuat untuk membangun sistem karier dalam jabatan, sesuai dengan amanat UU No. 5/2014 tentang ASN. Karier PNS berbasis pada sistem merit yang lebih terbuka, adil, transparan dengan kualifikasi, kompetensi, kinerja serta integritas, dan moralitas yang baik.

**Tabel 2.3.**  
**Komposisi PNS Menurut Golongan**

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	Eselon II	1	0	1
2	Eselon III	11	4	15
3	Eselon IV	24	6	30
<b>Jumlah</b>		<b>36</b>	<b>10</b>	<b>46</b>

Sumber: Data Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

- 2) Komposisi PNS Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Pendidikan Formal Yang Ditamatkan

Jumlah Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 tercatat sebanyak 182 orang, dengan tingkat pendidikan bervariasi dari Sekolah Dasar (SD) sampai Doktor (S3). Adapun komposisi sebagai berikut.

**Tabel 2.4.**  
**Struktur Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Formal**

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	S3	4	2	6
2	S2	25	32	57

3	S1	47	51	98
4	Sarjana Muda	4	0	4
5	SLTA	13	3	16
6	SLTP	0	0	0
7	SD	1	0	1
<b>Jumlah</b>		<b>94</b>	<b>88</b>	<b>182</b>

Sumber: Data Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

- 3) Komposisi PNS Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan yang mengikuti Diklat PIM Tahun 2018-2024. Tingkat penjenjangan yang telah diikuti oleh pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 2018–2022 sebanyak 38 orang yang mulai dari Diklat PIM IV sampai dengan Diklat PIM II. Adapun komposisinya sebagai berikut:

**Tabel 2.5.**  
**Komposisi Diklat PIM Tahun 2018-2024**

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	Diklat PIM II	2	0	2
2	Diklat PIM III	6	3	9
3	Diklat PIM IV	7	2	9
<b>Jumlah</b>		<b>15</b>	<b>5</b>	<b>20</b>

Sumber: Data Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

- 4) Kebutuhan ASN Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. SulSel. Berdasarkan Analisa terhadap kebutuhan ASN di Dinas Kelautan dan Perikanan terdapat deviasi antara kebutuhan dengan jumlah ASN yang tersedia saat ini sebagaimana table 2.6

**Tabel 2.6.**  
**Jumlah Sebaran dan Kebutuhan ASN Lingkup DKP SulSel**

No	Bidang/Unit	Tersedia	Kebutuhan	Selisih
1	Kepala Dinas	1	1	0
2	Sekretariat	40	77	37
3	Bidang PPRLP3K	11	15	4
4	Bidang Perikanan Tangkap	11	13	2

No	Bidang/Unit	Tersedia	Kebutuhan	Selisih
5	Bidang Pengawasan SDKP	7	10	3
6	Bidang Perikanan Budidaya dan DSPKP	12	15	3
7	CDK Kep. Selayar	4	18	14
8	CDK Pangkajene dan Kepulauan	10	23	13
9	CDK Luwu Raya	10	22	12
10	CDK Ajatappareng	7	20	13
11	CDK Bosowasi	6	21	15
12	CDK. Wilayah Selatan	7	21	14
13	CDK Mamminasata	7	19	12
14	UPT PP Wilayah I	12	49	37
15	UPT PP Wilayah II	12	51	39
16	UPT BPMPP	10	29	19
17	UPT PBAP	10	33	23
18	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda	0	5	5
19	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Madya	0	3	3
20	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda	0	4	4
21	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Madya	0	2	2
22	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda	0	9	9
23	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Madya	1	4	3
24	Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda	0	4	4
25	Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Madya	2	2	0
26	Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Muda	0	2	2
27	Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Madya	0	1	1
28	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli Muda	0	0	0
29	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli Madya	0	0	0
30	Analisis Kebijakan Ahli Muda	0	0	0
31	Analisis Kebijakan Ahli Madya	0	0	0
32	Perencana Ahli Muda	0	1	1

No	Bidang/Unit	Tersedia	Kebutuhan	Selisih
33	Perencana Ahli Madya	1	1	0
34	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	0	1	1
35	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya	0	0	0
36	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	0	0	0
37	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya	0	0	0
38	Arsiparis Ahli Muda	1	1	0
39	Arsiparis Ahli Madya	0	0	0
<b>Total</b>		182	477	295

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

- 5) Sarana dan Prasarana (Aset) yang mendukung Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengembangkan Program dan kegiatan guna menunjang tugas dan fungsi pelayanan adalah :

**Tabel. 2.7**  
**Daftar Aset yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan**

No.	Jenis Aset	Status (Kondisi)			Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak Berat	
1	PPI Pelabuhan Perikanan	16	2	1	19
2	SPDN	2	0	3	5
3	Dempon Tambak	10	2	1	13
4	Gedung Konservasi	4	0	0	4
5	Kantor UPT	4	0	0	4
6	Kantor CDK	7	0	0	7
7	Laboratorium	2	0	0	2
8	Kolam Perbenihan Budidaya Payau	35	15	10	60
9	Kolam Perbenihan Budidaya Air Tawar	8	0	0	8
10	Kolam Pendederan Budidaya	4	0	0	4

	Payau				
11	Kolam Pendederan Budidaya Air Tawar	10	4	0	14
12	Kendaraan Operasional (Mobil)	6	7	16	29
13	Kendaraan Operasional (Motor)	9	18	104	131
14	Kantor Pelayanan Pengujian Mutu	1	0	0	1
15	Speed Boat	6	3	3	12
16	Pos Pengawas	3	0	2	5
17	Tanah Bangunan Perumahan	21	1	5	27

Sumber : Data Asset UKH DKP

Pengelolaan aset telah menjadi tanggung jawab unit kerja yang sesuai dengan tugas fungsi yaitu :

## A. Bidang PerikananTangkap

### 1. Pelabuhan Perikanan

Pelabuhan Perikanan adalah Prasarana Perikanan tangkap yang fungsinya : a) tempat kegiatan bongkar muat hasil perikanan, b) sebagai sarana bengkel untuk perbaikan kapal, mesin dan alat tangkap ikan, c) sebagai tempat sarana pembinaan nelayan dan sekaligus sebagai home base nelayan, d) disamping sarana dan prasarana tersebut, juga dilengkapi sarana penunjang yakni (1) Tempat Pemasaran Ikan, (2) Tempat Kapal Bersandar, (3) Perkantoran, sampai dengan tahun 2021 berdasarkan hasil verifikasi BPKP, terdapat 19 unit Pelabuhan Perikanan (Tipe D) yang ada di 15 Kabupaten/kota yang diserahkan ke Provinsi Sulawesi Selatan dengan kondisi operasional sebanyak 13 unit, dan tidak beroperasi sebanyak 6 unit. Secara detail jumlah Pelabuhan Perikanan di Sulawesi Selatan seperti pada tabel 2.8

**Tabel 2.8**  
**Kondisi Sarana Pelabuhan Perikanan di Sulawesi Selatan**

No	Nama Pelabuhan Perikanan	Lokasi	Kelas / Type	Kewenangan
		Kab /Kota		
1	Pelabuhan Perikanan Untia	Kota Makassar	PPN/B	Kewenangan Pusat
2	Pelabuhan Perikanan Paotere	Kota Makassar	PPI / D	Operasional/ P3D (Kewenangan Provinsi)
3	Pelabuhan Perikanan Bontobahari	Kab. Maros	PPI / D	Tdk Operasional/ P3D (Kewenangan Provinsi)
4	Pelabuhan Perikanan Labuang	Kab. Maros	PPI / D	Operasional /TPI (Kewenangan Kab/Kota)
5	Pelabuhan Perikanan Maccini Baji	Kab. Pangkep	PPI / D	Operasional/ P3D (Kewenangan Provinsi)
6	Pelabuhan Perikanan	Kota Parepare	PPI / D	Operasional/ P3D (Kewenangan

No	Nama Pelabuhan Perikanan	Lokasi	Kelas / Type	Kewenangan
		Kab / Kota		
	Cempae			Provinsi)
7	Pelabuhan Perikanan Lonrae	Kab. Bone	PPI / D	Operasional / P3D (Kewenangan Provinsi)
8	Pelabuhan perikanan Bone Pute	Kab.Luwu	PPI / D	Tdk Operasional / P3D (Kewenangan Provinsi)
9	Pelabuhan Perikanan Ulo-Ulo	Kab. Luwu	PPI / D	Operasional/P3D (Kewenangan Provinsi)
10	Pelabuhan Perikanan Balambang	Kab. Luwu	PPI / D	Operasional/P3D (Kewenangan Provinsi)
11	Pelabuhan Perikanan Pontap	Kota Palopo	PPI / D	Operasional/P3D (Kewenangan Provinsi)
12	Pelabuhan Perikanan Malili	Kab. Luwu Timur	PPI / D	Tdk Operasional/TPI (Kewenangan Kab/Kota)
13	Pelabuhan Perikanan Lappa	Kab. Sinjai	PPI / D	Operasional/P3D (Kewenangan Provinsi)
14	Pelabuhan Perikanan Kajang	Kab. Bulukumba	PPI / D	Operasional /P3D (Kewenangan Provinsi)
15	Pelabuhan Perikanan Bontobahari	Kab. Bulukumba	PPI / D	Operasional /P3D (Kewenangan Provinsi)
16	Pelabuhan Perikanan Birea	Kab. Bantaeng	PPI / D	Operasional/P3D (Kewenangan Provinsi)
17	Pelabuhan Perikanan Tanrusampe	Kab. Jeneponto	PPI / D	Operasional Musiman/P3D (Kewenangan Provinsi)
18	Pelabuhan Perikanan Beba	Kab. Takalar	PPI / D	Operasional/P3D (Kewenangan Provinsi)
19	Pelabuhan Perikanan Barombang	Kab. Gowa	PPI / D	Operasional/P3D (Kewenangan Provinsi)
20	Pelabuhan Perikanan Bonehalang	Kab. Kep. Selayar	PPI / D	Operasional/ P3D (Kewenangan Provinsi)
21	Pelabuhan perikanan Polejiwa	Kab. Barru	PPI / D	Tdk Operasional/ P3D (Kewenangan Provinsi)
22	Pelabuhan perikanan Sumpang Binangae	Kab. Barru	PPI / D	Operasional/ P3D (Kewenangan Provinsi)

Sumber : Bidang Perikanan Tangkap dan Laporan Tahunan 2021

## 2. Stasiun Pengisian Bahan Bakar

Sarana Stasiun Pengisian Bahan Bakar yang berlokasi di Pelabuhan Perikanan dimana aset tersebut sudah diserahkan ke provinsi yaitu sebagai berikut :

- |  |                     |        |
|--|---------------------|--------|
| 1. SPDN Pelabuhan Perikanan Maccini Baji | Kabupaten Pangkep   | 1 unit |
| 2. SPDN Pelabuhan Perikanan Kajang       | Kabupaten Bulukumba | 1 unit |
| 3. SPDN Pelabuhan Perikanan Lonrae       | Kabupaten Bone      | 1 unit |
| 4. SPDN Pelabuhan Perikanan Pontap       | Kota Palopo         | 1 unit |
| 5. SPDN Pelabuhan Perikanan Balambang    | Kabupaten Luwu      | 1 unit |

Adapun jumlah SPDN yang ada di Prov Sulsel (Status kepemilikan dan kondisi SPDN) disajikan pada tabel dibawah ini .

**Tabel 2.9**  
**Jumlah SPDN Provinsi Sulawesi Selatan**

<b>DAFTAR SPDN DI SULAWESI SELATAN</b>								
No	NO. SPBUN REG	PENGELOLA SPDN/SPBN/SPBUN (PT/CV/UDI/KOPERASI)	Lokasi			PENANGGUNG JAWAB		KET.
			Kab / Kota	Kecamatan	Kel/Desa	NAMA	NO. HP	
1	79.919.02	SPDN Koperasi Konsumen Karya Mario	Luwu	Ponrang	Desa Tirowali	Yandi	0823-4737-8781	
2	76.919.03	SPDN Koperasi Pemasaran Samudra Mario	Luwu	Belopa	Desa Belopa	Abbas Anto	0813-5560-4565	
3	78.926.01	SPDN Koperasi Unit Desa Mina Lappa	Sinjai	Sinjai Utara	Kel. Lappa	Sainal Abidin	081-627-6665	
4	78.926.03	SPBUN Lanea-Rea	Sinjai	Sinjai Utara	Kel. Lappa	---		
5	78.926.02	SPDN Harapan Jaya	Sinjai	Sinjai Timur	Desa Tongke-Tongke	---		
6		SPBUN Aura Batu-Batu	Takalar	Galesong Utara	Desa Aeng Batu-Batu	Satriani	0859-7484-6237	
7	78.922.02	SPBUN Soreang Galut	Takalar	Galesong Utara	Desa Soreang	---		
8	78.922.04	SPDN Rabiah Mandiri	Takalar	Sanrobone	Desa Laguruda	---		
9	78.912.01	SPBUN CV. Karimah Mario	Pinrang	Lembang	Desa Binanga Karaeng	Basiru	0813-4351-8172	
10	78.906.01	SPDN CV. Eka Jaya	Pangkep	Pangkajene	Kel. Mappakasalle	---		
11	78.906.02	SPDN CV. Cahaya Solo	Pangkep	Pangkajene	Kel. Tekolabbua	Ari	0823-1611-0234	
12	78.906.03	SPDN Perumda Mappatuwo	Pangkep	Laibakkang	Kel. Pundatabaji	---		
13	76.906.01	APMS CV. H.Abidin Gaffar	Pangkep	Lukang Tupabiring Utara	Desa Mattiro Ulang	---		
14	78.927.04	SPDN CV. Harapan Daerah	Bone	Kajuara	Desa Tarasu	Wawan	0852-5500-5399	
15	78.927.02	SPBUN CV. Kop Mitra Bina Bahari	Bone	Tanete Riattang Timur	Kel. Lonrae	Andi Anto	0811-4222-219	
16	78.927.03	SPBUN CV. Prima Tama	Bone	Barebbo	Desa Watu	A. Rompe	0852-9804-4337	
17	79.919.01	SPBUN Koperasi Dewi Sartika	Palopo	Wara Timur	Kel. Ponjalee	MT. Hasim	0823-3700-7269	
18	79.929.04	SPDN Koperasi Pemasaran Nelayan Mina Bahari	Luwu Timur	Malli	Desa Wewangru	Hj. Rini Rusdi	0852-4681-7776	
19	78.929.02	SPBUN Koperasi Bahari Indah	Luwu Timur	Wotu	Desa Lampenai	TPI Wotu	0812-4209-0699	
20	79.905.06	SPBUN Koperasi Mina Rezky	Maros	Bontoa	Desa Pajukukang	Bambang	0812-1648-0321	
21	79.905.03	SPBUN Koperasi Tani Tambak Mario Nusantara	Maros	Turkale	Kel. Pettuadde	Yusuf Latief	0812-5315-9004	
22	78.905.01	SPBUN CV. Energi Prima	Maros	Maros Baru	Maros Baru	Syahrir	0823-4402-2999	
23	78.905.02	SPBUN Baji Parnai	Maros	Maros Baru	Desa Bonkamase	Ruslin	0852-9969-0088	
24	78905.05	SPBUN Mina Bonto Bahari	Maros	Bontoa	Desa Pajukukang	---		
25	78.901.01	SPDN Koperasi Nelayan Insan Perikanan	Makassar	Ujung Tanah	Kel. Gusung	Indra	0852-9928-8870	
26	78.925.03	SPDN Koperasi Kencana Bahari	Bulukumba	Ujung Bulu	Kel. Bentenge	---		
27	79.925.02	SPBUN CV. Windu Bahari	Bulukumba	Kajang	Kel. Tanah Jaya	Andibudhy	0852-4257-4376	
28	78.927.04	SPBUN CV. Ananda Utama	Bulukumba	Bontonahari	Kel. Tanah Lemo	H. Tamsar	0813-1212-1275	
29	78.901.03	SPBUN Koperasi Konsumen Tani Dan Nelayan Tekolabbua Sejahtera	Maros	Maros Baru	Kel. Bori Masunggu	Yuswaninna	0822-9335-3244	

## B. Bidang Perikanan Budidaya dan Daya Saing

### 1. Dempon Tambak

Sarana Dempon tambak milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terdapat di hampir seluruh Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. Adapun peranan sarana tersebut adalah :

- Tempat uji coba teknologi budidaya
- Tempat pelatihan dan pembinaan bagi petugas pemerintah dan swasta untuk berusaha di bidang perikanan tambak
- Sarana pembelajaran bagi petugas perikanan budidaya dalam peningkatan kinerjanya

### 2. Sarana Perikanan Budidaya Payau dan Laut

Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Payau dan Laut yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dikelola oleh UPT Perikanan Budidaya Payau dan Laut terdapat di kabupaten Barru, yang peranannya adalah:

- Sarana uji coba pembenihan udang untuk spesies atau jenis udang tertentu
- Sarana pengkajian terhadap tingkat produktivitas dan kelangsungan hidup budidaya payau dan laut.

- c. Sarana pelatihan, pembinaan petugas pemerintah dan swasta yang memiliki usaha dibidang pembenihan udang
- d. Sarana pembelajaran bagi petugas BPU dalam peningkatan kinerjanya
- e. Sebagai unit produksi benur udang yang berkualitas. Adapun unit sarana dan prasarana yang terletak di UPT Perikanan Budidaya Payau dan Laut yaitu:
  - 1. Kantor UPT 1 unit
  - 2. Kendaraan operasional 1 unit
  - 3. Bangsal Pembenihan 4 unit
  - 4. Kolam perbenihan 60 unit
  - 5. Laboratorium 1 unit
  - 6. Rumah Dinas Pegawai 6 unit
  - 7. Musholla 1 unit
  - 8. Ruang Genset 1 unit
  - 9. Gedung Pengolahan Limbah 1 unit
  - 10. Gedung Pertemuan 1 unit
  - 11. Tandon 2 unit

### 3. Instalasi Pengembangan Budiaya AirTawar

Sarana Pengembangan Budidaya Air Tawar (Instalasi Lajoa) yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terdapat di Kabupaten Soppeng dan pengembangannya didukung Lima (5) Kabupaten/Kota, masing-masing yaitu Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidrap, Kota Palopo dan Kabupaten Gowa. Adapun peranannya adalah:

- ✓ Sarana uji coba teknologi pembenihan dan pembesaran ikan air tawar
- ✓ Sarana Pelatihan dan Pembinaan kegiatan budidaya air tawar
- ✓ Sarana pemurnihan benih ikan air tawar untuk menghasilkan bibit ikan dan calon induk unggul dan tahan terhadap penyakit

Adapun unit sarana dan prasarana yang terletak di Instalasi Lajoa yaitu :

- ❖ Kantor Instalasi 1 unit
- ❖ Kolam perbenihan 4 unit
- ❖ Kolam pendederan 4 unit
- ❖ Kantor Pembinaan Usaha dan Kelembagaan 1 unit
- ❖ Guest house 2 unit
- ❖ Sarana produksi untuk kebutuhan Restocking dan pemenuhan calon induk untuk Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan BBI lokal Kabupaten/Kota.

### 4. Sarana Penerapan Mutu dan Pengembangan Produk Hasil Perikanan

Sarana dan Prasarana Penerapan Mutu dan Pengembangan Produk Hasil Perikanan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dikelola oleh UPT Balai Penerapan Mutu dan Pengembangan Produk Hasil Perikanan, yang berlokasi di kota Makassar adapun aset-aset yang berperan dalam pengembangan produk dan pelayanan mutu adalah:

- ❖ Sarana pengujian terhadap mutu hasil perikanan,
- ❖ Sarana pengkajian terhadap mutu hasil pengolahan modern dan tradisional hasil perikanan,
- ❖ Sarana pembinaan dan pengawasan mutu hasil perikanan,
- ❖ Sarana pelatihan dan pembelajaran bagi petugas pemerintah dan swasta yang menangani hasil perikanan.

### 5. Depo

Disamping Sarana dan Prasarana Penerapan Mutu dan Pengembangan Produk Hasil Perikanan tersebut di atas, juga dilengkapi dengan Depo 1 unit yang peranannya



**Tabel 2.11**  
**Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
I																		
1	Meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah produksi dan produktivitas produksi	Jumlah Produksi Perikanan (1000 ton)	Jumlah Produksi Perikanan	4.092,8	4.342,2	4.546,1	4.759,8	4.779,2	4.102,3	4.498,8	4.532,7	4.620,3	4.825,6	100,3	103,6	99,7	97,1	101,0
			Produksi Perikanan Budidaya (1000 ton)	3.703,8	3.898,7	4.093,7	4.298,3	4.331,2	3.713,1	4.081,5	4.095,9	4.115,6	4.314,2	100,3	104,7	100,1	95,8	99,6
			Produksi Perikanan Tangkap (1000 ton)	389,0	396,9	404,9	413,0	442,5	389,2	417,4	436,7	504,7	511,4	100,1	105,2	107,9	122,2	115,6
			Jumlah produksi garam rakyat (ton)	45.846	46.500	47.500	48.450	5.000	45.310,5	1.502,4	3.387,8	114.959,9	48.018,5	98,9	3,3	7,2	237,3	960
			Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB (%)	4,2	4,6	5,1	5,6	10,5	8,5	9,4	9,4	8,7,8	202,4	204,4	190	153,6	80	
2	Meningkatnya Konsumsi Ikan	Jumlah Konsumsi Ikan (Kg/ Kap/th)		55	59,5	62,7	65,9	72,48	65,5	68,3	69,7	71,1	72,6	119,1	114,4	111,2	107,9	100,2
			Nilai produksi ikan konsumsi dan yang dipasarkan (Rp.M)	298,10	304,96	304,96	317,28	373,28	235,72	354,20	367,16	496,11	524,58	79,1	120,0	120,4	156,4	140,6
			Produksi olahan ikan konsumsi dan non konsumsi (ton)	5.492,06	7.051,7	8.109,5	9.325,9	6.029,83	5.204,8	6.022,7	5.487,9	6.998,2	6.963,2	94,8	85,4	67,7	75,1	115,5
			Persentase pengujian mutu produk perikanan (%)	20	20	20	20	100	21,25	14,83	16,33	20,75	128,84	107,0	80,0	81,7	103,8	128,9
3	Meningkatnya kesejahteraan	Nilai Tukar Nelayan		101,35	102,37	102,78	103,19	110,46	99,64	107,43	109,29	111,49	111,92	98,4	105,0	106,4	108,1	101,4

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4	5
	masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan																	
			Cakupan Bina Kelompok Nelayan	20,06	23,89	27,07	30,25	29	6,68	19,11	27,39	22,93	4,46	33,3	80,0	101,2	75,8	50,0
			Persentase Produksi Perikanan Kelompok Nelayan		25,61	26,79	27,17	30,62		18,11	29,43	34,69	0,18	-	70,8	109,9	127,7	-
	Meningkatnya kelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan		Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial	1,03	1,05	1,07	1,09	-	1,03	1,05	1,07	1,09	-	100	100	100	100	-
			Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	35,37	35,72	38,58	42,44	59,56	47,73	50,53	52,61	61,96	62,52	135	141	138	146	105
			Prosentase Penurunan tindakan IUU Fishing (%)		20,83	26,32	35,71	-	83,33	40,91	23,08	35,71	-		196,4	87,7	100	-
			Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan (%)	67,29	67,30	67,31	67,32	96,08	67,29	67,29	67,30	68,08		100	100	100	101,2	
		Persentase Kepatuhan Pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (%)		86,88	87,48	88,73	89,85	94,5		68,18	94,01	56,35			78,0	106,0	62,8	

**Capaian Kinerja Sasaran Strategis I. Meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah produksi dan produktivitas produksi**

**a. Kontribusi Subsektor Perikanan terhadap PDRB Sulsel**

Perkembangan pembangunan sektor kelautan dan perikanan Sulawesi Selatan dapat dilihat pada realisasi laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan melalui kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sumbangan komoditas unggulan produk perikanan. Pertumbuhan produksi setiap tahunnya merupakan sumbangan devisa Negara yang melalui ekspor yang mencapai 8,2 %, perkembangan pangsa pasar domestik yang mencapai 10% dan konsumsi ikan perkapita yang mencapai 4,9%. Laju pertumbuhan PDRB Sektor Perikanan terhadap PDRB Sulawesi Selatan dalam 5 tahun terakhir telah mencapai rata-rata 7,81 % terlihat pada pencapaian PDRB Perikanan setiap tahun seperti berikut :

**Tabel 2.12**  
**Kontribusi Subsektor Perikanan terhadap PDRB Sulsel Tahun 2020-2024**

Indikator	Kinerja per tahun				kinerja Awal (Base Line)
	2020	2021	2022	2023	2024
Target Kontribusi Subsektor Perikanan terhadap PDRB Sulsel (%)	4,2	4,6	5,1	5,6	10,5
Kontribusi Subsektor Perikanan terhadap PDRB Sulsel (%)	8,5	9,4	9,4	8,6	7,8
Capaian Kinerja (%)	202,4	204,3	184,3	153,6	74,3

**Grafik II.1**  
**Kontribusi Subsektor Perikanan terhadap PDRB Sulsel Tahun 2020-2024**



Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan II-2020 menjadi negatif (-5,32%). Sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan I-2020 tercatat mencapai 2,97% atau mulai menunjukkan adanya perlambatan. Berdasarkan data Sulsel mencatat perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan secara kumulatif sepanjang 2021 berhasil tumbuh positif mencapai 4,65 persen. Angka ini lebih baik dibandingkan 2020 yang mengalami kontraksi 0,71 persen. Sehingga dilakukan revisi target pada Renstra Perubahan 2018-2023 , namun ternyata tidak terlalu berdampak negatif pada subsektor perikanan hal ini dapat dilihat pada data yang telah diperoleh dari BPS. Berdasarkan data pada tabel tersebut di atas, kontribusi subsektor perikanan terhadap PDRB Sulsel mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Pada tahun 2020 sesuai press release yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi pada masa pandemik Covid-19 sehingga 2020 dilakukan revisi target .

#### b. Produksi perikanan

Produksi perikanan adalah perbandingan jumlah produksi ikan dengan target daerah dimana jumlah produksi ikan merupakan cakupan semua hasil penangkapan dan budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang ditangkap/dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan termasuk juga kegiatan pembenihan ikan.. **Tahun 2024 produksi perikanan Sulawesi Selatan mencapai 4,825,587.5 ton** dimana produksi tersebut mencakup produksi perikanan budidaya sebesar **4,314.231.1 ton** dan produksi perikanan tangkap sebesar **511,356.4 ton**. Kenaikan produksi perikanan didukung pada nilai produksi, dimana kontribusi produksi dari sektor perikanan **budidaya sebesar 89,4 %** dan **perikanan tangkap sebesar 10,6 %**. sehingga berdasarkan data BPS **kontribusi PDRB Perikanan terhadap PDRB Sulsel tahun 2024 berkontribusi sebesar 7,8 %** dan **Laju pertumbuhan PDRB Perikanan sebesar 5 %** dengan nilai PDRB Perikanan berdasarkan harga konstan sebesar **Rp. 30,58T** serta harga berlaku sebesar **53,9 T**.

**Tabel 2.13**  
**Produksi Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024**

Indikator	Satuan	Tahun				kinerja Awal (Base Line)
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Produksi Ikan	Ton	4,102,319.5	4,498,891.1	4,532,670.4	4,620,291.7	4,825,587.5
Target Daerah	Ton	4.092.881.4	4.342.259,8	4.546.138,0	4.759.871,9	4.779.259,3
Capaian IKK Produksi Perikanan	%	100,2	103,6	99,7	97,1	100,9

Sumber : Data Olahan

Produksi perikanan Sulawesi Selatan selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan fluktuatif, dimana produksi perikanan pada tahun **2020 sebesar 4,102,319.5 meningkat menjadi 4,498,891.1 ton pada tahun 2021, pada tahun 2022 produksi mengalami peningkatan sebesar 4,532,670.4 ton, pada tahun 2023 meningkat sebesar 4,620,291.7 ton dan pada tahun 2024 menjadi 4,825,587.5 ton**. Jika ditinjau dari capaian Indikator

Kinerja Kunci (IKK), angka capaian indikator belum mencapai target RPJMD hal ini disebabkan data proyeksi yang digunakan sebagai data *baseline* yaitu data tahun 2021 untuk menghitung trend rata-rata pertumbuhan dimana pada tahun tersebut produksi Perikanan mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

**Grafik II.2**  
**Produksi Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024**



Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024 (Data Diolah)

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa perkembangan produksi perikanan dari **tahun 2020 hingga 2024** mengalami trend positif dengan laju pertumbuhan produksi sebesar **4,2 %**, Komoditas yang dikembangkan adalah komoditas yang bertumpu pada potensi yang selama ini telah dimanfaatkan secara maksimal seperti Rumput Laut, Udang Windu dan Udang lainnya, Bandeng, Tuna Tongkol Cakalang dan komoditas ikan lainnya yang bernilai ekonomis tinggi. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan produksi perikanan di kabupaten/kota.

Dalam rangka peningkatan produksi perikanan maka didukung beberapa program pembangunan, pada tahun 2020 merupakan tahun masa pandemic Covid 19, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan melakukan upaya agar Produksi Kelautan dan Perikanan dapat meningkat dengan fokus pengembangan komoditas unggulan yaitu udang Windu melalui kegiatan diseminasi inovasi teknologi budidaya kepada pembudidaya sebagai upaya adaptasi terhadap pandemic dan kondisi lingkungan yang tidak mendukung dan pengembangan rumput laut serta melakukan pembinaan ke kabupaten/kota terkait pengembangan Perikanan budidaya air tawar dan payau, meningkatkan pembinaan kepada pembudidaya untuk menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), melakukan penataan kawasan perikanan budidaya melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur serta peningkatan kapasitas nelayan dan pembinaan mutu hasil tangkapan.

**Tabel 2.14**  
**Produksi Perikanan Menurut Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 - 2024**

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Produksi Perikanan (Ton)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Luwu	643,906.4	645,919.2	660,698.2	666,787.9	671,054.4
2	Luwu Utara	226,669.9	234,533.2	242,702.7	251,036.8	259,821.2
3	Wajo	545,172.7	559,220.4	567,029.4	570,446.8	575,221.7

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Produksi Perikanan (Ton)				
		2020	2021	2022	2023	2024
4	Bone	443,272.9	504,951.4	547,965.9	628,611.7	669,291.2
5	Sinjai	83,298.7	85,934.3	81,939.7	86,877.0	91,367.8
6	Bulukumba	252,835.1	282,750.3	251,280.6	270,411.0	280,504.1
7	Selayar	19,566.6	21,406.6	21,766.8	25,432.3	26,118.4
8	Bantaeng	92,554.2	92,831.7	95,757.7	96,804.7	99,871.2
9	Jeneponto	253,093.2	275,450.9	275,654.5	265,211.3	292,432.2
10	Takalar	431,941.1	607,971.0	609,555.8	627,742.9	648,162.9
11	Makassar	20,208.3	20,429.4	21,545.1	22,300.9	22,123.5
12	Maros	39,442.3	46,578.0	54,754.3	63,679.0	63,258.6
13	Pangkep	460,754.6	493,740.0	449,570.5	333,627.0	440,185.2
14	Barru	25,773.9	26,168.4	26,421.4	26,615.8	26,951.4
15	Parepare	3,066.3	4,740.8	4,763.2	4,784.7	4,005.4
16	Pinrang	77,294.2	79,916.4	82,630.6	85,250.5	85,188.8
17	Gowa	2,054.2	2,127.2	2,279.8	2,475.1	2,544.7
18	Luwu Timur	325,405.4	325,627.1	330,174.5	389,504.5	387,605.4
19	Palopo	145,142.2	176,897.4	194,333.0	193,147.3	169,122.2
20	Soppeng	3,394.1	4,043.7	4,079.4	3,123.2	3,252.9
21	Sidrap	1,775.1	3,425.6	3,463.1	3,296.9	3,822.1
22	Enrekang	689.2	1,870.4	1,883.0	1,022.2	1,151.8
23	Toraja		712.6	773.5	821.4	904.0
24	Toraja Utara	1,637.4	1,645.2	1,647.8	1,621	1,626.5
<b>Sulawesi Selatan</b>		<b>4,102,319.5</b>	<b>4,498,891.1</b>	<b>4,532,670.4</b>	<b>4,620,291.7</b>	<b>4,825,587.5</b>

Sumber : Data Statistik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022

Dari 24 kabupaten/Kota yang merupakan daerah produsen ikan di Sulawesi Selatan terdapat 5 Kabupaten penyumbang terbesar produksi ikan Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Luwu, Kabupaten Wajo, Kabupaten Bone, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Pangkep dengan sumber produksi dari hasil budidaya dan hasil tangkapan. Adapun komoditas unggulan yaitu rumput laut, udang, bandeng dan tuna. Kenaikan produksi rumput laut selama 5 tahun di Sulawesi Selatan sebesar 4 %. Pada tahun 2024. Kabupaten penghasil rumput laut di Sulawesi Selatan terbanyak pada tahun 2024 antara lain Kabupaten Luwu sebesar 636,144.4 ton, Kabupaten Takalar sebesar 619,864.6 ton, kabupaten Wajo 490,910.8 ton, dan Kabupaten Bone sebesar 435,739.0 ton. Sulawesi Selatan juga dikenal sebagai penghasil udang terutama jenis udang Vannamei dan udang windu. Selama 5 tahun terakhir kenaikan produksi udang di Sulawesi Selatan sebesar 7,8 %. Pada tahun 2024 Kabupaten penghasil udang di Sulawesi Selatan antara lain kabupaten Bone sebesar 18,462.6 Ton, Kabupaten Pinrang sebesar 13,932.0 ton, Kabupaten Wajo sebesar 9,009.1 ton, Kabupaten Barru sebesar 4,425.9 ton, dan kabupaten Pangkep sebesar 3,992.1 Ton. Selain itu, Bandeng merupakan salah satu komoditi unggulan sektor perikanan budidaya, dimana kenaikan rata-rata selama 5 tahun terakhir sebesar 0,7 %. Pada tahun 2024 Kabupaten penghasil Bandeng di Sulawesi Selatan antara lain Kabupaten Bone sebesar 100,459 Ton, Kabupaten Wajo sebesar 16,832.1 ton, Kabupaten Pangkep sebesar 15,514.9 Ton, kabupaten Luwu Timur sebesar 14,302.8 ton, kabupaten Luwu sebesar 11,865.6 Ton. Komoditas tuna dan Cakalang adalah komoditas yang berbasis pada usaha penangkapan sehingga produksi komoditas ini sepenuhnya tergantung pada tingkat upaya (effort) yang dilakukan oleh nelayan dan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang penangkapan ikan. Melalui kebijakan pengembangan sarana dan prasarana penangkapan serta

peningkatan mutu hasil tangkapan, komoditas Tuna, Tongkol dan Cakalang (TTC), capaian produksi dapat dioptimalkan memberikan kontribusi nilai yang lebih baik dengan peningkatan jumlah produksi yang memiliki grade lebih tinggi pada pasar ekspor maupun lokal. Dari sisi produksi, capaian hasil komoditas Tuna, Tongkol dan Cakalang (TTC) telah terjadi kenaikan rata-rata selama 5 tahun **sebesar 7,9 %**.

## Capaian Kinerja Sasaran Strategis II. Meningkatnya Konsumsi Ikan

### a. Konsumsi Ikan

Persentase konsumsi ikan diperoleh dari jumlah konsumsi ikan dibanding target daerah. Persentase konsumsi ikan pada tahun 2020 mengalami peningkatan hingga tahun 2024. Hal ini dimungkinkan karena Sulawesi Selatan memiliki masyarakat yang cukup tinggi dalam konsumsi ikan. Hal ini menggambarkan bahwa produk perikanan untuk dikonsumsi tersedia dan cukup baik yang berasal dari kegiatan penangkapan ikan maupun budidaya. Peningkatan capaian rata-rata konsumsi ikan perkapita Sulawesi Selatan tersebut juga menggambarkan bahwa pelaksanaan kebijakan Sumber Pangan dari Laut dan kampanye Gemar Makan Ikan memberikan hasil yang signifikan. Berikut tabel data capaian konsumsi ikan selama 5 tahun terakhir.

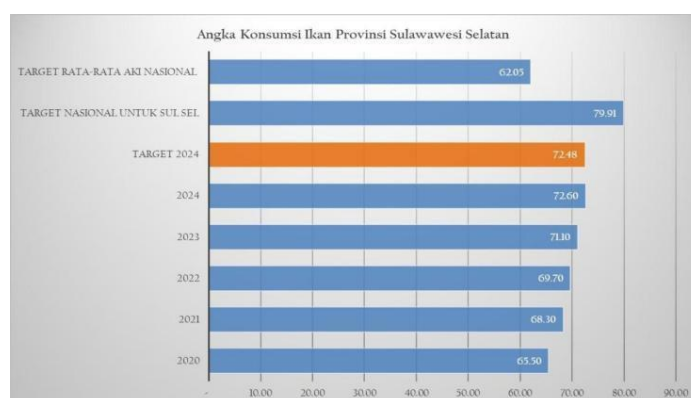
**Tabel 2.15**  
**Konsumsi Ikan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Konsumsi Ikan	Kg/kap	65.5	68.3	69.7	71.1	72.6
Target Daerah	Kg/kap	55	55,9	62,7	65,90	72,48
Capaian IKK Konsumsi Ikan	%	119,1	122,2	111,2	107,9	100,2

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

Dalam periode 2020-2024 telah terjadi kenaikan konsumsi ikan dengan capaian rata-rata 2,6 % pertahun, dimana pada tahun 2020 sebesar 65,5 kg/kap , meningkat menjadi 68,3 kg/kap pada tahun 2021, kemudian meningkat menjadi 69,7 kg/kap pada tahun 2022, selanjutnya pada tahun 2023 meningkat menjadi 71.1 kg/kap dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 72.6 kap/kap.

**Grafik II.2**  
**Konsumsi Ikan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 - 2024**



Dari grafik diatas memperlihatkan peningkatan konsumsi ikan dari tahun 2020 sampai tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 2,6 % hal ini menandakan perubahan pola konsumsi masyarakat Sulawesi Selatan terhadap sumber pangan ikan. Namun ditahun 2025, dengan adanya program prioritas nasional Makanan Bergizi Gratis (MBG) sehingga indikator Angka Konsumsi Protein Ikan sudah mulai dimasukkan dalam indikator keberhasilan program hal ini sejalan dengan perhitungan Indeks Ekonomi Biru.

### Capaian Kinerja Sasaran Strategis III. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan

#### a. Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan nelayan tangkap di laut, dengan mengukur kemampuan tukar hasil tangkapan dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan nelayan, baik untuk proses usaha penangkapan di laut maupun untuk konsumsi rumah tangga. Jika NTN periode tertentu lebih besar dari 100 berarti kondisi nelayan pada periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan periode tahun dasar dan sebaliknya jika NTN lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli nelayan.

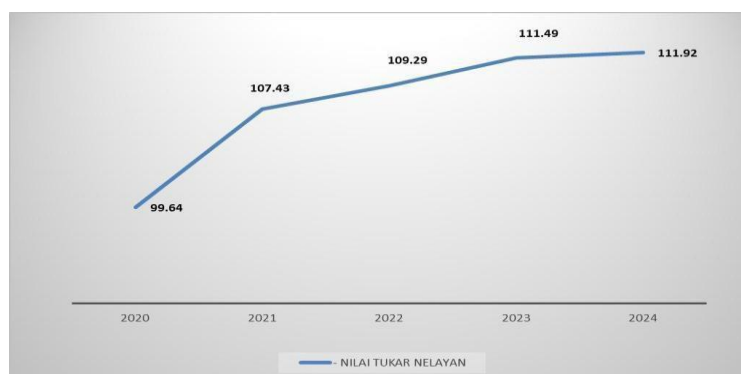
**Tabel 2.16**  
**Nilai Tukar Nelayan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024**

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks yang Diterima Nelayan	104.30	113.84	119.55	128.09	131.82
Indeks yang Dibayar Nelayan	104.67	105.97	109.40	114.88	117.78
Capaian IKK Nilai Tukar Nelayan	99,6	107,4	109,3	111.49	111.92

Sumber : Data olahan

Berdasarkan tabel diatas nilai tukar nelayan pada tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 3 %. Hal ini terjadi karena kenaikan indeks yang diterima Nelayan (it) lebih besar dibandingkan kenaikan pada indeks yang dibayar Nelayani (ib). Indeks yang diterima Nelayan (it) mengalami kenaikan **sebesar 6,1 persen**, sedangkan Indeks yang dibayar Nelayan (ib) mengalami kenaikan **sebesar 3 persen**.

**Grafik II.7**  
**Nilai Tukar Nelayan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 - 2024**



Dari grafik memperlihatkan pencapaian indeks NTN tahun 2020 sampai tahun 2024 dipengaruhi oleh tingkat produktivitas nelayan dan harga pasar. Rendahnya NTN di tahun tahun 2020 akibat cuaca ekstrim dan pandemik Covid-19. Indeks NTN digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan secara relatif dan merupakan ukuran kemampuan keluarga nelayan dan pembudidaya ikan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan keluarga nelayan dan pembudidaya ikan telah memenuhi kebutuhan keluarganya. Kesejahteraan tersebut dapat meningkat jika aksesibilitas nelayan dapat terpenuhi dan lancar dalam memenuhi kebutuhannya sehingga intervensi pemerintah provinsi Sulawesi Selatan pada kinerja ini adalah dalam mewujudkan ekonomi biru, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan memberikan penguatan peningkatan kapasitas nelayan melalui restrukturisasi armada kapal perikanan yang dilengkapi dengan system GPS agar dapat memantau aktivitas penangkapan ikan di WPP 713 dan alat tangkap yang ramah lingkungan.

#### **Capaian Kinerja Sasaran Strategis IV. Meningkatnya Kelestarian dan Pengendalian pemanfaatan Sumberdaya alam kelautan dan perikanan**

##### **a. Cakupan luas kawasan konservasi yang dikelola**

Kawasan Konservasi Perairan adalah Kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan system zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara Berkelanjutan. Penghitungan realisasi dilakukan dengan **menjumlahkan total luas kawasan konservasi yang telah /proses SK Menteri Kelautan dan Perikanan**. Indikator ini mendukung program utama sektor kelautan dan perikanan yang berbasis pada **Ekonomi Biru atau Pengelolaan laut yang berkelanjutan** dimana perluasan kawasan konservasi bertujuan untuk melestarikan keanekaragaman hayati, menjaga ekosistem pesisir dan laut, mencegah degradasi lingkungan, serta meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat pesisir.

Pengelolaan kawasan konservasi berdasarkan kewenangan Provinsi Sulawesi Selatan seluas 849.969.66 Ha dengan ditetapkannya 13 Kawasan konservasi sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2022 yaitu KKP3K Lanyukang, KKP3K Pulau Sembilan, KKP3K Kepulauan Tanakeke, KKP3K Pulau Pannikiang, KKP3K Liukang Tangaya, KKM Pembuatan Kapal Phinisi, KKPD Teluk Bone, KKPD Bilongka, KKPD Liukang Tuppabiring, KKPD Pulau Pasi Gusung, KKPD Kauna Kayuadi, KKPD Tanalili dan KKPD Malili kemudian rehabilitasi wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil. Pencapaian luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan akan meningkat drastis dengan penetapan teluk Bone sebagai Kawasan Konservasi melalui SK Menteri Kelautan dan Perikanan yang saat masih berproses. Upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan secara berkelanjutan pada tingkat ekosistem, jenis dan genetik termasuk penguatan fungsi otoritas pengelolaan konservasi sumberdaya ekosistem dan habitat laut. Indikator ini didukung oleh Program Pengawasan, konservasi, penataan dan rehabilitasi pesisir dan laut melalui kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi WP3K Prov. Sulsel, Penyusunan Regulasi Pengelolaan kawasan Konservasi dan Penataan Ruang Laut, pesisir dan Pulau - Pulau Kecil dan Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan Ekosistem Perikanan Wilayah Bosowasi, Ajatappareng, Mamminasata, Luwu Raya, Pangkep Kepulauan, Kepulauan Selayar dan Wilayah Selatan.

**Tabel 2.17**  
**Cakupan Luas Kawasan Konservasi yang dikelola**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024**

Uraian	Tahun				2024		
	2020	2021	2022	2023	Realisasi	Target	Capaian
Luas Kawasan Konservasi yang telah SK Menteri	*	*	569.269,6	569.269,6	578.435,53	816.593,3	70,83
Daerah Perlindungan Laut (DPL)	*	*	223,57	296,73	306,96	357,89	85,77
Total Luas Kawasan Konservasi sesuai Perda (Ha)	*	*	849.969,66	849.969,66	849.969,66	*	*
Cakupan luas kawasan konservasi perairan daerah yang dikelola (%)	*	*	67,0	67,01	68,09	96,08	70,84

Sumber Data : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 2025

Selain itu upaya yang dilakukan adalah rehabilitasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang terdegradasi dilakukan upaya rehabilitasi melalui rehabilitasi mangrove sebagai daerah perlindungan laut (DPL) dimana tahun 2024 telah dilakukan rehabilitasi mangrove sekitar 332.435 batang dengan luas 10,23 Ha. Daerah Perlindungan Laut (DPL) adalah kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang eksositemnya rusak yang Pulih kembali karena dilakukan rehabilitasi ekosistem.

**b. Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman**

Dalam kerangka menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan pada pembangunan nasional, proporsi tangkapan ikan harus dipertahankan untuk berada dalam batasan biologis yang aman.

**Tabel 2.18**  
**Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada Dalam Biologis Yang Aman**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 - 2024**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
JumlahTangkapan Ikan	Ton	389,208.2	417,410.7	436,735.7	504,735.7	511,356.4
80% dari Tangkapan Maksimum Lestari	Ton	743,776	743,776	743,776	743,776	743,776
Capaian	%	52,33	56,12	58,7	67,9	68,8

Sumber : Data Primer Hasil Olahan

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2020, jumlah tangkapan ikan mengalami rata-rata pertumbuhan sampai tahun 2024 sebesar 7,2 % dan mengalami penurunan 0,11% pada tahun 2020 karena dampak pandemik Covid-19 . Potensi lestari (Maximum Sustainable Yield/MSY) sumber daya perikanan tangkap untuk nasional diperkirakan 6,4 juta ton per tahun dan untuk propinsi Sulawesi Selatan dengan potensi 929,7 ribu ton per tahun, sedangkan potensi yang dapat dimanfaatkan (Total Allowable Catch/jumlah tangkapan yang diperbolehkan/JTB) adalah 80 persen dari MSY atau sebesar 5,12 juta ton untuk nasional dan untuk propinsi sebesar 743,8 ribu ton per tahun. Jumlah total hasil tangkapan ikan dari laut adalah penjumlahan dari produksi ikan dari seluruh kabupaten/kota. Data MSY ini diperoleh dari Komisi Nasional Pengkajian Ikan sehingga batasan biologis berada pada

kategori aman dimana proporsi tangkapan ikan provinsi Sulawesi Selatan masih < 743,8 ribu ton per tahun.

**Grafik II.5**  
**Proporsi Tangkapan Ikan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 - 2024**



Dari grafik diatas menunjukkan proporsi tangkapan ikan terus meningkat seiring dengan peningkatan produksi penangkapan. Walaupun proporsi tersebut mengalami kenaikan, namun masih dapat dikendalikan atau tidak melebihi 100 persen dari jumlah tangkapan yang diperbolehkan (Total Allowable Catch/TAC). Manfaat Indikator ini digunakan untuk memantau kelestarian sumberdaya ikan dan kelangsungan usaha penangkapan ikan. Indikator ini didukung Program Pengawasan, konservasi, penataan dan rehabilitasi pesisir dan laut melalui kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, Pengawasan IUU Fishing dan pemantauan kapal perikanan, dan Pengawasan Terpadu SDKP.

**c. Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan**

Kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan adalah kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan oleh para pelaku usaha kelautan dan perikanan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan.

**Tabel 2.19**  
**Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 - 2024**

Indikator Kinerja	Realisasi tahun				Tahun 2024			Akhir RPJMD	
	2020	2021	2022	2023	Realisasi	Target	Capaian	Target	Capaian
Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	63,07	69,18	94,01	56,35	48,97	97,80	50,07	100	48,97

Ketidakpatuhan pelaku usaha didominasi pemenuhan dokumen perizinan tidak ada/tidak lengkap/masa berlaku habis pelaku usaha belum memahami pemenuhan standar/aturan berusaha sesuai aturan yang berlaku, beralihnya proses perizinan yaitu melalui OSS dan tidak adanya aksesibilitas untuk mengurus perizinan. Sesuai dengan PP no 5 tahun 2021 Pasal 6 ayat 2 perizinan usaha berdasarkan risiko diberlakukan untuk 16 bidang usaha termasuk kelautan dan perikanan. Diperlukan strategi untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha atas peralihan pengurusan dokumen perizinan yaitu dilaksanakan fasilitasi Nomor Induk Berusaha Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk memberikan informasi, sosialisasi pemenuhan dokumen kapal, membantu nelayan mengakses pelayanan melalui Gerai Perizinan yang ada di Pelabuhan Perikanan nelayan dan pembinaan kepada pelaku usaha yang masih baru dengan melibatkan penyuluh setenpat untuk pemenuhan standar /aturan berusaha sesuai aturan yang berlaku.

Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha (perdirjenPSDKP nomor 21 tahun 2021). Tahun 2024 jumlah pelaku usaha yang diperiksa sebanyak 748 pelaku usaha dengan 536 diantaranya merupakan pelaku usaha yang patuh. Terdiri dari 6 komponen pelaku usaha yaitu 1) pelaku usaha pemanfaat ruang laut, 2) pelaku usaha perikanan tangkap 12 mil, 3) pelaku usaha pembudidaya laut, 4) pelaku usaha perikanan tangkap di PUD, 5) pelaku usaha pembudidaya di PUD dan 6) pelaku usaha pemasaran dan pengolahan.

### Capaian Kinerja Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini diarahkan pada optimalisasi pengembangan usaha perikanan tangkap berkelanjutan meliputi inovasi dan pengembangan teknologi penangkapan ikan ramah lingkungan, pendalaman pengetahuan dan pemahaman terhadap cara penanganan ikan di atas kapal dan peningkatan kapasitas nelayan. Adapun data kinerja selama tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.20**  
**Kinerja Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Tahun 2020 - 2024 mendukung sasaran meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah produksi dan produktivitas produksi**

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target produksi perikanan tangkap (ton)	389,052.40	396,992.30	404.932,2	413.030,8	442.959.6
Realisasi produksi perikanan tangkap (ton)	389,208.2	417.410,7	436.749,6	<b>504,705.3</b>	<b>511,356.4</b>
Capaian Kinerja (%)	<b>100.04</b>	<b>105.14</b>	<b>107,86</b>	<b>122,2</b>	<b>115,4</b>
Target Nilai Hilirisasi Produksi Perikanan Tangkap (Rp.M)	<b>8,675.44</b>	<b>8,852.48</b>	<b>9.029.52</b>	<b>9.210,12</b>	<b>11,933.56</b>
Realisasi Nilai Hilirisasi Produksi Perikanan Tangkap (Rp.M)	<b>8,678.9</b>	<b>10,679,9</b>	<b>11.812,9</b>	<b>13,795.8</b>	<b>13,836.3</b>
Capaian Kinerja (%)	<b>100.04</b>	<b>120.64</b>	<b>130,83</b>	<b>149.78</b>	<b>115.94</b>

Sumber : Data olahan \*) Data KKP

Produksi Perikanan Tangkap Provinsi Sulawesi Selatan selama 5 tahun mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar **7,2%**, dimana produksi perikanan tangkap pada tahun 2020 sebesar **366,540.6 ton** meningkat pada tahun 2021 menjadi **417,410.7 ton**, dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi sebesar **436,735.7 ton** pada tahun 2023 meningkat sebesar 504,705.3 ton dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 511,356.4 ton.

Pelabuhan memenuhi standar operasional jika memenuhi minimal 3 standar operasional yang dipersyaratkan antara lain yaitu telah operasional, penetapan kelas oleh kementerian, memiliki kelembagaan, memiliki syahbandar atau petugas kesyahbandaran, menyusun wkopp dan menerapkan CPIB. Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 19 pelabuhan perikanan dengan yang memenuhi standar operasional sebanyak 17 pelabuhan.

Gambar 2.

Daftar Pelabuhan Perikanan yang Memenuhi Standar Operasional tahun 2024

NO	NAMA PELABUHAN PERIKANAN	KABUPATEN/KOTA	PELABUHAN PERIKANAN MEMENUHI STANDAR OPERASIONAL SESUAI IKK LPPD PERMENDAGRI 28 TAHUN 2020					
			Telah operasional	Penetapan kelas oleh MKP	Memiliki Kelembagaan	Memiliki syahbandar atau petugas kesyahbandaran	Menyusun WKOPP	Menerapkan CPIB
<b>PELABUHAN WILAYAH II</b>								
1	Pelabuhan Perikanan Paotere	Kota Makassar	√	X	√	√	X	X
2	Pelabuhan Perikanan Lappa	Kab. Sinjai	√	X	√	√	X	X
3	Pelabuhan Perikanan Kajang	Kab. Bulukumba	√	X	√	√	X	X
4	Pelabuhan Perikanan Bontobahari	Kab. Bulukumba	√	X	√	√	X	X
5	Pelabuhan Perikanan Birea	Kab. Bantaeng	√	√	√	√	X	X
6	Pelabuhan Perikanan Tanrusampe	Kab. Jeneponto	√	X	√	X	X	X
7	Pelabuhan Perikanan Beba	Kab. Takalar	√	X	√	√	X	X
8	Pelabuhan Perikanan Benteng Somba Opu	Kab. Gowa	√	X	√	√	X	X
9	Pelabuhan Perikanan Bonehalang	Kab. Kep. Selayar	√	√	√	√	X	X
<b>PELABUHAN WILAYAH I</b>								
1	Pelabuhan Perikanan Bontobahari	Kab. Maros	√	X	√	√	X	X
2	Pelabuhan Perikanan Maccini Baji	Kab. Pangkep	√	X	√	√	X	X
3	Pelabuhan Perikanan Polejiwa	Kab. Barru	X	X	√	X	X	X
4	Pelabuhan Perikanan Sumpang Binangae	Kab. Barru	√	X	√	√	X	X
5	Pelabuhan Perikanan Cempae	Kota Pare-pare	√	X	√	√	X	X
6	Pelabuhan Perikanan Lonrae	Kab. Bone	√	X	√	√	X	X
7	Pelabuhan Perikanan Ulo-Ulo	Kab. Luwu	√	X	√	√	X	X
8	Pelabuhan Perikanan Balambang	Kab. Luwu	√	X	√	√	X	X
9	Pelabuhan Perikanan Pontap	Kota Palopo	√	X	√	√	X	X
10	Pelabuhan Perikanan Lero	Kab. Pinrang	√	X	√	√	X	X

Cakupan Bina Kelompok Nelayan merupakan indikator yang didapatkan dari jumlah Kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan dibandingkan jumlah kelompok nelayan di daerah. Selama 5 tahun terakhir sekitar 465 kelompok dengan jenis bantuan sarana dan prasarana alat tangkap sesuai permohonan proposal yang diajukan oleh kelompok. Berikut data cakupan bina kelompok nelayan selama 5 tahun terakhir.

Tabel 2.21  
Cakupan Bina Kelompok Nelayan  
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024

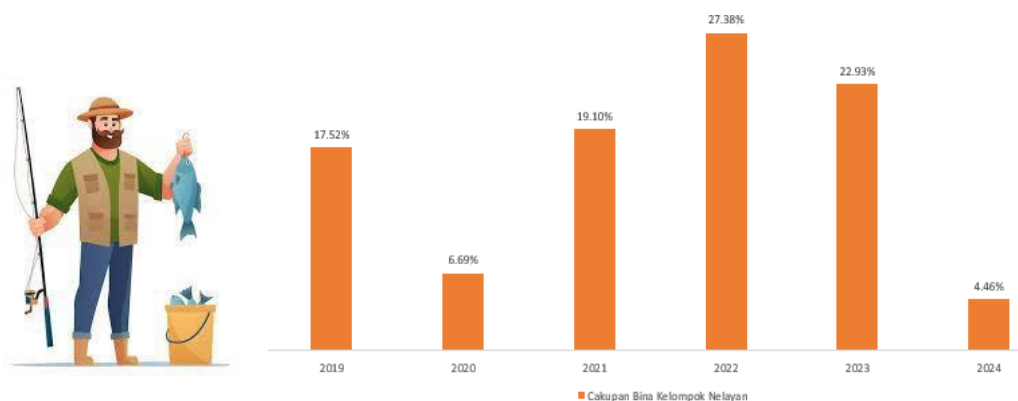
Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kelompok Nelayan yang Mendapatkan Bantuan Pemda Tahun n	Klp	21	60	86	72	14
Jumlah Kelompok Nelayan	Klp	314	314	314	314	314

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Capaian IKK Cakupan Bina Kelompok Nelayan	%	6,68	19,11	27,39	22,93	4,45

Sumber : Data olahan

Tahun 2020 kelompok yang mendapatkan bantuan sebanyak 21 kelompok , tahun 2021 yaitu sebanyak 60 kelompok. Kemudian di tahun 2022 kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan sebanyak 86 kelompok, tahun 2023 sebanyak 72 kelompok dan tahun 2024 kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan sebanyak 14 Kelompok. Cakupan bina kelompok nelayan diarahkan untuk kontribusi terhadap ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan. Tidak tercapainya target indikator disebabkan karena adanya pembagian urusan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota yang termuat dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 bahwa bantuan sarana prasarana penangkapan ikan dibawah kapal 5 GT adalah kewenangan kabupaten/Kota sehingga tahun 2017 – 2019 pembinaan nelayan focus pada usaha nelayan skala menengah keatas (nelayan yang memiliki kapal 5 – 30 GT). Berdasarkan verifikasi dan identifikasi data kelompok nelayan bahwa jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan harus memenuhi persyaratan kelompok sesuai peraturan yang ditetapkan dan masih banyak kelompok yang belum memenuhi persyaratan tersebut sehingga diperlukan koordinasi dan pendampingan dari penyuluh perikanan untuk peningkatan pembinaan dan penguatan kelembagaan kelompok secara optimal. Keberadaan penyuluh saat ini yang berada dalam kewenangan pemerintah pusat (Kementerian Kelautan dan Perikanan RI) sehingga perlunya peningkatan koordinasi dan sinergitas kegiatan dalam pembinaan kelompok nelayan. Untuk keberhasilan indikator ini maka didukung oleh program Hilirisasi Perikanan dan Peningkatan Produksi Kelautan dan Perikanan melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas Nelayan, Koordinasi pengelolaan perikanan tangkap, Identifikasi Dan Monitoring Penerapan LogBook Kapal Perikanan dan Data Keragaan Kapal Perikanan.

**Grafik II.3**  
**Cakupan Bina Kelompok Nelayan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 -2024**



Dari grafik menunjukkan angka fluktuatif pada indikator Cakupan Bina Kelompok Nelayan pada tahun 2020 - 2024 dimana saat itu terjadi penurunan bantuan pada tahun 2020 dampak dari pandemic Covid-19, upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu peningkatan kapasitas nelayan pada tahun 2021-2022 dengan kelompok yang mendapatkan bantuan pemerintah untuk pemulihan ekonomi pasca pandemic Covid-19, kemudian mengalami penurunan 2023 dan 2024 karena efisiensi belanja APBD fokus pembayaran hutang. Upaya tersebut untuk melakukan fungsi fasilitasi, pembinaan dan penguatan kelembagaan kelompok nelayan agar dapat memenuhi persyaratan mendapatkan bantuan.

Produksi Perikanan Kelompok Nelayan merupakan indikator yang didapatkan dari jumlah produksi ikan kontribusi hasil kelompok nelayan dibandingkan jumlah produksi ikan di daerah. Dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan tangkap pemerintah provinsi telah memberikan bantuan sarana dan prasarana bagi kelompok nelayan. Produksi kontribusi hasil kelompok nelayan didapatkan berdasarkan data kelompok yang menerima bantuan pemerintah provinsi berdasarkan usulan yang diajukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah kab/kota dan pemangku kepentingan.

**Tabel 2.22**  
**Produksi Perikanan Kelompok Nelayan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 -2024**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Produksi Ikan Hasil Kelompok Nelayan	Ton	50,168.9	75,593.1	128,400	175,083.55	953,63
Jumlah Produksi Ikan di Daerah	Ton	389,208.2	417,410.7	436,735.7	504,705.3	511,356.4
Capaian IKK Kontribusi Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	%	12,89	18,11	29,43	34,69	0,19

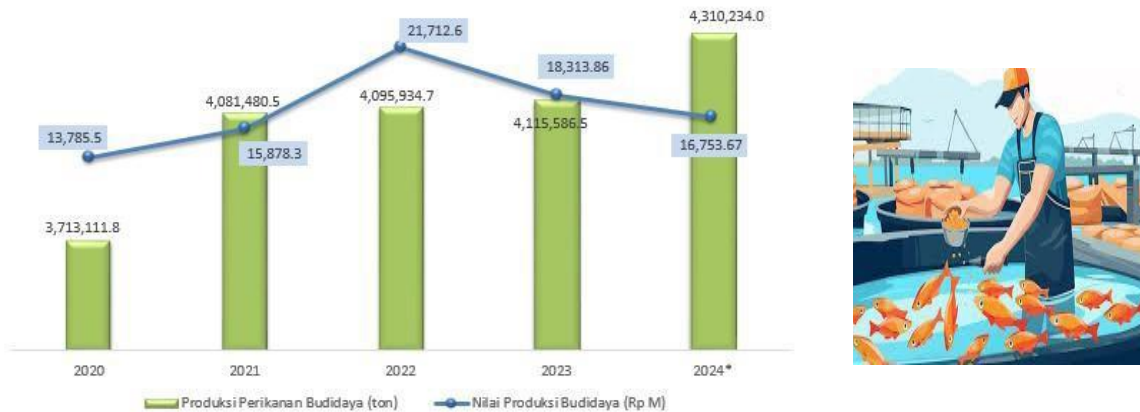
Sumber : Data olahan

Jumlah produksi ikan kontribusi hasil kelompok nelayan selama 5 tahun terakhir mengalami penurunan dari tahun pada tahun 2020 sekitar 70% dari tahun 2019 disebabkan adanya pandemic global Covid-19. Rata-rata kelompok nelayan yang menerima bantuan adalah nelayan skala kecil namun terjadi refocusing anggaran untuk penanganan pandemic Covid-19 dan fokus pemabayaran hutang tahun 2024 sehingga bantuan sarana ke kelompok nelayan terbatas. Oleh karena itu perlu diupayakan pembinaan kepada kelompok nelayan secara optimal dengan melakukan koordinasi dengan Penyuluh perikanan kemudian pendataan produksi kelompok nelayan dilakukan secara efektif dan berkala.

### **Capaian KinerJa Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**

Program ini diarahkan pada optimalisasi pengembangan usaha perikanan budidaya yang berkelanjutan meliputi inovasi dan pengembangan teknologi budidaya ikan ramah lingkungan, pendalaman pengetahuan dan pemahaman terhadap cara budidaya ikan dengan baik dan peningkatan kapasitas pembudidaya. Adapun data kinerja selama tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

**Grafik II.8**  
**Kinerja Produksi dan nilai produksi perikanan budidaya Tahun 2020 - 2024**



Produksi Perikanan Budidaya Provinsi Sulawesi Selatan selama 5 tahun mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar **3,9 %**, dimana produksi perikanan budidaya **pada tahun 2020 sebesar 3,713,111.3 ton, selanjutnya pada tahun 2021 meningkat menjadi 4,081,480.5 ton, pada tahun 2022 produksi mengalami kenaikan menjadi 4,095,934.7 ton, pada tahun 2023 produksi Perikanan budidaya mengalami peningkatan menjadi 4,115,586.5 dan tahun 2024 meningkat menjadi 4,314,231.1 ton.**

**Produksi Rumput Laut Menurut Kabupaten/Kota**

Produksi rumput laut Provinsi Sulawesi Selatan selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan fluktuatif, dimana produksi rumput laut pada tahun 2020 sebesar 3,441,138.7 ton meningkat sebesar 3,786,411.7 ton pada tahun 2021, selanjutnya pada tahun 2022 meningkat menjadi 3,796,733.3 ton, pada tahun 2023 produksi menjadi 3,844,803.4 ton dan pada tahun 2024 produksi perikanan budidaya rumput laut mengalami peningkatan menjadi 4,018,692.1 ton atau naik 4,02 %.

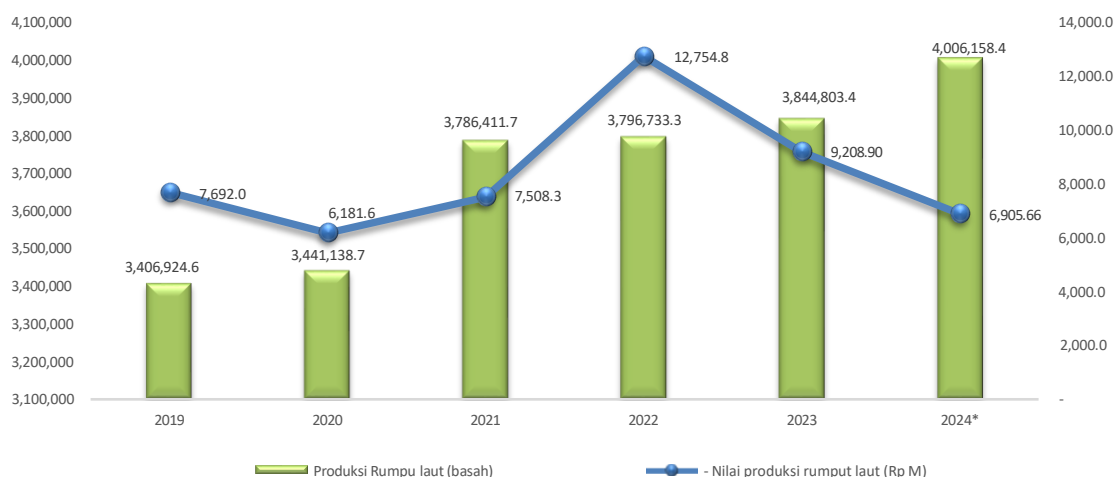
**Tabel 2.23**  
**Produksi Rumput Laut Menurut Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 - 2024**

No.	Kab/Kota	Jumlah Produksi Rumput Laut (Ton)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Luwu	612,532.2	614,258.4	627,984.2	632,932.7	636,144.4
2	Luwu Utara	213,848.7	221,207.8	228,950.1	236,825.3	245,114.7
3	Wajo	476,078.9	479,632.2	483,088.6	486,990.9	490,910.8
4	Bone	301,871.2	337,592.2	366,491.0	416,364.0	435,739.0
5	Sinjai	45,976.4	47,823.8	43,400.5	46,969.7	51,901.0
6	Bulukumba	192,250.4	221,980.9	189,854.1	208,818.2	215,341.9
7	Selayar	642.1	359.1	381.4	315.6	349.4
8	Bantaeng	86,284.6	86,313.0	89,164.7	89,955.9	92,683.4
9	Jeneponto	231,754.4	253,389.9	252,795.5	241,609.6	268,312.4
10	Takalar	409,117.3	587,061.0	593,395.5	601,553.2	619,864.6
11	Makassar	-	-	-	-	-
12	Maros	12,360.5	12,870.0	14,150.0	15,827.0	16,581

No.	Kab/Kota	Jumlah Produksi Rumput Laut (Ton)				
		2020	2021	2022	2023	2024
13	Pangkep	420,952.0	450,011.0	407,330.0	295,865.0	394,900.0
14	Barru	680.0	667.7	949.9	1,206.0	1,197.7
15	Pare-Pare	-	-	7.9	9.6	26.4
16	Pinrang	14,243.7	19,399.1	23,641.4	36,170.7	40,549.3
17	Gowa	102.0	20.0	-	-	-
18	Luwu Timur	298,712.0	296,267.1	299,808.5	359,531.4	357,881.8
19	Palopo	123,732.4	157,558.4	175,340.0	173,858.4	151,194.2
20	Sidrap	-	-	-	-	-
21	Enrekang	-	-	-	-	-
22	Soppeng	-	-	-	-	-
23	Tana Toraja	-	-	-	-	-
24	Toraja Utara	-	-	-	-	-
<b>Sulawesi Selatan</b>		<b>3,441,138.7</b>	<b>3,786,411.7</b>	<b>3,796,733.3</b>	<b>3,844,803.4</b>	<b>4,018,692.1</b>

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024

**Grafik II.9**  
Perkembangan Capaian Produksi dan Nilai Produksi Budidaya Rumput Laut di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 – 2024



### Produksi Udang Menurut Kabupaten/Kota

Produksi udang di Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2020 – 2024 mengalami peningkatan sebesar 7,8 %. Produksi udang pada tahun 2020 sebesar 50,876.1 ton meningkat sebesar 54,974.6 ton pada tahun 2021, pada tahun 2022 meningkat menjadi 61,446.2 ton, pada tahun 2023 produksi meningkat menjadi 67,295.3 ton dan pada tahun 2024 produksi perikanan udang menjadi 68,577.5 ton.

**Tabel 2.24**  
Produksi Udang Menurut Kabupaten/Kota  
Di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020-2024

No.	Kab/Kota	Jumlah Produksi Udang (Ton)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Luwu	3,455.3	3,452.0	3,274.9	3,141.9	3,231.5
2	Luwu Utara	1,449.1	1,611.8	1,668.2	1,726.5	1,786.9

No.	Kab/Kota	Jumlah Produksi Udang (Ton)				
		2020	2021	2022	2023	2024
3	Wajo	1,632.5	2,405.1	8,718.9	11,111.5	9,009.1
4	Bone	5,359.5	8,561.8	9,997.5	15,872.0	18,462.6
5	Sinjai	130.2	36.5	76.0	91.2	78.4
6	Bulukumba	4,300.5	4,280.1	3,714.0	3,751.4	3,797.8
7	Selayar	50.0	50.9	81.5	55.3	57
8	Bantaeng	35.2	41.7	41.2	36.6	31.2
9	Jeneponto	1,933.8	1,286.2	1,464.3	1,848.0	983.1
10	Takalar	1,550.2	1,232.2	1,350.0	1,036.6	1,517.0
11	Makassar	319.7	199.5	84.3	17.4	24.2
12	Maros	3,424.8	3,395.2	3,415.1	3,376.1	3,480.7
13	Pangkep	3,470.0	3,952.7	3,358.5	2,371.0	3,992.1
14	Barru	4,745.5	4,858.2	4,708.6	4,402.3	4,425.9
15	Pare-Pare	13.4	18.5	12.0	17.5	20.0
16	Pinrang	15,431.2	15,708.8	15,726.9	14,701.3	13,932.0
17	Gowa	120.4	110.6	123.2	139.2	137.8
18	Luwu Timur	3,175.5	3,485.5	3,427.8	3,391.0	3,358.4
19	Palopo	279.2	287.2	203.5	208.5	251.7
Sulawesi Selatan		50,876.1	54,974.6	61,446.2	67,295.3	68,577.5

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024

### Capaian Kinerja Program Pengelolaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Program ini diarahkan pada pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan program ini berinisiasi untuk melakukan harmonisasi dan sinergi sesuai kewenangan yang telah diatur dalam UU nomor 23 tahun 2014. Pada program ini dilaksanakan dengan intervensi program ke wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan menyediakan sarana dan prasarana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terutama pada pengembangan usaha garam dan sarana prasarana pendukung produksi perikanan. Adapun kinerja pemerintah dalam melaksanakan program ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.25

Kinerja Program Pengelolaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2020-2024 mendukung sasaran meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah produksi dan produktivitas produksi

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target Produksi Garam (ton)	45.846	46.500	47.500	48.450	5.000
Realisasi Produksi Garam (ton)	45.310,5	4.842,02*	6.506,75*	114,959.9	48,018.5
Capaian Kinerja Produksi Garam (%)	98.8	10,4	13,7	237,3	960,4
Target Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung produksi	15,22	37,5	68,75	100	56,69

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
perikanan (%)					
Realisasi Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung produksi perikanan (%)	7,27	9,09	33,33	50,51	54,21
Capaian Kinerja (%)	21,7	64,43	66,81	50,51	95,28

Sumber : Data olahan, \*) Data KKP

Pada tabel dapat dilihat bahwa produksi garam mengalami penurunan dari tahun 2021 sampai tahun 2022 hal ini disebabkan adanya perubahan iklim pada bulan produksi. Curah hujan yang cukup tinggi mengakibatkan gagal produksi pada tambak di 5 kabupaten (Jeneponto, Takalar, Selayar, Maros dan Pangkep). Sehingga performance pada indikator kinerja program ini sangat kurang pada tahun 2021, 2022 dan 2024, oleh karena itu dibutuhkan upaya perbaikan dalam mencapai kinerja. Demikian juga halnya pada indikator kinerja cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung produksi perikanan mengalami peningkatan kinerja. Kemudian untuk mendukung sasaran meningkatnya kelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan, maka program ini melaksanakan indikator kinerja yaitu :

**Tabel 2.26**

**Kinerja Program Pengelolaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2020 - 2024 mendukung sasaran meningkatnya kelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan**

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan (%)	-	67,29	67,30	67,31	96,3
Realisasi Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan (%)	-	67,29	67,29	67,30	68,09
Capaian Kinerja (%)	-	100	99,98	99,98	70.84

Sumber : Data olahan

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa berdasarkan arah kebijakan terkait perluasan kawasan konservasi yang didukung oleh kegiatan pemantauan, konservasi, penataan dan rehabilitasi pesisir dan laut dengan fokus cakupan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui kegiatan Pengelolaan Kawasan Perairan dan Pesisir, Pulau-Pulau Kecil Wilayah Bosowasi, Ajatappareng, Mamminasata, Luwu Raya, Pangkep Kepulauan, Kepulauan Selayar dan Wilayah Selatan.

### **Capaian Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan**

Program ini diarahkan pada optimalisasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan meliputi pengawasan laut sampai dengan 12 mil, penangkapan ikan, budidaya dan

pengolahan serta pemasaran. Adapun data kinerja selama tahun 2019 – 2023 adalah sebagai berikut :

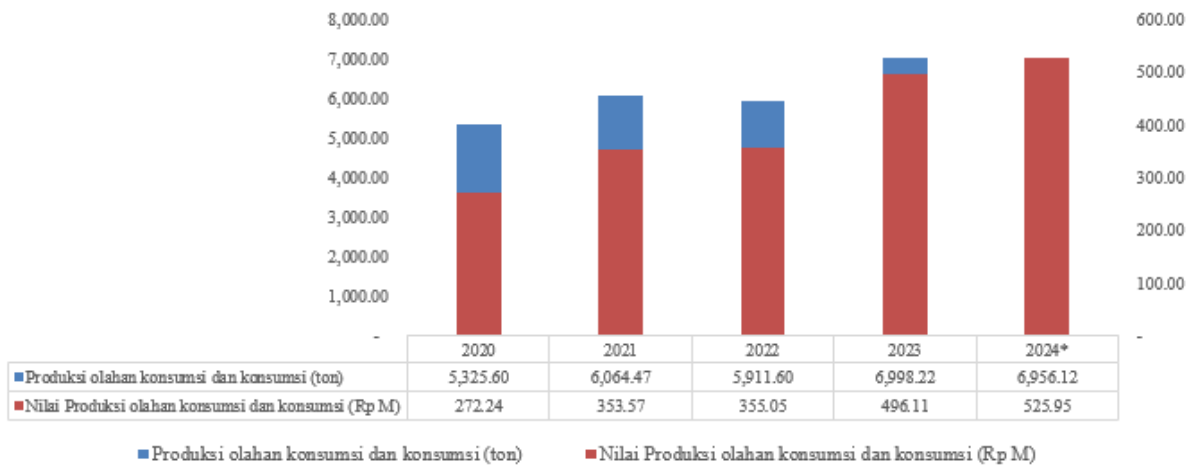
**Tabel 2.27**  
**Kinerja Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024**  
**mendukung sasaran Meningkatnya Kelestarian dan Kualitas Lingkungan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan**

No	Pelaku Usaha	Pelaku usaha yang diperiksa					Persentase Kepatuhan (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Usaha perikanan tangkap sampai dengan 12 mil	371	357	403	554	713	63,07	63,87	81,14	77,98	72,66
2	Pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 mil	-	-	8	7	13	-	-	100	57,14	46,15
3	Perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten /kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	-	-	2	2	3	-	-	100	50,0	0
4	Perikanan budidaya di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten /kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	-	-	5	3	4	-	-	100	33,33	75,0
5	Pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten /kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	-	-	9	7	12	-	-	88,89	100	66,67
6	Pemanfaat ruang laut	-	-	-	5	3	-	-	-	20	33,33
<b>Total pelaku usaha yang diperiksa ; Persentase kepatuhan</b>		<b>371</b>	<b>357</b>	<b>427</b>	<b>578</b>	<b>748</b>	<b>63,07</b>	<b>63,87</b>	<b>94,06</b>	<b>56,40</b>	<b>48,97</b>

### Capaian Kinerja Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini diarahkan pada optimalisasi pengembangan usaha pengolahan dan hasil perikanan meliputi inovasi dan pengembangan teknologi diversifikasi olahan, pembinaan mutu, standar mutu, penjaminan keamanan pangan untuk konsumsi, pengawasan dan pengujian mutu.

**Grafik II.9**  
**Kinerja Produksi Olahan Ikan dan Nilai Produksi Olahan Ikan**



### Capaian Kinerja Pendanaan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi serta kewenangan yang ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tidak lepas dari adanya dukungan pembiayaan/ penganggaran. Adapun Sumber pembiayaan yang tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.28**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan**

Uraian		Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	PENDAPATAN DAERAH	3,000,000,000	1,209,025,000	1,818,930,000	2,139,425,000	1.904.000.000	2,167,625,412	1,276,687,404	2,239,460,000	2,258,325,000	1.928.483.466	0,72	0,11	1,23	1,06	1,01	(0,7)	5,1
	Pendapatan Asli Daerah	2,778,000,000	757,025,000	1,818,930,000	2,139,425,000	1.904.000.000	2,167,625,412	658,627,404	2,239,460,000	2,258,325,000	1.928.483.466	0,78	0,87	1,23	1,06	1,01	18,5	39,2
-	Hasil retribusi daerah	50,000,000	100,000,000	-	-	1.904.000.000	78,285,000	272,565,000	-	-	1.928.483.466	1,57	2,73	-	-	1,01		
-	Lain-lain PAD yang Sah	172,000,000	352,000,000	-	-	-	285,310,000	345,495,000	-	-	104.500	1,66	0,98	-	-			
	Belanja tidak langsung	16,498,236,542	18,188,149,256	18,158,440,138	18,188,149,265		16,295,494,117	16,815,795,645	16,645,117,669	21,918,369,701		0,98	0,92	0,92	1,21			
	Belanja langsung	57,364,337,664	69,747,742,156	79,687,654,229	58,823,343,000		53,304,160,317	62,332,854,689	74,228,979,393	54,599,447,772		0,93	0,89	0,97	0,93			

Uraian		Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
-	Belanja Pegawai	-	1,528,950,000	2,292,300,000	-	28.291.148.738,	-	1,448,225,000	2,215,979,393	-	27.849.221.108	-	0,95	0,97	-	0,98		
-	Belanja Barang dan jasa	-	62,414,948,156	65,310,331,929	47,078,527,120	39.374.865.989	-	56,282,950,189	61,169,975,573	43,825,311,092	35.354.081.301	-	0,90	0,94	0,93	0,90		
-	Belanja Modal	-	5,803,844,000	12,085,022,300	11,744,815,880	23.798.369.711	-	4,561,679,500	10,834,801,320	10,774,136,680	22.792.186.715	-	0,79	0,89	0,92	0,96		
	Total BELANJA DAERAH	76,862,574,206	89,144,916,412	99,665,024,367	79,150,917,265	91.464.384.438,	71,767,279,846	80,425,337,738	93,113,557,062	78,776,142,473	85.995.489.124	0,93	0,90	0,90	0,93	0,94	5,7	5,4

**ANGGARAN PROGRAM URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020-2024**

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(9)	(10)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	-	33.858.376.210	32.252.642.275	38.278.920.637	40.260.991.191	-	33.125.476.613	31.346.310.908	34.614.687.090	38.776.011.239
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PPK		14.745.700.677	14.180.411.130	13.535.671.100	7.495.819.323	-	13.532.203.193	13.532.203.193	8.838.269.191	6.483.983.488
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		24.908.277.380	18.823.931.300	37.410.867.789	29.837.392.450	-	16.790.520.331	16.018.427.221	25.347.693.829	29.113.970.688
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		10.379.225.900	8.367.213.050	5.314.667.527	9.510.481.140	-	10.021.521.740	7.973.125.034	1.861.833.577	8.030.917.382
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		12.593.872.046	4.271.763.750	3.627.001.000	2.454.035.990	-	12.434.342.380	4.134.686.995	2.693.570.950	2.008.758.518
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		1.700.829.096	1.392.063.300	1.852.653.600	1.905.664.344	-	1.662.551.848	1.345.819.096	1.052.205.814,0	1.501.847.809
<b>Total</b>	-	<b>98.186.281.309</b>	<b>79.288.024.805</b>	<b>100.020.581.653</b>	<b>91.464.384.438</b>	-	<b>88.014.550.817</b>	<b>74.350.572.447</b>	<b>74.406.260.451,5</b>	<b>85.995.489.124</b>

#### 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk berperan dalam pembangunan daerah dengan fungsi melayani kepada masyarakat pelaku usaha perikanan baik dari hulu ke hilir. Adapun kelompok sasaran layanan yang dilayani adalah :

1. **Kelompok Pembudidaya.**

Layanan yang diberikan adalah dengan :

- Memfasilitasi dan pendampingan penerbitan ijin usaha dan sertifikasi budidaya baik yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI maupun oleh Pemerintah Provinsi melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Melakukan pembinaan dan edukasi terkait Cara Budidaya Ikan yang Baik dan Cara Perbenihan Ikan yang Baik
- Menjamin ketersediaan bibit/benur dan pengawasan pemakaian bahan obat/kimia/pakan non organik.
- Memfasilitasi akses perlindungan kepada pembudidaya melalui asuransi pembudidaya jika gagal panen atau terdampak bencana akibat perubahan iklim

2. **Kelompok Nelayan**

- Memfasilitasi dan pendampingan penerbitan ijin usaha perikanan tangkap, dokumen kapal, surat ijin berlayar baik yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI maupun oleh Pemerintah Provinsi melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Melakukan pembinaan dan edukasi terkait Cara Penanganan Ikan diatas Kapal
- Menjamin fasilitas dan operasional PPI dan layanan Pendaratan Ikan di Pelabuhan Perikanan
- Memfasilitasi akses perlindungan kepada nelayan melalui asuransi nelayan jika gagal panen atau terdampak bencana akibat perubahan iklim
- Melakukan edukasi dan pengawasan terhadap penggunaan alat tangkap

3. **Kelompok Petambak Garam dan pemanfaat pesisir dan laut**

- Memfasilitasi dan pendampingan penerbitan ijin usaha terhadap pemanfatan pesisir baik yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI maupun oleh Pemerintah Provinsi melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Melakukan pembinaan dan edukasi
- Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap dampak aktivitas pesisir dan laut

4. **Kelompok Pengolah dan Pemasar**

- Memfasilitasi dan pendampingan penerbitan ijin usaha pengolahan dan pemasar, dokumen kelayakan pengolah, sertifikat BPOM, Sertifikat Halal baik yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI maupun oleh Pemerintah Provinsi .
- Melakukan pembinaan dan edukasi kepada pelaku usaha agar memahami peraturan keamanan pangan dan jaminan mutu

5. **Masyarakat umum, Mahasiswa dan Pelajar**

- Memfasilitasi dan memberikan pelayanan terkait informasi dan data
- Penerimaan kerja praktek bagi pelajar dan kerja Magang bagi Mahasiswa

6. **Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian Pelayanan**

- BPOM
- Polairud
- Bappelitbangda
- Dinas Koperasi
- Dinas Perindag
- Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
  - Dinas Penanaman Modal dan PTSP
  - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
  - Asperli/Kospermindo
  - HNSI
  - Pertamina (penyediaan BBM Nelayan)
7. **Dukungan BUMD dalam pencapaian Kinerja Perangkat Daerah**
- Perseroda
8. **Kerjasama antar pemerintah provinsi yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah**
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur
  - Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku

## 2.2. Tenaga Kerja Kelautan dan Perikanan

**Tabel 2. 29**  
**Jumlah Tenaga Kerja Pengolah , Pemasar, Pembudidaya dan Pokmaswas Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Kegiatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	Pengolah Hasil KP	1.234	5.532	6.766
2	Pemasar Hasil KP	17.534	4.824	22.358
3	Pembudidaya KP	3.697	1.584	5.281
4	Pokmaswas	1.819	321	2.140
5	Pengawas	16	7	23
6	PUGAR	2.195	91	2.286

Sumber Data: DKP Prop.SulSel Tahun 2024

### 2.2.1. Analisis Data Terpilah Gender

Dari tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa jumlah keterlibatan tenaga kerja kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil kelautan perikanan telah terwakili secara proporsional dan tidak ada ketimpangan gender . Sedangkan untuk keterlibatan tenaga kerja kegiatan pengelolaan kegiatan budidaya dan pengawasan p e l i b a t a n Laki-Laki dari Perempuan telah proporsional keterlibatan perempuan pada kegiatan dimaksud yaitu minimal keterlibatan 30% Kegiatan pengelolaan budidaya dan untuk kegiatan pengawasan saat ini perempuan sudah diberi peran dalam proses pembangunan dengan pelibatan di setiap kegiatan, termasuk kegiatan pengelolaan budidaya dan pengawasan sudah dilibatkan namun jumlah pelibatannya belum proporsional antara laki-laki dan perempuan dalam kegiatan ini namun sudah ada peningkatan pelibatan dari tahun sebelumnya (tahun 2021 dan 2022), dimana terlihat di tabel bahwa jumlah pengelolaan pembudidayaan dan pengawasan keterlibatan perempuan masih rendah, oleh karena nya masih perlu analisis terkait proporsional keterlibatan laki-laki dan perempuan berpartisipasi dalam mendukung peningkatan produksi dan nilai hilirisasi produksi perikanan dan penerima manfaat dalam program kelautan perikanan. Tentunya dengan memberdayakan dan memberi peluang

kepada kaum perempuan untuk lebih inovatif dan kreatif dalam mengambil peran pembangunan minimal di wilayahnya sesuai minat dan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait kegiatan tersebut.

## 2.2 Permasalahan dan Isu strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan

Terdapat beberapa aspek yang menjadi dasar penentuan permasalahan yaitu dari aspek pelayanan perangkat daerah, Rancangan Awal RPJMD tahun 2025 – 2029 yang berkaitan dengan pelayanan perangkat daerah, arahan KLHS RPJMD 2025 – 2029 ataupun hasil penjarangan aspirasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah.

### Identifikasi permasalahan berdasarkan penjarangan Aspirasi dan Aspek Pelayanan Dinas kelautan dan perikanan Provinsi Sulawesi selatan

Perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternal merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu guna mengidentifikasi permasalahan terkait tugas dan fungsi tersebut, maka permasalahan pembangunan bidang kelautan dan perikanan sebagaimana tertuang pada pohon masalah dan pemetaan permasalahan berdasarkan hasil penjarangan aspirasi dari unit kerja lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dan lingkup Dinas Perikanan Kabupaten/Kota pada kertas kerja pohon masalah berikut :

**Tabel.2.30**  
**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan**  
**Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan**

No	Indikator	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
1.	Kontribusi PDRB Perikanan terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan	Kualitas dan daya saing Produk yang belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Harga komoditi atau nilai jual hasil perikanan fluktuatif</li> <li>- Pelaku usaha sulit dalam mengakses pasar yang lebih luas</li> <li>- Ketersediaan Pasokan bahan baku yang tidak stabil untuk industri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih minimnya pemanfaatan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi dan kuantitas produksi</li> <li>- Masih kurangnya fasilitas produksi untuk menunjang nilai produksi</li> <li>- Tidak ada Jaringan pemasaran</li> <li>- Minimnya penerapan mutu dan keamanan produk</li> </ul>
2.	Produksi perikanan	Belum optimalnya pengelolaan perikanan tangkap dan pengelolaan perikanan budidaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Produktivitas nelayan dan pembudidaya belum optimal</li> <li>- Akses dokumen kapal dan dokumen perizinan</li> <li>- Pelabuhan memenuhi standar operasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarana prasarana penangkapan dan pembudidaya yang belum memadai</li> <li>- Prosedur perizinan yang rumit dan tidak efisien</li> <li>- Infrastruktur pelabuhan perikanan yang belum memadai dan tata kelola pelabuhan serta pengelolaan asset pelabuhan yang belum optimal</li> <li>- Tata kelola perbenihan yang belum oprimal dalam menunjang penyediaan benih dan bibit berkualitas</li> <li>- Penyakit ikan, lingkungan budidaya yang rentan terkontaminasi serta Minimnya informasi pencegahan, pengendalian penyakit</li> <li>- Masih rendahnya kapasitas SDM</li> </ul>

3	Nilai tukar nelayan	Produksi nelayan yang tidak stabil	Pendapatan tidak menentu	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sarana penangkapan masih sederhana</li><li>- Kualitas dan kapasitas nelayan mengelola usaha dan mengakses program pemerintah</li></ul>
---	---------------------	------------------------------------	--------------------------	--

No	Indikator	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
		bergantung pada musim dan cuaca		
4	Konsumsi ikan	Belum meratanya ketersediaan dan distribusi ikan Produktivitas UPI belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ikan susah didapatkan dan harga ikan lebih mahal</li> <li>- Ketersediaan olahan ikan terbatas</li> <li>- Produk olahan UPI kalah bersaing dengan produk olahan lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimnya Sarana prasarna Logistik</li> <li>- Akses dan distribusi ikan khususnya wilayah yang jauh dari pesisir</li> <li>- Keterbatasan bahan baku</li> <li>- Belum optimalnya penerapan mutu dan keamanan hasil perikanan</li> <li>- Minimnya pengetahuan penerapan standar Berusaha</li> </ul>
5.	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	Belum adanya Kajian terkait potensi dan pemanfaatan SDI di wilayah Sulawesi Selatan untuk menjaga kelestarian Sumberdaya Ikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ancaman penangkapan ikan berlebih Overfishing</li> <li>- Kerusakan ekosistem laut akibat penangkapan ikan yang tidak lestrai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimnya data dan informasi sumberdaya perikanan tangkap dan budidaya sebagai bahan perencanaan pengelolaan SDI</li> <li>- Sarana dan prasarana untuk mendukung penangkapan ikan terukur belum memadai</li> </ul>
6.	Perluasan kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan	Belum optimalnya perlindungan laut dan sumberdaya perikanan	konflik pemanfaatan ruang laut dan overeksploitasi mengancam kelestarian ekosistem SDKP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Efektivitas pengelolaan kawasan konservasi masih rendah</li> <li>- Aktivitas yang kompleks berpotensi merusak ekosistem perairan pesisir</li> <li>- Masih rendahnya Pengetahuan masyarakat terkait mitigasi bencana dan pentingnya pengelolaan ekosistem pesisir</li> <li>- Masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan Pelaku usaha terkait prosedur perizinan</li> </ul>
7.	Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	Belum optimalnya pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Kerusakan lingkungan yang mengancam keberlanjutan sumberdaya kelautan dan perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih rendahnya kualitas SDM serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan</li> <li>- Ketidapatuhan terhadap regulasi perizinan dan maraknya IUU fishing</li> <li>- Masih minimnya Sarana prasarana mendukung pengawasan sumberdaya perikanan</li> <li>- Belum optimalnya koordinasi penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan</li> <li>- Pengawasan usaha perikanan yang belum optimal karena luasnya wilayah perairan yang Diawasi</li> </ul>

### Identifikasi permasalahan berdasarkan Rancangan Awal RPJMD tahun 2025 – 2029 dan KLHS RPJMD 2025 - 2029

Visi, Misi dan Program Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam pencapaian visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan harus dapat mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi dari tiap aspek kajian, baik itu dari sisi permasalahan berdasarkan pelayanan perangkat daerah dan arahan KLHS.

**Tabel. 2.31**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan**  
**Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap Pencapaian Visi, Misi dan**  
**Program Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan**

Visi/Misi/ Sasaran RPJMD	Pemasalahan Pembangunan Daerah (RPJMD) yang relevan dengan pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan Dinas kelautan dan perikanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Visi Sulawesi Selatan : "SULAWESI SELATAN MAJU DAN BERKARAKTER"</b>  Misi 2 : Meningkatkan perekonomian daerah yang merata dan berkelanjutan  Sasaran : Meningkatnya produktivitas ekonomi dan swasembada pangan	- Tata kelola pemerintahan yang belum adaptif dan agile (tangkas)	- Kualitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan	- Jumlah dan kualitas SDM, dan Sarana prasarana pendukung operasional yang modern belum Optimal	Kebijakan dan dukungan anggaran
	- Produktivitas ekonomi yang belum optimal	- Produktivitas dan daya saing produksi perikanan masih rendah	- Sarana dan prasarana pendukung masih terbatas	Potensi sumberdaya yang cukup besar dan Revitalisasi Sistem Produksi
	- Pendapatan perkapita masih rendah dan tidak merata - Masih tingginya kemiskinan	- Pendapatan masyarakat nelayan, pembudidaya dan petambak garam yang masih dibawah standar	- Belum menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), Cara Penanganan ikan yang Baik (CPIB), Akses pasar, kualitas Sumberdaya Manusia, Prasarana yang belum memadai	Kebijakan dan dukungan anggaran dan potensi Sumber Daya Alam
	- Daya saing daerah belum optimal - Integrasi ekonomi dan global masih lemah	- Nilai tambah produk olahan dan pemasaran belum optimal dan berdaya saing - Belum optimalnya nilai ekspor karena masih berupa bahan mentah	- Masih terbatasnya Penerapan inovasi dan teknologi pada produk olahan	Penerapan teknologi serta membangun jejaring bisnis dengan lintas sektor
	- Menurunnya kualitas lingkungan hidup - Belum optimalnya penerapan ekonomi biru	- Pengawasan belum optimal, SDM pengawas dan sarpras pengawasan belum optimal - Efektivitas pnegelolaan kawasan konservasi masih rendah	- Masih maraknya Kegiatan Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) Fishing - konflik kepentingan di wilayah laut dan pesisir serta Padat tangkap (Overfishing) di perairan pantai - Degradasi ekosistem pesisir (terumbu karang , mangrove dan padang lamun )	Keterlibatan semua unsur <i>stakeholder</i> dalam pengawasan dan pengelolaan SDKP Penyusunan RAD terkait pengelolaan dan pemanfaatan pesisir

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih terdapat ketidaksetaraan gender dalam akses, kontrol dan pemanfaatan terhadap pengelolaan sumberdaya alam (tambak, lahan) dan ekonomi secara proporsional dari program pugar</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterlibatan perempuan masih sering pada kegiatan pasca produksi</li> <li>- Kontribusi Perempuan dalam proses pengambilan keputusan masih kurang mulai dari proses perencanaan dan pengelolaan sumberdaya lahan produksi garam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Akses dan kontrol terhadap sumberdaya, struktur sosial dan institusional yang bias gender dapat membatasi akses perempuan terhadap manfaat program tertentu</li> <li>- Adanya beban ganda perempuan yang dapat menghambat partisipasi optimal dalam program</li> <li>- Diskriminasi dan eksklusi terhadap perempuan pada struktur pengambilan keputusan pada program tertentu di dominasi laki laki</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendekatan inklusif gender (diperlukan pendekatan yang sensitif gender dalam perencanaan dan pelaksanaan program untuk memastikan partisipasi perempuan dalam program kegiatan khusus yang mendorong peningkatan ekonomi keluarga</li> <li>- Peningkatan keterampilan dan pengetahuan melalui keterampilan teknis pengolahan produk, kewirausahaan dan manajemen keuangan untuk dapat bersaing secara mandiri</li> <li>- Penguatan kelompok</li> </ul>
--	---	--	---	---

				perempuan masyarakat pesisir - Dukungan kebijakan pemerintah melalui kepastian regulasi yang adil dan inklusif gender untuk jaminan hak hak perempuan dalam pengelolaan SDKP
--	--	--	--	---

**Tabel 2.32**  
**Hasil Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

No	Tujuan Target Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/indikator TPB	Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulsel	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Tujuan : Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan (TPB 14)			
1.	Indikator : Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil	Kurangnya kebijakan hak akses dan perlindungan untuk usaha perikanan kecil	Pola pikir dan Kualitas Sumberdaya Manusia	Dukungan Pembiayaan dan SDM
	Indikator : Jumlah kabupaten/kota dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan	Persyaratan untuk akses pendanaan tidak bisa dipenuhi oleh pelaku usaha	Kerjasama perbankan dan keterbatasan akses pelaku usaha kelautan dan perikanan	Potensi Perikanan Kebijakan dan Regulasi Perencanaan dan Evaluasi
	Indikator : Persentase kepatuhan pelaku usaha	- Pengawasan belum optimal, SDM pengawas	Pengetahuan dan fasilitas pelaku usaha terhadap akses	Dukungan SDM di unit kerja Cabang Dinas

No	Tujuan Target Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/indikator TPB	Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulsel	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		dan sarpras pengawasan belum optimal - Efektivitas pnegelolaan kawasan konservasi masih rendah	perizinan dan dokumen kapal Maraknya penangkapan ikan dengan menggunakan bom dan bius sehingga merusak lingkungan dan ekosistem sekitarnya	Kelautan(CDK) dan UPT Pelabuhan yang tersebar di Kab/Kota
	Indikator : Jumlah nelayan terlindungi	Ketersediaan data base kelompok nelayan yang valid	Minimnya aturan dan regulasi, pendapatan nelayan yang tidak stabil	Penyuluhan Penyadaran Masyarakat (Public Awareness)

Berdasarkan analisa identifikasi permasalahan diatas, berikut permasalahan secara umum hasil penyederhanaan dan menggabungkan permasalahan berdasarkan kesamaan dan saling keterkaitan serta memperhatikan data dan informasi kinerja pembangunan lima tahun sebelumnya. Permasalahan yang menjadi perhatian dalam pembangunan lima tahun kedepan sektor kelautan dan perikanan sebagai berikut :

1. Kualitas dan daya saing produk perikanan yang belum optimal

Kualitas dan daya saing produk perikanan sangat penting karena merupakan faktor penentu keberhasilan di pasar lokal dan internasional. Pentingnya kualitas produk berkaitan dengan keamanan pangan, kepercayaan konsumen, nilai tambah dan harga jual, pemenuhan standar ekspor. Sedangkan daya saing berperan penting dalam penguasaan pasar, meningkatkan profitabilitas, dan mendorong inovasi untuk bersaing di pasar global.

Sesuai dengan skor indeks ekonomi biru (IBEI) Provinsi Sulawesi Selatan skor rendah pada pilar ekonomi mengindikasikan lemahnya hilirisasi sektor kelautan. Oleh karenanya perlu memperkuat intergrasi sektor kelautan dan perikanan industry hilir dan inovasi berbasis keberlanjutan.

Capaian nilai produksi perikanan budidaya kurun waktu tahun 2022 – 2024 mengalami perlambatan yaitu sebesar Rp 21,7 trilyun menjadi Rp 16,7 trilyun. Hal ini dipicu penurunan nilai produksi rumput laut yaitu sebesar Rp 12,7 triliun menjadi Rp 6,7 trilyun. Begitupun dengan nilai ekspor perikanan mengalami perlambatan yaitu U\$ 528,39 juta menjadi U\$ 372,47 juta dan dipicu dari penurunan nilai ekspor rumput laut sebesar US\$ 314,3 juta menjadi US\$ 153,5 juta. Provinsi Sulawesi Selatan merupakan penghasil rumput laut terbesar nasional dan rumput laut merupakan komoditi ekspor terbesar di sektor perikanan yaitu berkontribusi sekitar 85 % dari total ekspor perikanan dan berkontribusi sekitar 45 % dari total nilai ekspor perikanan.

Faktor penyebab kualitas dan daya saing produk perikanan belum optimal disebabkan penuruan mutu pasca panen, teknologi pengolahan terbatas, standar belum merata, dan keterampilan Sumber daya manusia.

2. Masih rendahnya produktivitas pelaku usaha perikanan

Produksi kelautan dan perikanan menunjukkan trend positif namun jika dilihat dari segi Produktivitas pelaku usaha perikanan menunjukkan data yang masih belum optimal. Hal ini ditunjukkan dari produksi nelayan yang telah mendapatkan bantuan menunjukkan produksi yang belum optimal. Tantangan yang dihadapi adalah Pemberian akses ke sumber permodalan, teknologi, infrastruktur, informasi dan aset ekonomi produktif lainnya kepada nelayan, pembudidaya ikan dan UMKM kemaritiman.

Pengembangan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru termasuk pengembangan pangan akuatik (*blue food*) diprioritaskan pada peningkatan produktivitas perikanan yang terintegrasi, modern dan berkelanjutan, pengembangan budidaya komoditas unggulan udang, nila dan rumput laut, pengembangan input produksi, sarana prasarana, kawasan berbasis unggulan, pengelolaan sarana prasarana produksi perikanan tangkap dan budidaya, penguatan logistic, peningkatan daya saing sumber daya manusia pembudidaya dan penyedia jasa logistic, kerjasama perluasan pasar, pengembangan koperasi serta rantai pasok ekspor produk perikanan. Sedangkan pengembangan nilai tambah dan kompleksitas industry termasuk hilirisasi industry berbasis sumber daya alam perikanan berikut pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya termasuk dukungan pengembangan industry produk olahan hasil laut, peningkatan produktivitas budidaya rumput laut mendukung pengembangan hilirisasi rumput laut yang didukung oleh penguatan tata kelola dan pengembangan industry, ketersediaan bahan baku serta peningkatan adaptasi teknologi, riset inovasi dan kapasitas tenaga kerja.

3. Ancaman Kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan

Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) Provinsi Sulawesi Selatan mencatat capaian yang cukup tinggi dengan skor 80,86 pada tahun 2023, tertinggi secara nasional. Namun, analisis lebih lanjut menunjukkan adanya ketimpangan antar pilar, yaitu Pilar Sosial 80,86, Pilar Ekonomi 52,00, dan Pilar Lingkungan 50,20. Ketimpangan ini mencerminkan belum optimalnya penciptaan nilai tambah ekonomi dari sumber daya perairan serta belum kuatnya integritas ekosistem pesisir dan laut. Skor tinggi pada pilar sosial sebagian besar ditopang oleh konsumsi protein hewani (ikan), sedangkan skor rendah pada pilar ekonomi dan lingkungan mengindikasikan lemahnya hilirisasi sektor kelautan serta rendahnya penerapan praktik ramah lingkungan.

Permasalahan utama dalam pengelolaan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan adalah penangkapan ikan secara *destructive*, polusi laut termasuk sampah plastic, degradasi ekosistem pesisir seperti terumbu karang dan mangrove. Kondisi ini diperburuk dengan tantangan perubahan iklim dimana akan berdampak pada masyarakat pesisir.

Hasil pengawasan kepatuhan pelaku usaha perikanan menunjukkan kepatuhan pelaku usaha tidak patuh dari segi pemenuhan dokumen izin usaha karena pengetahuan masyarakat yang minim dan akses yang terbatas. Hal ini jika dibiarkan akan berdampak pada ketidakadaan informasi bagi Pemerintah untuk memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk menjaga kelestarian sumberdaya laut dan perikanan. Selain itu keterpenuhan dokumen perizinan bagi pelaku usaha akan berdampak pada pengawasan yang efektif terhadap pelaku usaha.

Tantangan terhadap pengelolaan kawasan konservasi masih dihadapkan pada masih rendahnya nilai Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) masih rendah yang menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan konservasi belum optimal dan masih memerlukan perbaikan.

### **2.2.2. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan di masa lima tahun mendatang. Isu-isu strategis yang terdapat dalam berbagai dokumen perencanaan strategis di Sulawesi Selatan menjadi elemen penting dalam perumusan isu pembangunan berkelanjutan strategis termasuk isu-isu strategis terkait tata ruang wilayah menjadi dasar untuk menyelaraskan pembangunan dengan potensi dan kapasitas ruang. RPJPD Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 merumuskan isu-isu strategis jangka panjang yang mencerminkan visi pembangunan daerah yang berkelanjutan. RPD Tahun 2024-2026 memberikan panduan isu-isu prioritas dalam jangka menengah, sedangkan dokumen KLHS mengidentifikasi isu-isu lingkungan hidup yang menjadi dasar untuk menjaga keberlanjutan ekosistem dan sumber daya alam. Keselarasan antara isu-isu strategis dari berbagai dokumen ini dengan isu-isu nasional menjadi pijakan penting untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang holistik dan terintegrasi

Isu strategis dalam perencanaan pembangunan adalah masalah atau kondisi yang sangat penting dan perlu diperhatikan karena memiliki dampak yang signifikan terhadap keberhasilan rencana pembangunan. Informasi berdasarkan perumusan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana tabel berikut dirumuskan isu Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan adalah:

Tabel 2.33  
Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan Wilayah Laut 0 - 12 mil dengan Luas perairan kewenangan provinsi 12 mil 54.854,8 km<sup>2</sup></li> <li>- Penangkapan ikan lestari 858.517,6</li> <li>- Potensi Perikanan budidaya dari payau, laut dan air tawar, potensi Produksi Perikanan Budidaya + 20 juta ton</li> <li>- Potensi hasil tangkapan, produksi budidaya, Produk olahan Jumlah Unit pengolahan ikan (UPI) yang terus berkembang dan sarana penunjang yang tersedia</li> <li>- Potensi karbon biru dan energi baru terbarukan 54,2 juta tCO<sub>2</sub>eq</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih kurangnya fasilitas produksi untuk menunjang nilai produksi</li> <li>- Masih minimnya pemanfaatan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi dan kuantitas produksi</li> <li>- Minimnya akses dan Jaringan pemasaran</li> <li>- Minimnya penerapan mutu dan keamanan produk</li> <li>- Sarana prasarana penangkapan dan pembudidaya yang belum memadai</li> <li>- Prosedur perizinan yang rumit dan tidak efisien</li> <li>- Infrastruktur pelabuhan perikanan yang belum memadai dan tata kelola pelabuhan serta pengelolaan asset pelabuhan yang belum optimal</li> <li>- Tata kelola perbenihan yang belum optimal dalam menunjang penyediaan benih dan bibit berkualitas</li> <li>- Penyakit ikan, lingkungan budidaya yang rentan terkontaminasi serta Minimnya informasi pencegahan, pengendalian penyakit</li> <li>- Masih rendahnya kapasitas SDM</li> <li>- Minimnya data dan informasi sumberdaya perikanan tangkap dan budidaya sebagai bahan perencanaan pengelolaan SDI</li> <li>- Sarana dan prasarana untuk mendukung penangkapan ikan terukur belum memadai</li> <li>- Efektivitas pengelolaan kawasan konservasi masih rendah</li> <li>- Degradasi ekosistem pesisir akibat Aktivitas yang kompleks</li> <li>- Masih rendahnya Pengetahuan masyarakat terkait mitigasi bencana dan pentingnya pengelolaan ekosistem pesisir</li> <li>- Masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan Pelaku usaha terkait prosedur perizinan</li> <li>- Masih rendahnya kualitas SDM serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya Ketimpangan Sosial dan Ekonomi mencakup isu Kerentanan Masyarakat, Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi, dan Kerawanan Pangan</li> <li>- Meningkatnya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mencakup isu meningkatnya Ancaman Keanekaragaman Hayati (KEHATI). Ancaman terhadap keanekaragaman hayati secara langsung berkaitan dengan degradasi lingkungan, pencemaran, dan kerusakan ekosistem yang lebih luas.</li> <li>- Peningkatan Resiko Bencana dan Perubahan Iklim sebagai salah satu isu utama, mengingat dampak perubahan iklim dan bencana hidrometeorologi yang terus meningkat menjadi ancaman signifikan bagi keberlanjutan pembangunan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ekonomi Biru</li> <li>- Perubahan iklim</li> <li>- Kerusakan ekosistem dan berkurangnya populasi keanekaragaman hayati di laut</li> <li>- Pencemaran sampah laut (saat ini Indonesia berada posisi ke 2 dunia)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemiskinan</li> <li>- Kerawanan pangan</li> <li>- Penangkapan ikan berlebih (<i>Overfishing</i>) dan IUU fishing</li> <li>- Degradasi kawasan konservasi</li> <li>- Kerusakan ekosistem dan berkurangnya populasi keanekaragaman hayati di laut</li> <li>- Peningkatan Cakupan Wilayah Bencana</li> <li>- Tingginya sampah domestik yang tidak terkelola</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketahanan dan kedaulatan pangan Sulawesi selatan sebagai lumbung pangan nasional yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan</li> <li>- Pengelolaan pusat-pusat pertumbuhan</li> <li>- Hilirisasi</li> <li>- Peningkatan kesejahteraan</li> <li>- Penurunan daya saing daerah</li> <li>- Kerusakan lingkungan pesisir</li> <li>- Alih Fungsi Penggunaan Lahan</li> <li>- Konflik pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Ikan</li> </ul>	<p>Hilirasi perikanan yang berdaya saing, bernilai tambah mendukung swasembada pangan dan berbasis ekonomi biru</p> <p>Pengelolaan dan Pemanfaatan Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang berkelanjutan</p> <p>Perluasan kawasan konservasi serta penguatan pengawasan terintegrasi</p>

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketidakpatuhan terhadap regulasi perizinan dan maraknya IUU fishing</li> <li>- Masih minimnya Sarana prasarana mendukung pengawasan sumberdaya perikanan</li> <li>- Belum optimalnya koordinasi penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan</li> <li>- Pengawasan usaha perikanan yang belum optimal karena luasnya wilayah perairan yang diawasi</li> </ul>					

### BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan visi misi yang termuat dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2029, “Sulawesi Selatan Maju dan Berkarakter”, dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan kurun waktu 2025 – 2029 telah ditetapkan sebagaimana dijelaskan pada point berikut.

#### 3.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

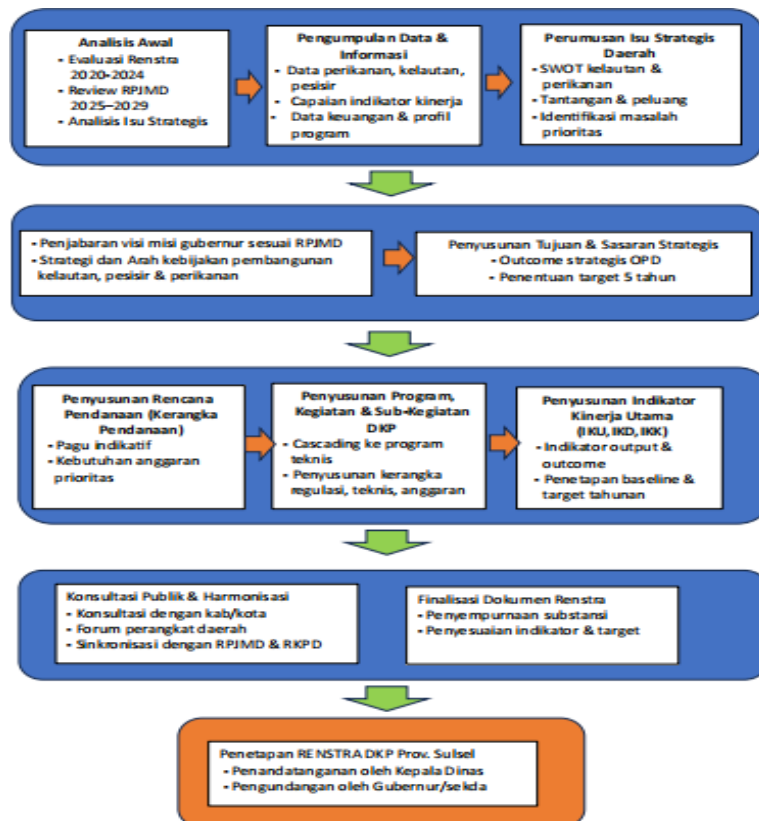
Berdasarkan sasaran RPJMD tahun 2025 – 2029 Meningkatnya produktivitas ekonomi dan swasembada pangan maka ditetapkan Tujuan Rencana strategis Dinas kelautan dan perikanan yaitu :

**“ Meningkatkan Kontribusi Sektor Kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan “**

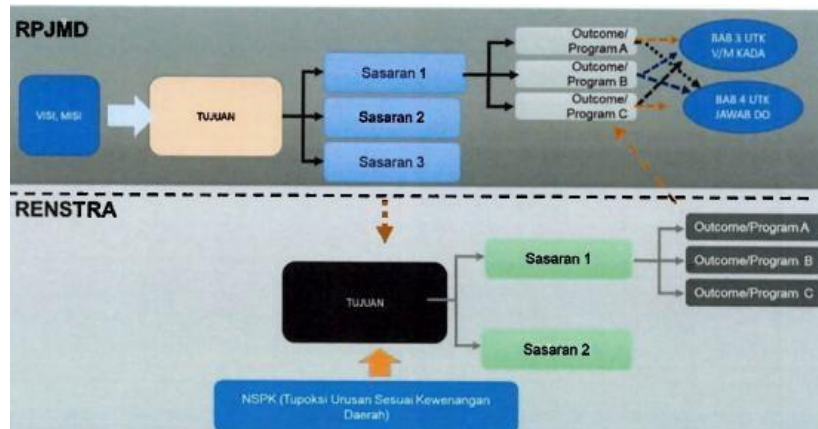
Selanjutnya berdasarkan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Sulawesi Selatan di jabarkan kedalam 3 sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya produktivitas sektor kelautan dan perikanan
2. Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Gambar 3.1. Konsep Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan



Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan



Keterkaitan tujuan sasaran perangkat daerah dengan tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1  
Keterkaitan Tujuan, Sasaran RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah

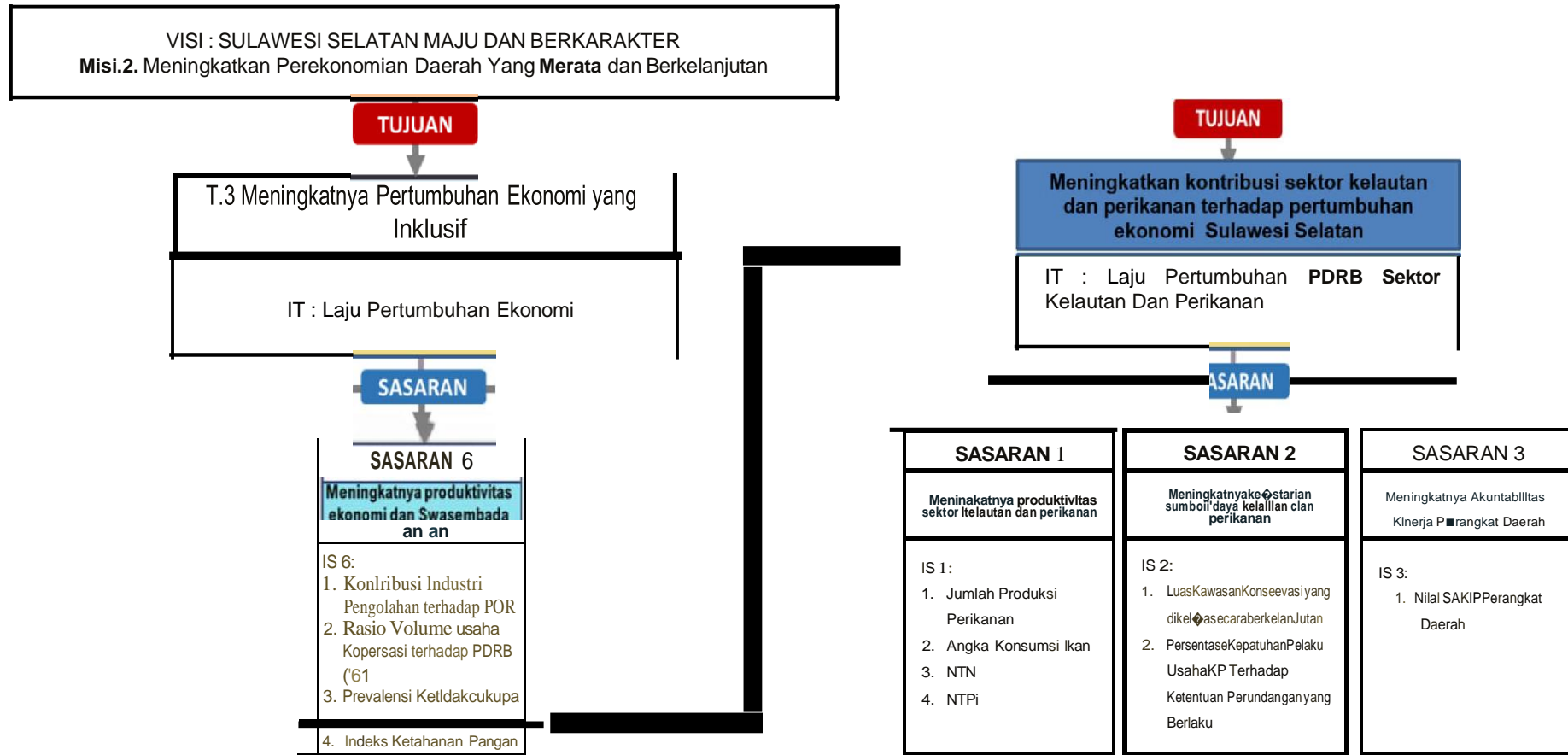
RPJMD		Renstra Perangkat Daerah	
Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.	Meningkatnya produktivitas ekonomi dan swasembada pangan	Meningkatkan kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya produktivitas sektor kelautan dan perikanan</li> <li>2. Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan</li> <li>3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah</li> </ol>

**Tabel. 3.2**  
**Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029**

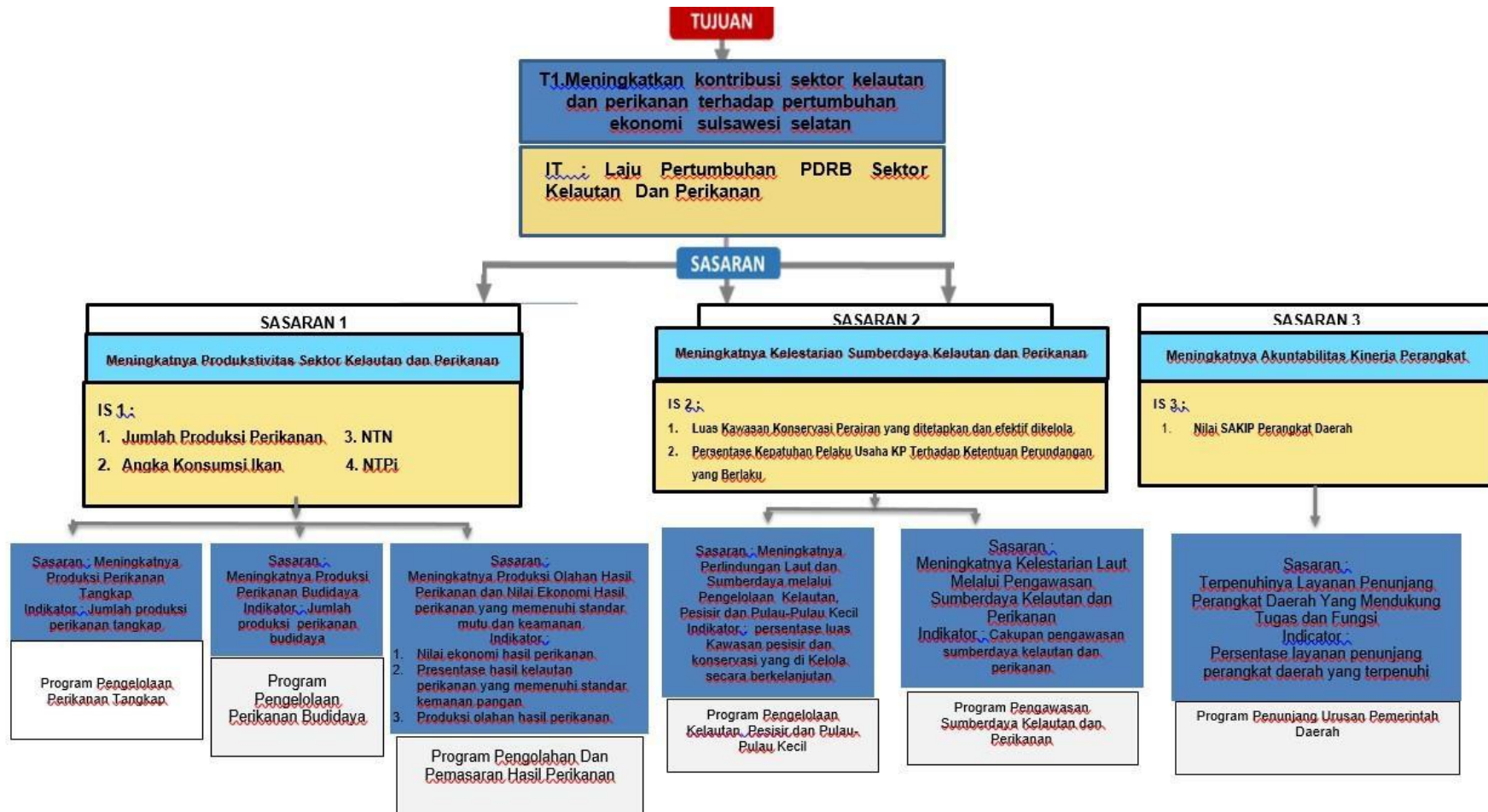
No.	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Mewujudkan ekonomi biru melalui perlindungan Laut dan perairan Umum daratan beserta sumberdayanya dalam pengelolaan dan pemanfaatan yang ramah lingkungan serta berkelanjutan	Meningkatkan kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan		Laju Pertumbuhan PDRB Perikanan	5.3	5.6	5.9	6.2	6.4	6.8
1.1			Sasaran 1 Meningkatnya produktivitas sektor kelautan dan perikanan	Jumlah produksi perikanan (ton)	5.450.079.6	5.709.493.06	5.982.776.12	6.268.853.74	6.569.043.4	6.884.237.7
				Nilai Tukar Nelayan (NTN)	115,3	118,7	122,3	126	129,7	133,6
				Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi)	109,83	112,90	116,06	119,31	122,66	126,09
				Angka konsumsi ikan	73.50	74.70	75.90	77.10	80.00	81.70
1.2			Sasaran 2 Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan	Luas kawasan konservasi perairan yang ditetapkan dan yang efektif dikelola (Ha)	829.561,63	847.058,22	847.122.4	847.122.4	847.122.4	847.122.4

No.	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
				persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan perundangan yang berlaku (%)	82	84	87	89	91	93
1.3			Sasaran 3 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	<b>Nilai Sakip Perangkat Daerah</b>	<b>88,00</b>	<b>90,00</b>	<b>92,00</b>	<b>94,00</b>	<b>96,00</b>	<b>98,00</b>

Gambar 3.3 Cascading Tujuan dan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan



Gambar 3.4 Cascading Tujuan, sasaran dan Program Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan



### 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan ditetapkan tahapan pembangunan tahunan (arah kebijakan) sebagai prioritas pembangunan kelautan dan perikanan sebagai berikut :

Tabel 3.3 Tahapan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan

TAHAP I (2025)	TAHAP II (2026)	TAHAP III (2027)	TAHAP IV (2028)	TAHAP V (2029)	TAHAP VI (2030)
1	2	3	4	5	
Kontribusi Sektor KP Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang didukung oleh SDM yang berdaya saing	Penguatan Kapasitas SDM serta Infrastruktur Kelautan Perikanan	Akselerasi Pembangunan SDM dan Infrastruktur Untuk Mendukung Kontribusi Sektor KP Terhadap Pertumbuhan Ekonomi biru yang Berkelanjutan	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Daya saing Sektor KP	SDM Sektor KP yang Kompeten dan Kontribusi Pertumbuhan Ekonomi Biru	Optimalisasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan daya saing

Berdasarkan tahapan pembangunan diatas, dirumuskan arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan yang selaras dengan RPJMD sebagai berikut :

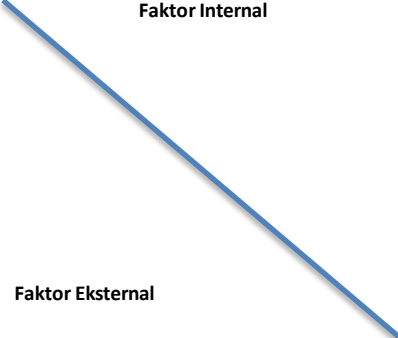
Tabel 3.4 Arah Kebijakan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 -2029

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	KET
1	Mewujudkan ekonomi biru melalui perlindungan laut, dan perairan umum daratan beserta sumberdayanya dalam pengelolaan dan pemanfaatan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan	Menguatkan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan berbasis kawasan unggulan yang didukung inovasi teknologi dan tatakelola rantai pasok yang efisien, meningkatkan hilirisasi berbasis SDA, serta pengamanan cadangan pangan strategis guna mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan secara berkelanjutan	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan melalui Modernisasi Teknologi dan Infrastruktur, Pemberdayaan Nelayan dan Masyarakat Pesisir, Penguatan Pemasaran dan Nilai Tambah, Pengembangan Wisata Perikanan dan Bahari	
			Peningkatan pengelolaan kawasan Konservasi, Rehabilitasi Ekosistem Laut dan Adaptasi Perubahan Iklim serta pembersihan sampah plastik di laut	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	KET
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, adaptif, dan inovatif melalui peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan, kualitas pelaporan kinerja, kualitas pengawasan dan kualitas kinerja ASN yang adaptif terhadap kemajuan teknologi dan mengedepankan pelayanan prima yang inovatif	Peningkatan tata kelola Layanan perangkat daerah yang akuntabel, adaptif, dan inovatif	

Berdasarkan faktor internal dan eksternal, maka melalui matriks SWOT akan ditemukan beberapa strategi pengembangan yang dapat mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Sulawesi Selatan.

**Tabel 3.32**  
**Analisis SWOT untuk mengidentifikasi Strategi**

<p align="center"><b>Faktor Internal</b></p>  <p align="center"><b>Faktor Eksternal</b></p>	<p><b>Strengths/ Kekuatan (S)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan</li> <li>Potensi pasar yang luas</li> <li>Ketersediaan SDM pelaku usaha perikanan dan SDM aparatur</li> <li>Dukungan dan kebijakan pemerintah</li> </ol>	<p><b>Weaknesses/ Kelemahan (W)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Masih rendahnya nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan</li> <li>Penggunaan teknologi yang masih sederhana /tradisional dan dukungan infrastruktur dan sarana prasarana yang belum memadai</li> <li>Ketersediaan benih unggul</li> <li>Inefisiensi biaya produksi</li> <li>Belum terkelolanya Manajemen rantai pasok terpadu</li> <li>Kualitas SDM</li> </ol>
<p><b>Opportunities/ Peluang (O)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan permintaan produk kelautan &amp; perikanan</li> <li>Perkembangan teknologi</li> <li>Berkembangnya paradigma ekonomi biru</li> <li>Kelembagaan masyarakat usaha perikanan yang tersebar di kab/kota</li> <li>Akses lembaga keuangan mikro</li> <li>Mitra usaha tersebar</li> </ol>	<p><b>Strategi (S-O)</b></p> <p>Meningkatkan produktivitas dan produksi kelautan dan perikanan yang bernilai tambah dan berbasis kawasan</p> <p>Pengembangan system budidaya dan perikanan tangkap secara berkelanjutan</p> <p>Pengelolaan pasca panen berbasis teknologi, untuk peningkatan nilai tambah dan akses pasar yang lebih luas</p> <p>Pengembangan usaha kelautan dan perikanan seperti destinasi wisata edukatif dan wisata bahari lainnya</p> <p>Penguatan kelembagaan, akses permodalan dan dukungan operasional lainnya untuk mendukung peningkatan produktivitas</p>	<p><b>Strategi (W-O)</b></p> <p>Pengembangan produktivitas dan daya saing berbasis pengembangan wilayah terpadu dan berkelanjutan</p> <p>Optimalisasi pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana produksi berbasis teknologi yang ramah lingkungan serta benih unggul yang tersertifikasi untuk mendukung produktivitas perikanan</p> <p>Peningkatan kapasitas Sumberdaya Manusia melalui pelatihan dan edukasi</p> <p>Penyediaan sistem informasi manajemen dan jasa logistik ikan dari hulu sampai hilir</p>
<p><b>Threats/ Ancaman (T)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kepastian harga pasar</li> <li>Perubahan iklim</li> <li>Degradasi wilayah pesisir dan laut</li> <li>Tindakan IUU Fishing merusak ekosistem laut</li> <li>Pencemaran perairan darat dan laut</li> </ol>	<p><b>Strategi (S-T)</b></p> <p>Pengawasan dan penegakan hukum dalam rangka pengendalian eksploitasi sumberdaya</p> <p>Peningkatan ketahanan masyarakat pesisir melalui diversifikasi mata pencaharian alternative</p> <p>Peningkatan kapasitas aparat pemerintah dalam perumusan kebijakan ekonomi biru</p> <p>Perencanaan zonasi dan penguatan data, mekanisme partisipasi integrasi pengelolaan perikanan dan konservasi berbasis masyarakat, dan penguatan relasi antar pemerintahan, Perguruan Tinggi, Lembaga penelitian untuk pengelolaan sumberdaya perairan</p>	<p><b>Strategi (W-T)</b></p> <p>Pengembangan dan penguatan kerjasama serta rantai pasok ekspor produk perikanan</p> <p>Penguatan kapasitas masyarakat untuk mengelola sumberdaya di pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan</p> <p>Peningkatan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>Penyediaan dan penguatan regulasi/ kebijakan pemerintah mengurangi dan mencegah tindakan merusak ekosistem perairan darat maupun laut</p>

Berdasarkan analisa SWOT diatas maka ditetapkan strategi pembangunan sektor kelautan dan perikanan sebagai berikut :

Tabel 3.5 Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025 -2029

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan Renstra	Strategi Perangkat Daerah
<b>Misi 2. Meningkatkan perekonomian daerah yang merata dan berkelanjutan</b>			
Peningkatan produktivitas ekonomi sektor kelautan dan perikanan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan produktivitas sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan melalui Modernisasi Teknologi dan Infrastruktur, Pemberdayaan Nelayan dan Masyarakat Pesisir, Penguatan Pemasaran dan Nilai Tambah, Pengembangan Wisata Perikanan dan Bahari	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan produktivitas dan produksi kelautan dan perikanan yang bernilai tambah dan berbasis kawasan</li> <li>2. Pengembangan system budidaya dan perikanan tangkap secara berkelanjutan</li> <li>3. Pengelolaan pasca panen berbasis teknologi, untuk peningkatan nilai tambah dan akses pasar yang lebih luas</li> <li>4. Pengembangan usaha kelautan dan perikanan seperti destinasi wisata edukatif dan wisata bahari lainnya</li> <li>5. Penguatan kelembagaan, akses permodalan dan dukungan operasional lainnya untuk mendukung peningkatan produktivitas</li> <li>6. Pengembangan produktivitas dan daya saing berbasis pengembangan wilayah terpadu dan berkelanjutan</li> <li>7. Optimalisasi pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana produksi berbasis teknologi yang ramah lingkungan serta benih unggul yang tersertifikasi untuk mendukung produktivitas perikanan</li> <li>8. Peningkatan kapasitas Sumberdaya Manusia melalui pelatihan dan edukasi</li> <li>9. Penyediaan sistem informasi manajemen dan jasa logistik ikan dari hulu sampai hilir</li> <li>10. Pengembangan dan penguatan kerjasama serta rantai pasok ekspor produk perikanan</li> </ol>

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan Renstra	Strategi Perangkat Daerah
		<p>Peningkatan pengelolaan kawasan Konservasi, Rehabilitasi Ekosistem Laut dan Adaptasi Perubahan Iklim serta pembersihan sampah plastik di laut</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan dan penegakan hukum dalam rangka pengendalian eksploitasi sumberdaya</li> <li>2. Peningkatan ketahanan masyarakat pesisir melalui diversifikasi mata pencaharian alternative</li> <li>3. Perencanaan zonasi dan penguatan data, mekanisme partisipasi integrasi pengelolaan perikanan dan konservasi berbasis masyarakat, dan penguatan relasi antar pemerintahan, Perguruan Tinggi, Lembaga penelitian untuk pengelolaan sumberdaya perairan</li> <li>4. Penguatan kapasitas masyarakat untuk mengelola sumberdaya di pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.</li> <li>5. Peningkatan kapasitas aparat pemerintah dalam perumusan kebijakan ekonomi biru</li> <li>6. Peningkatan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</li> <li>7. Penyediaan dan penguatan regulasi/ kebijakan pemerintah mengurangi dan mencegah tindakan merusak ekosistem perairan darat maupun laut</li> </ol>
		<p>Peningkatan tata kelola Layanan perangkat daerah yang akuntabel, adaptif, dan inovatif</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas dan transparansi perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah</li> <li>2. Optimalisasi dan pengamanan aset pemerintah daerah melalui kerjasama pentahelix</li> <li>3. Pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel</li> <li>4. Mendorong optimalisasi digitalisasi layanan publik dan penguatan aspek pemerintahan digital</li> </ol>

### 3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional (Telaahan Renstra K/L )

Analisis Renstra K/L dan OPD Provinsi ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. Indikator Kinerja Sasaran Strategis KKP adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.34**

**Sasaran Strategis Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan 2025 – 2029**

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA		2025	2026	2027	2028	2029
<b>SS 1. Meningkatkan Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Adaptasi Perubahan Iklim</b>						
1	Tingkat pengelolaan konservasi (nilai)	63,7	65	66,2	67,5	68,7
<b>SS 2. Meningkatnya produktivitas sektor kelautan dan perikanan</b>						
1	Nilai kontribusi sektor kelautan terhadap PDB maritim (triliun rupiah)	2,25	2,50	2,75	2,85	3,0
2	Pertumbuhan PDB perikanan (%)	4 - 6	4 – 6	6 - 7	7 - 8	8
3	Volume produksi perikanan (juta ton)	24,58	25,50	26,58	27,78	29,05
4	Indeks pembangunan pulau-pulau kecil (skala 0-1)	0,49	0,52	0,55	0,58	0,61
5	Persentase penyelenggaraan penataan ruang laut dan zonasi pesisir (%)	13,6	34,69	55,78	77,55	100
6	Indeks kepatuhan sektor kelautan dan perikanan (indeks)	80,67	81	81,33	81,67	82
7	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada pada batas biologis yang aman (%)	<80	<80	<80	<80	<80
<b>SS 3. Meningkatnya Nilai Tambah dan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan</b>						
1.	Nilai Ekspor Produk Perikanan (USD Miliar)	6,25	6,7	7,2	7,8	8,5
2.	Angka konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)	26,26	26,85	27,44	28,04	28,63
3.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan yang memenuhi standar mutu keamanan pangan (%)	70	72	74	76	80
<b>SS 4. Meningkatnya SDM Kelautan dan Perikanan yang Kompeten</b>						
1	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap dunia usaha, dunia industri, dan atau Dunia Kerja (%)	75	76	77	78	79
<b>SS 5. Meningkatnya Reformasi Birokrasi KKP yang Berkualitas</b>						
1	Indeks Reformasi Birokrasi KKP	90,05	90,1	90,15	90,2	90,25

Dalam RPJMN 2025-2029 terdapat delapan Misi Asta Cita dimana KKP mendukung Misi Asta Cita ke - 2 hingga ke - 8.



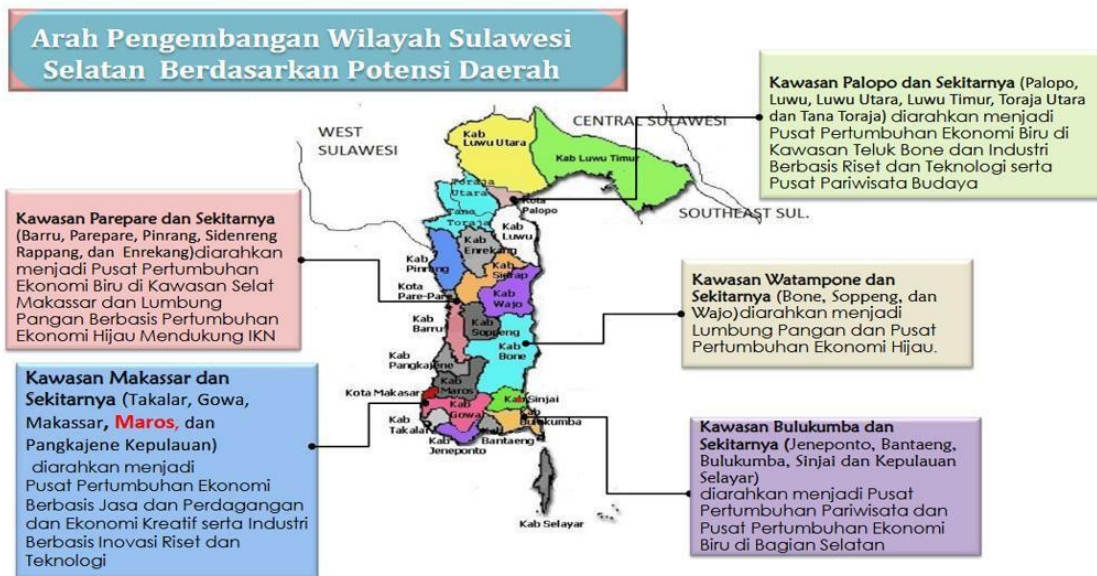
Visi dan Misi dalam RPJMN 2025-2029 akan dicapai dengan 17 Program Prioritas dan yang relevan dengan KKP adalah program prioritas 01, 03, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 14, dan 15.



### 3.4. Arah kebijakan kewilayahan (Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah )

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. Dibandingkan dengan struktur dan pola eksisting maka OPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan dalam lima tahun mendatang.

Pembangunan kewilayahan Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 mengacu pada tematik transformasi ekonomi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 berdasarkan kawasan pembangunan di Sulawesi Selatan yang diarahkan sebagaimana gambar sebagai berikut.



Sumber: Perda Nomor 7 Tahun 2024 tentang RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045

Pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil diatur dalam perda No 3 tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2022 – 2041 yang terintegrasi dengan RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Provinsi diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Sehingga rancangan program beserta targetnya dapat disusun sesuai dengan RTRW tersebut. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 – 2041 lampiran 22 Indikasi Program Utama 5 Tahunan RTRW Provinsi Sulawesi Selatan yang berkaitan dengan sektor kelautan dan perikanan dapat dilihat pada tabel 2.35.



bb.	Sosialisasi penetapan kawasan kepadamasyarakat	Kee. Pesisir	APBN, APBD	DKP, PT, KemKKP						
cc	Penataan batas masing-masing subzona	Lokas 1KKP	APBN, APBD	DKP, KemKKP						
dd	Perlindungan terhadap habitat/daerah ruaya	Selat Makassar, Laut Flores, dan Teluk Bone	APBN, APBD	DKP, KemKKP						
ee.	Harmonisasi kelembagaan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil	Provinsi Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Swasta, LSM	DKP, KemKKP						
ff.	Monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil	Provinsi Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Swasta, LSM	DKP, KemKKP						
gg.	Pengembangan jejaring kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil	Provinsi Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Swasta, LSM	DKP, KemKKP						
hh.	Membangun kemitraan pengelolaan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil	Provinsi Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Swasta, LSM	DKP, KemKKP						
ii	Rehabilitasi Ekosistem Pesisir	Provinsi Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Swasta, LSM	DKP, BLHD, Dinas Kehutanan						
j.	Pencadangan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil oleh Gubernur	Lokasi KKP 3K	APBN, APBD, Swasta, LSM	OKP Provinsi						
kk.	Pengusulan Penetapan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil ke Menteri	Provinsi Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Swasta, LSM	DKP Provinsi						
ll.	Pembelajaran Masyarakat di kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil	Provinsi Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Swasta, LSM	OKP Provinsi						
mm	Pelatihan dan pendampingan dalam pengembangan mata pencaharian alternatif	Provinsi Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Swasta, LSM	DKP Provinsi						
nn	Sosialisasi kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil	Provinsi Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Swasta, LSM	DKP Provinsi						
oo	Penataan tanda batas kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil	Provinsi Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Swasta, LSM	OKP Provinsi						
pp.	Identifikasi dan inventarisasi pulau-pulau kecil	Provinsi Sulawesi Selatan	APBN, APBD	Kem KP, DKP, Boppeda						
qq.	Penegakan dan Penataan Hukum	Provinsi Sulawesi Selatan	APBN, APBD	Kem KP, DKP, Boppeda, Biro Hukum dan HAM, Keprosian, Satpol						
<b>B</b>	<b>PeMujudan kawasan peruntukan budi daya</b>									
<b>4</b>	<b>Pemantapan dan Pengembangan Qan Kawasan Y1 Perikanan</b>									
a.	Pemantapan Kawasan Perikanan	Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas Kelautan dan Perikanan						
b.	Pengembangan Kawasan Perikanan	Sulawesi Selatan	APBN, APBD, Investas, Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas Kelautan dan Perikanan						
c.	Retabilitas Kawasan Andalan untuk Perikanan	Bulukumba, Pangkajene Kepulauan, Barru, Bone, Pinrang	APBN, APBD, Investas, Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas Kelautan dan Perikanan						
d.	Pengembangan Kawasan Andalan untuk Perikanan	Bulukumba, Pangkajene Kepulauan, Barru, Bone, Pinrang	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas Kelautan dan Perikanan						
e.	pengembangan kawasan perikanan berbasis masyarakat	Kata Makassar, Kabupaten Takalar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bone, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Wajo	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas Perikanan						
		Kabupaten Maros, Kabupaten Bantaeng, dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan								
f.	Pemanfaatan Kawasan Perikanan Tangkap	Sentra Perikanan Tangkap	APBN, APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan, KemKP						
g	Sosialisasi aturan alat tangkap, besar armada pada Jalur penangkapan ikan	Sentra Perikanan Tangkap	APBN, APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan, KemKP						
h.	Pembinaan dan Pengembangan kapal perikanan, alat penangkap ikan dan pengawakan kapal perikanan	Sentra Perikanan Tangkap	APBN, APBD, Swasta	Dinas Kelautan dan Perikanan, KemKP, Swasta						
i	Pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan	Sentra Perikanan Tangkap	APBN, APBD, Swasta	Dinas Kelautan dan Perikanan, KemKP, Swasta						
j	Pembangunan Sistem informasi daerah penangkapan ikan	Sentra Perikanan Tangkap	APBN, APBD, Swasta	Dinas Kelautan dan Perikanan, KemKP, Swasta, PT						
k	Peningkatan pengawasan pelaksanaan kegiatan di sektor industri perikanan	Sentra Perikanan Tangkap	APBN, APBD, Swasta	Dinas Kelautan dan Perikanan, KemKP, Swasta, PT						
l	Pengembangan Sarana/Prasarana PPN/PPI	Sentra Perikanan Tangkap	APBN, APBD, Swasta	Dinas Kelautan dan Perikanan, Kem KP, Swasta, PT						
m.	Penyusunan Masterplan perikanan tangkap Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan	APBN, APBD, LSM	Dinas Kelautan dan Perikanan, Kem KP						
n	Revitalisasi alat tangkap yang produktif dan ramah lingkungan	Sentra Perikanan Tangkap	APBN, APBD, LSM	Dinas Kelautan dan Perikanan, Kem KP						
o.	Pemberian kredit alat tangkap	Sentra Perikanan Tangkap	APBN, APBD, LSM	Dinas Kelautan dan Perikanan, Kem KP, Perbankan						
p.	Peningkatan pelatihan nelayan secara bertahap	Sentra Perikanan Tangkap	APBN, APBD, LSM	Dinas Kelautan dan Perikanan, Kem KP						
q.	Pembangunan dan pengembangan PPI/PPN	Provinsi Sulawesi Selatan	APBN, APBD, LSM, Swasta	Dinas Kelautan dan Perikanan						



Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk kegiatan pada kawasan peruntukan lindung dan peruntukan budidaya terdapat beberapa zona dan berkaitan dengan sektor kelautan dan perikanan yaitu :

1. Zona Pariwisata diperbolehkan untuk penanaman tanaman bakau, perlindungan keanekaragaman hayati, perlindungan lingkungan, penelitian kegiatan konservasi, pengembangan air laut untuk kegiatan budidaya perikanan, penelitian dan pengembangan perikanan, pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP), penetapan tempat labuh, pembangunan dan pengoperasian jetty
2. Zona Pelabuhan laut diperbolehkan untuk Perlindungan keanekaragaman hayati, Penyelamatan dan perlindungan lingkungan, Penelitian kegiatan Konservasi, Pembangunan Sarana Bantu, Navigasi Pelayaran (SBNP) Penetapan tempat labuh, Penetapan tempat alih muat antar kapal, Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, Pembangunan pemecah gelombang (*breakwater*), Pembangunan turap (*revetment*), pembangunan *groin*, Penetapan alur pelayaran, dari dan ke pelabuhan, Uji coba kapal Usaha pelayaran perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring.
3. Zona pelabuhan perikanan diperbolehkan untuk Perlindungan keanekaragaman hayati; Penyelamatan dan perlindungan lingkungan, Penelitian kegiatan konservasi, Pendidikan kegiatan konservasi, Survei dan/atau penelitian ilmiah, Pelepasan jangkar, Penggunaan galah untuk mendorong perahu, Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia, Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil, Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia, Bongkar muat ikan, Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), Penetapan tempat labuh, Penetapan tempat alih muat antar kapal, Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, pembangunan Tempat perbaikan kapal - Pembangunan TPI - Pembangunan breakwater (pemecah gelombang) - Pembangunan turap (*revetment*) - pembangunan groin; Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan, Usaha pelayaran logistik dan perbekalan kapal perikanan, Pembangunan dermaga perikanan, Pembangunan dan pengoperasian Jetty, Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut, Usaha pelayaran jasa pemanduan kapal, Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka, Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (*cargo and fuel transferring*), Penarikan (*Towing*), Pengapungan (*refloating*), Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan.
4. Zona pengelolaan ekosistem diperbolehkan Usaha wisata edukasi, usaha wisata tontonan, Usaha wisata memancing, Usaha wisata alam perairan, Jasa Wisata Tirta (bahari), Pengambilan foto/video bawah laut, Penanaman tanaman bakau dan nipah, Perlindungan keanekaragaman hayati, Penyelamatan dan perlindungan lingkungan, Penelitian kegiatan, konservasi Penelitian dan pengembangan perikanan, Pendidikan kegiatan konservasi, Survei dan/atau penelitian ilmiah, Budidaya mangrove, Budidaya Silvofishery
5. Zona Pertambangan mineral dan batu diperbolehkan penangkapan ikan dengan kapasitas kapal < 10GT
6. Zona perikanan tangkap diperbolehkan Usaha wisata edukasi, Usaha wisata dayung, Usaha wisata selam, Usaha wisata memancing, usaha wisata selancar, Usaha wisata olahraga tirta, Usaha dermaga wisata, Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi, Usaha wisata ekstrim (beresiko

tinggi), Usaha angkutan laut wisata dalam negeri, Usaha angkutan laut internasional wisata, Usaha jasa perjalanan wisata, Usaha vila (cottage) di atas laut, Usaha wisata snorkeling, Usaha wisata tontonan, Usaha wisata berenang, Usaha restoran di atas laut, Usaha wisata alam perairan, Jasa Wisata Tirta (bahari), Pengambilan foto/video bawah laut, Penanaman tanaman bakau dan nipah, Budidaya mangrove, Perlindungan keanekaragaman hayati, Penyelamatan dan perlindungan lingkungan, Penelitian kegiatan, konservasi, Pendidikan kegiatan, konservasi, Survei dan/atau penelitian ilmiah, Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan, mangrove (madu; getah daun; buah dan biji; tannin, ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya). Penangkapan ikan dengan kapal, Pelepasan jangkar, Penggunaan galah untuk, mendorong perahu, Usaha pembudidayaan ikan laut, Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industry , Usaha budidaya perikanan , terapung (jaring apung dan pen system seluas  $\geq 5$  Ha dengan jumlah 1000 unit. Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia, Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil, Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik, Pemasangan rumpon perairan dalam, Pemasangan rumpon perairan dangkal, Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia, Penangkapan ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya, Penangkapan ikan menggunakan Long bag set net (jaring kantong besar), Penangkapan ikan menggunakan Squid Jigging, Penangkapan ikan menggunakan Pancing Prawe Dasar, Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna), Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line, Penangkapan ikan menggunakan Bubu/Muroami dan sejenisnya, Penangkapan ikan menggunakan Bouke Ami, Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung, Penelitian dan pengembangan perikanan, Kegiatan pengujian kapal, perikanan/perahu ikan bermotor, Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan, Pembangunan dermaga perikanan, Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring), Penarikan (Towing), Pengapungan (refloating), Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industry Biofarmakologi / Bioteknologi Laut, Pemanfaatan dan pengambilan air laut untuk kegiatan budidaya.

7. Zona perikanan budidaya diperbolehkan untuk diperbolehkan untuk Usaha wisata edukasi, Usaha dermaga wisata, Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi, Usaha jasa perjalanan wisata, Usaha wisata tontonan, Usaha wisata alam perairan, Jasa Wisata Tirta (bahari), Pengambilan foto/video bawah laut, Penanaman tanaman bakau dan nipah, Budidaya mangrove, Perlindungan keanekaragaman hayati, Penyelamatan dan perlindungan lingkungan, Penelitian kegiatan konservasi, Pendidikan kegiatan konservasi, Survei dan/atau penelitian ilmiah, Pemungutan hasil hutan, bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah, daun; buah dan biji; tannin, ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya), Usaha pembudidayaan ikan laut, Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industry, Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen system seluas  $\geq 5$  Ha dengan jumlah 1000 unit, Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi, Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal, Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia, Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil, Budidaya Ikan hasil rekayasa genetic, Pemasangan Keramba Jaring Apung, Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup, Berbendera Indonesia, Penelitian dan pengembangan perikanan, Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan, Pembangunan dermaga perikanan, Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan

industry, Biofarmakologi / Bioteknologi Laut, Pemanfaatan dan pengambilan air laut untuk kegiatan budidaya Pembangunan sarana prasarana pendukung budidaya.

8. Zona industry diperbolehkan Perlindungan keanekaragaman hayati, - Penyelamatan dan perlindungan lingkungan, Penelitian kegiatan konservasi, Pendidikan kegiatan konservasi, Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industry, Penelitian dan pengembangan perikanan, Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor, Penetapan tempat labuh, Pembangunan Tempat perbaikan kapal. Usaha bongkar muat barang, pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan, Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving, Dock Kapal, Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan, Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal, Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya, Kegiatan pekerjaan, penyelaman (diving works dalam rangka industry maritim), Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka, Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring), - Penarikan (Towing), Pengapungan (refloating).
9. Zona fasilitas umum diperbolehkan Usaha wisata alam perairan, Jasa Wisata Tirta (bahari), Penanaman tanaman bakau, Usaha dermaga wisata, Usaha dermaga perikanan, Perlindungan keanekaragaman hayati, Penyelamatan dan perlindungan lingkungan, Penelitian kegiatan konservasi, Pendidikan kegiatan konservasi, Kolam pendidikan maritim, Budidaya mangrove, Pengambilan air laut untuk kegiatan budidaya perikanan, Penelitian dan pengembangan perikanan, Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), Penetapan tempat labuh, Pembangunan dan pengoperasian Jetty, Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka, Mitigasi Bencana dan Kondisi darat di laut.
10. Zona pertahanan dan keamanan diperbolehkan Penelitian dan pengembangan perikanan Kelautan Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), Penetapan tempat labuh, Pembangunan dan pengoperasian Jetty, Penyelamatan dan perlindungan lingkungan, Penanaman tanaman bakau, perlindungan keanekaragaman hayati, pengambilan air laut untuk kegiatan budidaya perikanan, mitigasi bencana dan kondisi dadrut di laut,
11. Zona perdagangan barang dan atau jasa diperbolehkan Usaha wisata memancing, Usaha jasa perjalanan wisata, Usaha wisata snorkeling, Usaha wisata alam perairan, Penanaman tanaman bakau, Jasa Wisata Tirta (bahari), Perlindungan keanekaragaman hayati, penelitian kegiatan Konservasi, Pendidikan kegiatan konservasi, pengambilan air laut untuk kegiatan budidaya perikanan, penelitian dan pengembangan perikanan kelautan, Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) - Penetapan tempat labuh, Pembangunan dan pengoperasian Jetty.
12. Zona kawasan konservasi terdiri dari Zona inti : Penanaman tanaman bakau, Perlindungan keanekaragaman hayati, Penyelamatan dan perlindungan lingkungan, Penelitian kegiatan konservasi, Zona Perikanan Berkelanjutan, Usaha wisata edukasi, Usaha wisata dayung, Usaha wisata selam, Usaha wisata memancing, Usaha wisata selancar, Usaha wisata snorkeling, Usaha wisata tontonan, Usaha wisata berenang, Penanaman tanaman bakau dan nipah, Perlindungan keanekaragaman hayati, Penyelamatan dan perlindungan lingkungan, Penelitian kegiatan konservasi, Pendidikan kegiatan konservasi, Survei dan/atau penelitian ilmiah, Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal < 10GT. Zona Pemanfaatan Terbatas KKP : Usaha wisata edukasi,

Usaha wisata dayung, Usaha wisata selam, Usaha wisata memancing, Usaha wisata selancar, Usaha wisata snorkeling, Usaha wisata tontonan, Usaha wisata berenang, Penanaman tanaman bakau dan nipah, Perlindungan keanekaragaman hayati, Penyelamatan dan perlindungan lingkungan, Penelitian kegiatan konservasi, Pendidikan kegiatan konservasi, Survei dan/atau penelitian ilmiah, penangkapan ikan dengan kapasitas kapal < 10GT.

Pulau – Pulau kecil provinsi dalam batas wilayah perencanaan RZWP3K berjumlah 332 Pulau meliputi :

Tabel. 2.36.  
Jumlah pulau yang tersebar di beberapa kabupaten/kota

No	Kabupaten/Kota	Tidak Berpenduduk (TBP)	Berpenduduk (BP)	Jumlah Total Pulau
1	Kabupaten Kepulauan Selayar	108	23	131
2	Kabupaten Bulukumba	4	1	5
3	Kabupaten Jeneponto	-	1	1
4	Kabupaten Takalar	1	8	9
5	Kabupaten Sinjai	2	8	10
6	Kabupaten Bone	2	-	2
7	Kabupaten Pangkajene Kepulauan	76	64	140
8	Kabupaten Barru	7	2	9
9	Kabupaten Pinrang	4	0	4
10	Kabupaten Luwu Timur	4	0	4
11	Kabupaten Luwu Utara	1	0	1
12	Kota Makassar	3	11	14
13	Kota Palopo	0	1	1
14	Sulawesi Selatan	1	0	1
	<b>Jumlah total Pulau</b>	<b>213</b>	<b>119</b>	<b>332</b>

Sumber : perda nomor 3 tahun 2022



## **BAB IV**

# **PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

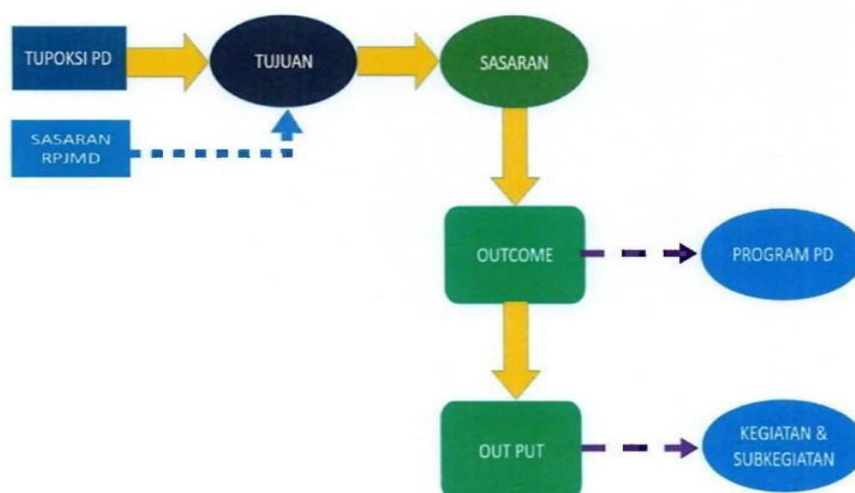
## BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

### 4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program kegiatan merupakan penjabaran dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh instansi pemerintah. Program dan kegiatan akan dilaksanakan secara tahunan melalui penajaman pada sub kegiatan yang memuat rincian rencana aksi yang berkorelasi pada pencapaian target indikator kinerja organisasi pemerintah daerah. Dalam program kerja tercantum program prioritas yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana Capaian Kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, kegiatan dan sub kegiatan terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi.

Kegiatan dan sub kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan organisasi perangkat daerah. Penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan periode tahun 2025 – 2029, terfokus pada perencanaan operasional berbasis *money follow program* yang menekankan pada perencanaan untuk pencapaian kinerja berdasarkan bobot program / kegiatan sesuai dengan tujuan pembangunan. Sehingga program yang memberikan manfaat yang besar pada masyarakat akan mendapatkan prioritas utama dalam pengalokasikan anggaran. Program, Kegiatan dan sub kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcomes dan output, dan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 900.9.15.5-3406 Tahun 2024.

Gambar.4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD



Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disusun berdasarkan penjabaran tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah, dimana tujuan dan sasaran perangkat daerah menjadi tanggung jawab kepala perangkat daerah (eselon II). Sedangkan pencapaian outcome suatu program menjadi tanggung jawab kepala bidang/kepala bagian (eselon III). Untuk pencapaian output kegiatan dan sub kegiatan menjadi tanggung jawab kepala sub bagian/ kepala seksi (eselon IV) sedangkan staf pelaksana bertanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan kegiatan (input dan proses). Adapun implementasi pelaksanaan tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang mendukung pencapaian keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan akan dilaksanakan dengan program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
3. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
4. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
5. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
6. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Penjabaran program yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan sebagaimana data pada tabel 4.1 Berikut ini :

**Tabel 4.1**  
**Program, kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan**

NSPK	Tujuan	Sasaran	Outcomes	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
Mewujudkan ekonomi biru melalui perlindungan Laut dan perairan Umum daratan beserta sumberdayanya dalam pengeloaan dan pemanfaatan yang ramah lingkungan serta berkelanjutan	Peningkatan produktivitas ekonomi sektor kelautan dan perikanan				Laju Pertumbuhan PDRB sektor Perikanan		
		Sasaran 1 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan produktivitas sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan			Kontribusi PDRB Perikanan terhadap PDRB Sulsel		
					Volume Produksi Perikanan		
					Angka Konsumsi Ikan		

NSPK	Tujuan	Sasaran	Outcomes	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
					Nilai Tukar Nelayan (NTN)		
					Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi)		
PP Nomor 11 - Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur — regulasi yang bertujuan mengatur kegiatan penangkapan ikan agar berkelanjutan, tidak merusak sumber daya, dan dapat memberikan nilai ekonomi maksimal.			Meningkatnya produksi perikanan tangkap		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
				Terlaksananya Pengelolaan Penangkapan Ikan di	Persentase peningkatan produksi nelayan perairan laut yang mendapatkan fasilitas dan pembinaan	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	

NSPK	Tujuan	Sasaran	Outcomes	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
				Laut Sampai Dengan 12 Mil			
					Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Dokumen)	Sub Kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	
					Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Unit)	Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	
					Jumlah rekomendasi Surat izin penempatan rumpun yang diterbitkan (rekomendasi)	Sub Kegiatan : Penerbitan rekomendasi surat izin penempatan rumpun (SIPR)	
					Jumlah prasarana pendukung yang tersedia untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur (Unit)	Sub Kegiatan : Pengadaan prasarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	

NSPK	Tujuan	Sasaran	Outcomes	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
					Jumlah sarana pendukung yang tersedia untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur (unit)	Sub Kegiatan : Pengadaan sarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	
					Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (unit)	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	
				Meningkatnya Produksi Nelayan Perairan Umum Daratan Yang Telah Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan	Persentase peningkatan produksi nelayan perairan umum daratan yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	

NSPK	Tujuan	Sasaran	Outcomes	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
					Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat (Dokumen)	Sub Kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	
					Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat (unit)	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	
				Meningkatnya jumlah Kapal Perikanan Berukuran Diatas 10 GT = 30 GT yang memiliki ijin usaha	Persentase kapal perikanan berukuran diatas 10 GT-30 yang terbit izin usahanya	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	

NSPK	Tujuan	Sasaran	Outcomes	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
					Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil (Persentase)	Sub Kegiatan : Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	
					Jumlah data dan informasi perizinan usaha untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil yang tersedia (dokumen)	Sub Kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	

NSPK	Tujuan	Sasaran	Outcomes	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
				Meningkatnya kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT yang beroperasi di wilayah perairan umum daratan yang memiliki tanda daftar kapal	Persentase Tanda Daftar Kapal perikanan yang terbit berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan (dokumen)	Sub Kegiatan : Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	
					Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang ditetapkan (dokumen)	Sub Kegiatan : Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan	

NSPK	Tujuan	Sasaran	Outcomes	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
						Berukuran sampai dengan 5 GT	
				Meningkatnya jumlah pelabuhan perikanan yang memenuhi standar operasional	Persentase pelabuhan perikanan yang memenuhi standar operasional	Kegiatan : Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	
					Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan (pelabuhan perikanan)	Sub Kegiatan : Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (unit)	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	
					Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana (layanan)	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	

NSPK	Tujuan	Sasaran	Outcomes	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
				Meningkatnya jumlah pengadaan kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 10 GT - 30 GT	Persentase izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang terbit (Jumlah izin yang keluar/Jumlah nelayan yang difasilitasi untuk permohonan izin)	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	
					Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan (Rekomendasi)	Sub Kegiatan : Penerbitan surat rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)	
				Meningkatnya jumlah kapal perikanan diatas 10 GT sampai 30 GT yang terdaftar	Persentase kapal perikanan diatas 10 GT sampai dengan 30 GT yang terdaftar (jumlah kapal yang terdaftar/jumlah permohonan yang mengajukan pendaftaran)	Kegiatan : Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	
					Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan (Rekomendasi)	Sub Kegiatan : Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	

NSPK	Tujuan	Sasaran	Outcomes	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permen KKP No. 32 Tahun 2024 tentang Sistem Ketelusuran dan Logistik Ikan Nasional yang mengatur ketentuan umum, pelaksanaan sistem logistik dan ketelusuran ikan secara nasional.</li> <li>- Permen KKP No. 58 Tahun 2021 tentang Sistem Logistik Ikan Nasional</li> <li>- Permen KP Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan</li> </ul>			Meningkatnya produksi perikanan budidaya		Produksi Perikanan Budidaya (ton)	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	

NSPK	Tujuan	Sasaran	Outcomes	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
lobster, kepiting dan rajungan — regulasi khusus untuk komoditas bernilai tinggi, penting untuk pengembangan komoditas ekspor dan hilirisasi. KKP							
				Meningkatnya usaha perikanan pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi yang	Persentase penerbitan izin usaha perikanan pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi (jumlah izin yang terbit/jumlah rekomendasi yang diterbitkan)	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	

NSPK	Tujuan	Sasaran	Outcomes	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
				memiliki izin usaha			
					Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan (Rekomendasi)	Sub Kegiatan : Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	
					Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko (Dokumen)	Sub Kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	
				Meningkatnya Jumlah Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah	Persentase tanda daftar bagi pembudidaya ikan kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah di Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	

NSPK	Tujuan	Sasaran	Outcomes	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
				Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang memiliki tanda daftar			
					Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudi Daya Ikan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Rekomendasi)	Sub Kegiatan : Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
					Persentase peningkatan produksi pembudidaya ikan di laut yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan	Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	

NSPK	Tujuan	Sasaran	Outcomes	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
					Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (dokumen)	Sub Kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut (unit)	Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	
					Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut (unit)	Sub Kegiatan : Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	
					Jumlah Pembudidaya (orang)	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	

NSPK	Tujuan	Sasaran	Outcomes	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
					Jumlah Pembudidaya Ikan yang memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan (unit)	Sub Kegiatan : Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia (unit)	Sub Kegiatan : Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (dokumen)	Sub Kegiatan : Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya pengelolaan laut, pesisir dan sumberdaya kelautan perikanan yang berkelanjutan		Meningkatnya Produksi Pembudidaya di darat Yang Telah	Persentase pemanfaatan sarana pembudidaya ikan di perairan darat	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	

NSPK	Tujuan	Sasaran	Outcomes	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
				Mendapatkan Fasilitas dan Pembinaan			
					Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota (unit)	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota (unit)	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
Permen KKP Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan produktivitas sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan dan nilai		Produksi Olahan Hasil Perikanan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
				Nilai Ekonomi Hasil Perikanan (Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Pengolahan)			

NSPK	Tujuan	Sasaran	Outcomes	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan — mengatur kewenangan pengendalian mutu & keamanan hasil perikanan dari hulu ke hilir			ekonomi hasil perikanan yang memenuhi standar mutu keamanan hasil perikanan		Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan yang memenuhi standar mutu keamanan pangan		
				Meningkatnya Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah	Persentase Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	

NSPK	Tujuan	Sasaran	Outcomes	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
				Provinsi yang memiliki izin usaha			
					Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko (dokumen)	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah rekomendasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko (rekomedasi)	Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	

NSPK	Tujuan	Sasaran	Outcomes	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
					Penetapan Persyaratan dan Prosedur Perizinan Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Berusaha Surat Izin Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan yang diterbitkan (dokumen)	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Menengah dan Besar dengan Penanaman Modal Dalam Negeri	
					Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar (rekomendasi)	Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar	
					Persentase produksi UPI yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	

NSPK	Tujuan	Sasaran	Outcomes	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
					Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing (kegiatan)	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	
					Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	

NSPK	Tujuan	Sasaran	Outcomes	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
					saing berdasarkan skala usaha dan risiko (kegiatan)		
					Persentase ketersediaan bahan baku industri pengolahan ikan lintas daerah Kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (dokumen)	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan bahan baku usaha pengolahan dan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku	

NSPK	Tujuan	Sasaran	Outcomes	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
					pemasaran ikan (ton)		
					Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan yang terkoneksi dari (sistem informasi) hulu sampai hilir	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dari hulu sampai hilir	
					Persentase UPI yang mendapatkan pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran	Pembinaan Teknis Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan untuk Skala Usaha Menengah dan Skala Usaha Besar dengan Penanaman Modal Dalam Negeri	
					Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan skala usaha menengah dan besar dengan penanaman modal dalam negeri (unit usaha)	Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan skala usaha menengah dan besar dengan penanaman modal dalam negeri	

NSPK	Tujuan	Sasaran	Outcomes	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
					Persentase hasil pengujian Mutu dan keamanan hasil perikanan (Jumlah Produk yang lulus hasil uji dan aman/Total Produk Diuji) × 100%	Pengujian Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan untuk Skala Usaha Menengah dan Skala Usaha Besar dengan Penanaman Modal Dalam Negeri	
					Jumlah sampel yang diuji mutu dan keamanannya (sampel)	Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha menengah dan besar dengan penanaman modal dalam negeri	
					Persentase UPI yang mendapatkan bantuan sarpras usaha pengolahan dan pemasaran	Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan	

NSPK	Tujuan	Sasaran	Outcomes	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
					Jumlah prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan yang difasilitasi penyediaannya dan dimanfaatkan (unit)	Fasilitasi Penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha menengah dan besar	
					Persentase rekomendasi SKP yang terbit (jumlah SKP yang terbit/jumlah rekomendasi SKP yang diusulkan)	Penerbitan rekomendasi sertifikat kelayakan pengolahan/sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha menengah dan skala usaha besar	

NSPK	Tujuan	Sasaran	Outcomes	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
					Jumlah rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan/Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha menengah dan skala usaha besar yang diterbitkan (rekomendasi)	Penerbitan rekomendasi sertifikat kelayakan pengolahan/sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha menengah dan skala usaha besar	
		<b>Sasaran 2 Meningkatnya perlindungan laut, pesisir dan sumberdaya kelautan dan perikanan</b>			<b>Luas kawasan konservasi perairan yang ditetapkan dan yang efektif dikelola (Ha)</b>		
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Kawasan Konservasi di Perairan Wilayah Pulau Panikiang,			Persentase Luas Kawasan Pesisir dan Konservasi Yang Dikelola secara berkelanjutan			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	

NSPK	Tujuan	Sasaran	Outcomes	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
Sulawesi Selatan — kawasan konservasi berdampak ke pengelolaan sumber daya perairan di Sulsel, perlu diperhitungkan dalam zonasi, konservasi & pemanfaatan							
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pencadangan Kawasan Konservasi di Perairan di Laut Sulawesi yang memuat regulasi mengenai							

NSPK	Tujuan	Sasaran	Outcomes	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
kawasan yang akan dijadikan konservasi, yang juga akan berdampak pada pemanfaatan kelautan/perikanan.							
PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut — terkait aspek lingkungan dan pengelolaan pesisir yang juga memengaruhi produktivitas laut.							
				Meningkatnya luas kawasan konservasi	Persentase kawasan konservasi yang dikelola (luas kawasan yang ditetapkan/total luas kawasan sesuai RTRW)	Kegiatan : Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	

NSPK	Tujuan	Sasaran	Outcomes	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
				yang dikelola			
					Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha)	Sub Kegiatan : Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	
					Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Ha)	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Ha)	
					Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (orang)	Sub Kegiatan : Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
					Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K	Sub Kegiatan Penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir dan Pulau-	

NSPK	Tujuan	Sasaran	Outcomes	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
						pulau Kecil/Dokumen Final RZWP-3-K/	
					Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir yang menginformasikan perwujudan ruang sesuai Materi Teknis Perairan Pesisir/ dalam Perda RTRWP (dokumen)	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir	
					Jumlah kegiatan turnamen memancing yang sudah memperoleh persetujuan memancing dan diselenggarakan di wilayah yang menjadi kewenangan Provinsi (kegiatan)	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Turnamen Memancing mendukung Program Perikanan Terukur dan Bangga Berwisata di Indonesia	
					Peta Tematik Padang Lamun dan Mangrove di luar Kawasan Hutan (Dokumen)	Sub Kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Spasial Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove diluar	

NSPK	Tujuan	Sasaran	Outcomes	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
						kawasan hutan (Dokumen)	
					Kelompok masyarakat yang meningkat kapasitasnya terkait pengelolaan pengelolaE kosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove diluar kawasan hutan (kelompok)	Sub Kegiatan : Peningkatan kapasitas masyarakat pengelola ekosistem blue carbon (kelompok Masyarakat)	
					Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam (kelompok)	Sub Kegiatan : Pelibatan masyarakat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam	
					Jumlah Volume produksi garam lokal pada SEGAR (ton)	Sub Kegiatan : Pengelolaan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	
					Jumlah rekomendasi prioritas dan desain pembangunan prasarana	Sub Kegiatan : Penetapan Rekomendasi Prioritas dan Desain	

NSPK	Tujuan	Sasaran	Outcomes	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
					usaha pergarman yang ditetapkan (dokumen)	pembangunan prasarana usaha pergarman	
					Jumlah data dan Informasi pergarman yang tersedia (Dokumen)	Sub Kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Pergarman	
						Kegiatan Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	
					Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan	Sub Kegiatan :Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	
					Jumlah database perizinan Berusaha yang dicatat atau didokumentasikan	Sub Kegiatan : Pencatatan dan Pengadministrasian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir dan Laut sebagai data base perizinan berusaha	

NSPK	Tujuan	Sasaran	Outcomes	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
					Jumlah kelompok masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang aktif dalam pengelolaan SD kelautan dan perikanan (kelompok sasaran yaitu pembinaan kelompok usaha, pokmaswas, kompak yang tidak aktif)	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
					Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (orang)	Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
					Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (kelompok)	Sub Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
					Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta	Sub Kegiatan : Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta	

NSPK	Tujuan	Sasaran	Outcomes	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
					Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (kelompok)	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
					Jumlah Sarana Usaha Pergaraman yang tersedia (unit)	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Usaha Pergaraman	
					Jumlah Unit Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan yang difasilitasi Kemitraan Usaha (unit usaha)	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Fasilitas Akses Kemitraan Usaha	
					Jumlah Prasarana Usaha Pergaraman yang tersedia(unit)	Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana Usaha Pergaraman	
					Persentase luas pencadangan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau pulau kecil	Pencadangan Kawasan Konservasi	
					Luasan pencadangan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang teridentifikasi dan terinventarisasi	Pencadangan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	

NSPK	Tujuan	Sasaran	Outcomes	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
		<b>Sasaran 2 Meningkatnya perlindungan laut, pesisir dan sumberdaya kelautan dan perikanan</b>			<b>Persentase kepatuhan pelau usaha kelautan dan perikanan</b>		
			Meningkat nya kelestarian laut melalui pengawasa n sumberday a kelautan dan perikanan		Cakupan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	
				Meningkat nya Pengawasa n Pemanfaat an Sumberday a Kelautan dan dan Perikanan Sampai dengan 12 Mil	Persentase Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	

NSPK	Tujuan	Sasaran	Outcomes	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
					Jumlah perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan (perkara) Provinsi yang ditangani	Penanganan perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk (orang)	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
					Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan (hari operasi)	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	
					Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang dirawat (unit)	Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	
					Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang diadakan (unit)	Pengadaan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	

NSPK	Tujuan	Sasaran	Outcomes	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
					Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi (pelaku usaha)	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	
					Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi (pelaku usaha)	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	
					Jumlah Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibangun (unit)	Pembangunan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
					Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi (pelaku usaha)	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	

NSPK	Tujuan	Sasaran	Outcomes	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
					Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan (kelompok masyarakat)	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	
					Jumlah Forum Koordinasi Penanganan TPKP tingkat Daerah yang dilaksanakan (forum)	Koordinasi Penanganan Tindakan Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) tingkat Daerah	
				Meningkatnya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam	Persentase Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	

NSPK	Tujuan	Sasaran	Outcomes	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
				1 (Satu) Daerah Provinsi			
					Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi (pelaku usaha)	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	
					Jumlah pelaku usaha Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diriksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi (pelaku usaha)	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	
					Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diperiksa kepatuhannya	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	

NSPK	Tujuan	Sasaran	Outcomes	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
					sesuai kewenangan provinsi (pelaku usaha)		
				Meningkatnya Pengawasan pemanfaatan kawasan konservasi yang terawasi	Persentase kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi yang terawasi	Pengawasan Pelaksanaan Pemanfaatan Kawasan Konservasi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah kegiatan pemanfaatan Kawasan Konservasi yang dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terawasi (kegiatan)	Pengawasan pelaksanaan pemanfaatan Kawasan Konservasi yang dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
		Sasaran 3 Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel			Nilai Sakip Perangkat Daerah		

NSPK	Tujuan	Sasaran	Outcomes	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
			Terpenuhinya Layanan penunjang perangkat daerah yang mendukung tugas dan fungsi		Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
					Persentase Penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	

NSPK	Tujuan	Sasaran	Outcomes	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
					Perubahan RKA-SKPD (dokumen)		
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (dokumen)	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (dokumen)	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	

NSPK	Tujuan	Sasaran	Outcomes	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
					Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusanyang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Persentase penyusunan laporan keuangan perangkat daerah yang diselesaikan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan (Dokumen) SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	

NSPK	Tujuan	Sasaran	Outcomes	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut (Dokumen) Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (Laporan) Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	

NSPK	Tujuan	Sasaran	Outcomes	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
					Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan )	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	

NSPK	Tujuan	Sasaran	Outcomes	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (dokumen)	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	
					Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (dokumen)	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (laporan)	Pengolahan Data Retribusi Daerah	
					Persentase layanan kepegawaian perangkat daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (unit)	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (paket)	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan	Pendataan dan Pengolahan	

NSPK	Tujuan	Sasaran	Outcomes	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
					Pengolahan Administrasi Kepegawaian (dokumen)	Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (dokumen)	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (dokumen)	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Persentase penyediaan layanan umum kantor	Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK	Tujuan	Sasaran	Outcomes	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi (laporan) SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	

NSPK	Tujuan	Sasaran	Outcomes	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
					Dinamis pada SKPD (dokumen)		
					Persentase Pengadaan BMD	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (unit)	Pengadaan Mebel	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (unit)	Pengadaan Aset Tak Berwujud	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Persentase penyediaan jasa penunjang perangkat daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

NSPK	Tujuan	Sasaran	Outcomes	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (laporan)	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
					Persentase terpeliharanya BMD	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

NSPK	Tujuan	Sasaran	Outcomes	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (unit)	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Penjabaran Indikator kinerja program, kegiatan sub kegiatan dan pendanaan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan sebagaimana data pada tabel 4.2 berikut ini :

**Tabel 4.2**  
**Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	INDIKATOR OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					85,730,091,036		#VALUE!		83,032,704,778		165,859,434,201		166,764,353,413		167,887,075,657
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terpenuhinya Layanan penunjang perangkat daerah yang mendukung tugas dan fungsi	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi (%)	100	100	35,989,847,752.0	100	31,081,056,312	100	33,330,306,778	100	39,856,994,201	100	40,761,913,413	100	41,884,635,657
3.25.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu		100	402,113,800	100	294,501,700	100	332,160,000	100	332,160,000	100	316,900,000	100	342,000,000
3.25.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	25,602,400.00	2	9,575,500	2	12,000,000	2	12,000,000	2	14,000,000	2	15,000,000
3.25.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	7,835,600.00	1	6,955,200	1	6,860,000	1	6,860,000	1	7,000,000	1	8,000,000
3.25.01.1.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	3,184,000.00	1	7,600,800	1	3,070,000	1	3,070,000	1	5,000,000	1	6,000,000
3.25.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	6,067,600.00	1	6,200,000	1	5,330,000	1	5,330,000	1	6,000,000	1	7,000,000
3.25.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	11,196,600.00	1	6,233,500	1	9,650,000	1	9,650,000	1	9,650,000	1	10,000,000
3.25.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	11	11	307,080,200.00	5	185,909,600	5	200,000,000	5	200,000,000	5	180,000,000	5	200,000,000
3.25.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5	5	41,147,400.00	4	28,971,800	4	34,250,000	4	34,250,000	4	34,250,000	4	35,000,000

3.25.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	0		4	34,655,300	4	51,000,000	4	51,000,000	4	51,000,000	4	51,000,000
3.25.01.1.01.0009 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	0		1	8,400,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000
<b>3.25.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Meningkatnya kualitas, ketepatan waktu, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan perangkat daerah</b>	<b>Persentase penyusunan laporan keuangan perangkat daerah yang diselesaikan</b>		<b>100</b>	<b>28,585,852,314</b>	<b>100</b>	<b>27,435,056,787</b>	<b>100</b>	<b>29,804,935,276</b>	<b>100</b>	<b>34,274,219,407</b>	<b>100</b>	<b>34,777,539,327</b>	<b>100</b>	<b>35,062,162,628</b>
3.25.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	182	315	28,565,706,964.00	315	27,414,432,137	315	29,774,025,276	319	34,243,309,407	320	34,746,629,327	324	35,031,252,628
3.25.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	762,800.00	12	763,300	12	2,000,000	12	2,000,000	12	2,000,000	12	2,000,000
3.25.01.1.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	12	540,900.00	12	540,900	12	1,000,000	12	1,000,000	12	1,000,000	12	1,000,000
3.25.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	828,800.00	1	828,800	1	1,280,000	1	1,280,000	1	1,280,000	1	1,280,000
3.25.01.1.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2	2	676,250.00	2	676,250	2	1,130,000	2	1,130,000	2	1,130,000	2	1,130,000
3.25.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	18	17,336,600.00	18	17,336,600	18	25,000,000	18	25,000,000	18	25,000,000	18	25,000,000
3.25.01.1.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0	0	0	1	478,800	1	500,000	1	500,000	1	500,000	1	500,000
<b>3.25.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik</b>		<b>100</b>	<b>9,352,300</b>	<b>100</b>	<b>9,268,300</b>	<b>100</b>	<b>14,330,000</b>	<b>100</b>	<b>14,330,000</b>	<b>100</b>	<b>14,330,000</b>	<b>100</b>	<b>14,330,000</b>
3.25.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	228,300.00	1	228,300	1	680,000	1	680,000	1	680,000	1	680,000

3.25.01.1.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	6,962,000.00	1	4,782,000	1	5,200,000	1	5,200,000	1	5,200,000	1	5,200,000
3.25.01.1.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1	0		1	2,141,000	1	3,450,000	1	3,450,000	1	3,450,000	1	3,450,000
3.25.01.1.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	2	2,162,000.00	2	2,117,000	2	2,600,000	2	2,600,000	2	2,600,000	2	2,600,000
3.25.01.1.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0		0	0,00	1	2,400,000	1	2,400,000	1	2,400,000	1	2,400,000
<b>3.25.01.1.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase capaian target pendapatan perangkat daerah</b>		<b>100</b>	<b>8,150,000</b>	<b>100</b>	<b>8,273,200</b>	<b>100</b>	<b>12,750,000</b>	<b>100</b>	<b>12,750,000</b>	<b>100</b>	<b>12,750,000</b>	<b>100</b>	<b>12,750,000</b>
3.25.01.1.04.0001 - Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1	1	8150000	1	7,265,200	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000
3.25.01.1.04.0004 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	0	0		1	1,008,000	1	2,750,000	1	2,750,000	1	2,750,000	1	2,750,000
<b>3.25.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase layanan kepegawaian perangkat daerah</b>		<b>100</b>	<b>27,688,750</b>	<b>100</b>	<b>80,933,400</b>	<b>100</b>	<b>57,892,360</b>	<b>100</b>	<b>58,351,720</b>	<b>100</b>	<b>58,811,080</b>	<b>100</b>	<b>59,270,440</b>
3.25.01.1.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	1	1	10,265,000.00	1	6,849,600	1	10,724,000	1	10,724,000	1	10,724,000	1	10,724,000
3.25.01.1.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	12	1,372,000.00	12	14,857,800	12	1,830,000	12	1,830,000	12	1,830,000	12	1,830,000
3.25.01.1.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	12	12	1,475,350.00	12	200,000	12	659,000	12	659,000	12	659,000	12	659,000
3.25.01.1.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	12	12	13,764,400.00	12	49,026,000	12	14,220,000	12	14,220,000	12	14,220,000	12	14,220,000
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			812,000.00										
3.25.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	0		3	10,000,000	3	30,459,360	3	30,918,720	3	31,378,080	3	31,837,440
<b>3.25.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase penyediaan layanan umum kantor</b>		<b>100</b>	<b>287,696,918</b>	<b>100</b>	<b>160,531,000</b>	<b>100</b>	<b>153,922,000</b>	<b>100</b>	<b>553,922,000</b>	<b>100</b>	<b>753,922,000</b>	<b>100</b>	<b>853,922,000</b>
3.25.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	3	6,269,200.00	3	6,269,200	5	8,000,000	5	8,000,000	5	8,000,000	5	8,000,000
3.25.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	30	10	35,251,718.00	17	40,252,300	17	25,568,000	17	125,568,000	17	225,568,000	17	225,568,000

3.25.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	28	1	1,956,800.00	1	1,956,800	1	2,416,000	1	2,416,000	1	2,416,000	1	2,416,000
3.25.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10	10	26,229,900.00	2	23,590,000	3	9,789,000	3	9,789,000	3	9,789,000	3	9,789,000
3.25.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	16,067,400.00	12	10,047,900	12	10,507,000	12	10,507,000	12	10,507,000	12	10,507,000
3.25.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	201,547,300.00	12	78,040,200	12	96,809,000	12	396,809,000	12	496,809,000	12	596,809,000
3.25.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	374,600.00	1	374,600	1	833,000	1	833,000	1	833,000	1	833,000
<b>3.25.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase Pengadaan BMD</b>		<b>0</b>		<b>100</b>	<b>47,000,000</b>	<b>100</b>	<b>70,000,000</b>	<b>100</b>	<b>270,000,000</b>	<b>100</b>	<b>370,000,000</b>	<b>100</b>	<b>470,000,000</b>
3.25.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	2		-	5	5,000,000	5	30,000,000	5	130,000,000	5	230,000,000	5	230,000,000
3.25.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0		-	2	10,000,000	2	20,000,000	12	120,000,000	12	120,000,000	22	220,000,000
3.25.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	-	1	32,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000
<b>3.25.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase penyediaan jasa penunjang perangkat daerah</b>		<b>100</b>	<b>6,598,969,470</b>	<b>100</b>	<b>2,778,964,925</b>	<b>100</b>	<b>2,730,187,142</b>	<b>100</b>	<b>3,837,131,074</b>	<b>100</b>	<b>4,239,531,066</b>	<b>100</b>	<b>4,666,070,589</b>
3.25.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	848,196,718.00	12	826,835,925	12	821,744,950	12	922,342,522	12	1,022,940,094	12	1,123,537,667
3.25.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		12	27,545,000.00	12	7,100,000	12	7,560,000	12	13,447,000	12	14,790,000	12	21,714,000
3.25.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	139	139	5,723,227,752.00	6	1,945,029,000	6	1,900,882,192	6	2,901,341,552	6	3,201,800,912	6	3,520,818,922
<b>3.25.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase terpeliharanya BMD</b>		<b>100</b>	<b>70,024,200</b>	<b>100</b>	<b>266,527,000</b>	<b>100</b>	<b>154,130,000</b>	<b>100</b>	<b>504,130,000</b>	<b>100</b>	<b>218,130,000</b>	<b>100</b>	<b>404,130,000</b>
3.25.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	17	17	39,214,400.00	17	66,527,000	17	28,000,000	17	28,000,000	17	28,000,000	17	28,000,000

3.25.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	11	11	16,993,800.00	11	30,000,000	11	16,130,000	11	16,130,000	11	16,130,000	11	16,130,000
3.25.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tertaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	0		10	20,000,000	10	20,000,000	10	20,000,000	10	20,000,000	10	20,000,000
3.25.01.1.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Tertaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	1	0		1	5,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000
3.25.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tertaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	3,816,000.00	1	125,000,000	1	50,000,000	4	400,000,000	1	104,000,000	2	300,000,000
3.25.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tertaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	10,000,000.00	2	20,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	2	20,000,000	1	10,000,000
<b>3.25.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>	<b>Meningkatnya perlindungan laut dan sumberdayanya melalui pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil</b>	<b>Persentase Luas Kawasan Pesisir dan Konservasi Yang Dikelola secara berkelanjutan (%)</b>	<b>68,05</b>	<b>97,60</b>	<b>15,832,830,800</b>	<b>99,66</b>	<b>5,651,892,184</b>	<b>99,67</b>	<b>5,651,892,184</b>	<b>99,67</b>	<b>51,002,440,000</b>	<b>99,67</b>	<b>51,002,440,000</b>	<b>99,67</b>	<b>51,002,440,000</b>
<b>3.25.02.1.01 - Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</b>		<b>Persentase kawasan konservasi yang dikelola</b>		<b>97.6</b>	<b>15,584,579,900</b>	<b>99.66</b>	<b>3,717,783,000</b>	<b>99.67</b>	<b>3,717,783,000</b>	<b>99.67</b>	<b>48,041,440,000</b>	<b>99.67</b>	<b>48,399,440,000</b>	<b>88.67</b>	<b>48,287,440,000</b>
3.25.02.1.01.0002 - Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (Ha)	274.259,51	578.435,53	3,470,000.00	63.447,23	338,272,000	11.417,6	338,272,000	247.310	400,000,000	14.969	200,000,000	14.969	200,000,000
3.25.02.1.01.0003 - Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terehabilitasinya Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Ha)	10,23	35,16	13,977,830,600.00	43,60	2,706,136,000	55,62	2,706,136,000	66,85	46,157,690,000	76,08	46,815,690,000	86,31	46,703,690,000
3.25.02.1.01.0004 - Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Tertaksananya Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Orang)	0	175	230,000.00	50	10,820,000	50	10,820,000	130	120,000,000	130	120,000,000	130	120,000,000
3.25.02.1.01.0005 - Penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil/Dokumen Final RZWP-3-K/	Tersusunnya Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K	Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K (Dokumen)	1	1	1,603,049,300.00	3	320,245,000	3	320,245,000	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000
3.25.02.1.01.0006 - Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir	Tersusunnya dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir	Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir yang menginformasikan perwujudan ruang sesuai Materi Teknis Perairan Pesisir dalam Perda	0	0		1	30,000,000	1	30,000,000	1	100,000,000	0	0,00	0	0,00



<b>3.25.02.1.03 - Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>		<b>Jumlah masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang aktif dalam pengelolaan SD kelautan dan perikanan (orang)</b>		<b>80</b>	<b>247,076,300.00</b>	<b>780</b>	<b>1,932,831,184.00</b>	<b>780</b>	<b>1,932,831,184.00</b>	<b>1,030.00</b>	<b>2,959,722,000.00</b>	<b>1,020.00</b>	<b>2,601,722,000.00</b>	<b>1,030.00</b>	<b>2,713,722,000.00</b>
3.25.02.1.03.0001 - Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	90	20	244,536,300.00	600	1,447,383,200	600	1,447,383,200	700	1,750,000,000	700	1,750,000,000	700	1,750,000,000
3.25.02.1.03.0002 - Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Kelompok)	0	1	1,640,000.00	1	10,000,000	1	10,000,000	8	80,000,000	9	90,000,000	10	100,000,000
3.25.02.1.03.0004 - Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	0	5	900,000.00	10	52,580,000	10	52,580,000	10	52,580,000	10	52,580,000	10	52,580,000
3.25.02.1.03.0005 - Penyediaan Sarana Usaha Pergaraman	Tersedianya Sarana Usaha Pergaraman	Jumlah Sarana Usaha Pergaraman yang tersedia (Unit)	0	0		2	214,480,400	2	214,480,400	4	600,000,000	3	414,480,400	3	414,480,400
3.25.02.1.03.0006 - Pelaksanaan Fasilitasi Akses Kemitraan Usaha	Terlaksananya Fasilitasi Akses Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan yang difasilitasi Kemitraan Usaha (Unit Usaha)	0	0		4	4,700,000	4	4,700,000	8	10,000,000	8	10,000,000	8	10,000,000
3.25.02.1.03.0007 - Penyediaan Prasarana Usaha Pergaraman	Tersedianya Prasarana Usaha Pergaraman	Jumlah Prasarana Usaha Pergaraman yang tersedia (Unit)	0	0		1	203,687,584	1	203,687,584	3	467,142,000	2	284,661,600	2	386,661,600
<b>3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>Meningkatnya produksi perikanan tangkap</b>	<b>Produksi Perikanan Tangkap (Ton)</b>	<b>511.356,4</b>	<b>521.583,60</b>	<b>22,450,433,975</b>	<b>532.015,20</b>	<b>#VALUE!</b>	<b>542.655,50</b>	<b>37,548,972,400</b>	<b>553.508,60</b>	<b>50,000,000,000</b>	<b>564.578,7</b>	<b>50,000,000,000</b>	<b>575.870,3</b>	<b>50,000,000,000</b>
<b>3.25.03.1.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil</b>		<b>Persentase peningkatan produksi nelayan perairan laut yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan</b>		<b>20</b>	<b>17,562,173,300</b>	<b>40</b>	<b>14,817,384,600</b>	<b>60</b>	<b>14,528,384,600</b>	<b>80</b>	<b>20,415,341,700</b>	<b>100</b>	<b>21,415,341,700</b>	<b>100</b>	<b>21,415,341,700</b>
3.25.03.1.01.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Dokumen)	1	1	2,121,200.00	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000
3.25.03.1.01.0002 - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Unit)	0	123	12,516,508,900.00	66	9,289,000,000	75	9,000,000,000	150	14,686,957,100	200	15,686,957,100	200	15,686,957,100
3.25.03.1.01.0004 - Penerbitan rekomendasi surat izin penempatan rumpun (SIPR)	Diterbitkannya rekomendasi surat izin penempatan rumpun	Jumlah rekomendasi Surat izin penempatan rumpun yang diterbitkan (rekomendasi)	0	0	-	20	7,300,000	20	7,300,000	20	7,300,000	20	7,300,000	20	7,300,000

3.25.03.1.01.0005 - Pengadaan prasarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	Tersedianya prasarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	Jumlah prasarana pendukung yang tersedia untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur (Unit)	0	0	0	0,00	1	0,00	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	
3.25.03.1.01.0007 - Pengadaan sarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	Tersedianya sarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	Jumlah sarana pendukung yang tersedia untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur (Unit)	0	0	115	66,710,000	115	66,710,000	115	66,710,000	115	66,710,000	115	66,710,000	
3.25.03.1.01.0010 - Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Unit)	34	131	5,043,543,200.00	226	5,453,374,600	226	5,453,374,600	226	5,453,374,600	226	5,453,374,600	226	5,453,374,600
<b>3.25.03.1.02 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>		<b>Persentase peningkatan produksi nelayan perairan darat yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan</b>		<b>20</b>	<b>26,620,000</b>	<b>40</b>	<b>306,211,600</b>	<b>60</b>	<b>307,211,600</b>	<b>80</b>	<b>307,211,600</b>	<b>100</b>	<b>307,211,600</b>	<b>100</b>	<b>307,211,600</b>
3.25.03.1.02.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Wilayah Perairan Darat	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat (Dokumen)	0	0	0	0,00	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	
3.25.03.1.02.0004 - Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Perairan Darat	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat (Unit)	5	3	26,620,000.00	24	306,211,600	24	306,211,600	24	306,211,600	24	306,211,600	24	306,211,600
<b>3.25.03.1.03 - Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT</b>		<b>Persentase kapal perikanan berukuran diatas 10 GT-30 yang terbit izin usahanya</b>		<b>20</b>	<b>105000</b>	<b>40</b>	<b>#VALUE!</b>	<b>60</b>	<b>2,400,000</b>	<b>80</b>	<b>2,400,000</b>	<b>100</b>	<b>2,400,000</b>	<b>100</b>	<b>2,400,000</b>
3.25.03.1.03.0004 - Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil (Persentase)	643	20	105,000.00	0	0,00	643	1,000,000	643	1,000,000	643	1,000,000	643	1,000,000
3.25.03.1.03.0005 - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Tersedianya Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Jumlah data dan informasi perizinan usaha untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil yang tersedia (Dokumen)	0	0	1	1,400,000	1	1,400,000	1	1,400,000	1	1,400,000	1	1,400,000	
<b>3.25.03.1.05 - Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>		<b>Persentase Tanda Daftar Kapal perikanan yang terbit berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)</b>		<b>20</b>	<b>7,392,400</b>	<b>40</b>	<b>1,100,000</b>	<b>60</b>	<b>1,100,000</b>	<b>80</b>	<b>1,100,000</b>	<b>100</b>	<b>1,100,000</b>	<b>100</b>	<b>1,100,000</b>

3.25.03.1.05.0003 - Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	Diterbitkannya Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan (Dokumen)	0	500	7,392,400.00	1.729	1,100,000	1.729	1,100,000	1.729	1,100,000	1.729	1,100,000	1.729	1,100,000
<b>3.25.03.1.06 - Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</b>		<b>Persentase pelabuhan perikanan yang memenuhi standar operasional</b>		<b>20</b>	<b>4854143275</b>	<b>40</b>	<b>22,421,816,200</b>	<b>60</b>	<b>22,702,816,200</b>	<b>80</b>	<b>29,261,886,700</b>	<b>100</b>	<b>28,261,886,700</b>	<b>100</b>	<b>28,261,886,700</b>
3.25.03.1.06.0001 - Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Tersedianya Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan (Pelabuhan Perikanan)	3	3	15,021,400.00	7	421,816,200	13	21,816,200	19	21,816,200	19	21,816,200	19	21,816,200
3.25.03.1.06.0002 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia (Unit)	6	19	4,797,441,475.00	2	21,893,405,000	5	22,381,000,000	8	28,940,070,500	7	27,940,070,500	7	27,940,070,500
3.25.03.1.06.0003 - Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Terlaksananya Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana (Layanan)	19	19	41,680,400.00	19	106,595,000	19	300,000,000	19	300,000,000	19	300,000,000	19	300,000,000
<b>3.25.03.1.07 - Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT</b>		<b>Persentase izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang terbit</b>								<b>20</b>	<b>5,000,000</b>	<b>60</b>	<b>5,000,000</b>	<b>80</b>	<b>5,000,000</b>
3.25.03.1.07.0003 - Penerbitan surat rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)	Diterbitkannya Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan (Rekomendasi)	0	0		0	0,00	0	0,00	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000
<b>3.25.03.1.08 - Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>		<b>Persentase izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang terbit</b>					<b>0,00</b>	<b>20</b>	<b>5,000,000</b>	<b>40</b>	<b>5,000,000</b>	<b>60</b>	<b>5,000,000</b>	<b>80</b>	<b>5,000,000</b>
3.25.03.1.08.0003 - Penerbitan surat rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)	Diterbitkannya Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan yang Menjadi Kewenangan Provinsi (Rekomendasi)	0	0		0	0,00	50	5,000,000	50	5,000,000	50	5,000,000	50	5,000,000
<b>3.25.03.1.09 - Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT</b>		<b>Persentase kapal perikanan diatas 10 GT sampai dengan 30 GT yang terdaftar</b>				<b>20</b>	<b>1,060,000</b>	<b>40</b>	<b>1,060,000</b>	<b>60</b>	<b>1,060,000</b>	<b>80</b>	<b>1,060,000</b>	<b>100</b>	<b>1,060,000</b>
3.25.03.1.09.0003 - Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Diterbitkannya Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan (Rekomendasi)	1.260	0		20	1,060,000	20	1,060,000	20	1,060,000	20	1,060,000	20	1,060,000

3.25.03.1.10 - Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Persentase kapal perikanan sampai 10 GT yang terdaftar di Perairan Umum Daratan					0,00	20	1,000,000	40	1,000,000	60	1,000,000	80	1,000,000
3.25.03.1.10.0003 - Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Diterbitkannya Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan (Rekomendasi)	552	0		0	0,00	552	1,000,000	552	1,000,000	552	1,000,000	552	1,000,000
<b>3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>Meningkatnya produksi perikanan budidaya</b>	<b>Produksi Perikanan Budidaya (Ton)</b>	<b>4.314.231,48</b>	<b>4.928.496</b>	<b>9.841,571,459</b>	<b>5.177.477,80</b>	<b>5.031,469,216</b>	<b>5.440.121</b>	<b>5.031,469,216</b>	<b>5.715.345,10</b>	<b>20,000,000,000</b>	<b>6.004.465</b>	<b>20,000,000,000</b>	<b>6.308.367,4</b>	<b>20,000,000,000</b>
Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah laporan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) Di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Dalam provinsi		14	240,800										
Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Rekomendasi)		14	240,800										
<b>3.25.04.1.05 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut</b>		<b>Persentase peningkatan produksi pembudidaya ikan di laut yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan</b>		<b>20</b>	<b>8,838,016,400</b>	<b>40</b>	<b>3,969,897,216</b>	<b>60</b>	<b>3,969,897,216</b>	<b>80</b>	<b>14,250,000,000</b>	<b>100</b>	<b>14,000,000,000</b>	<b>100</b>	<b>13,500,000,000</b>
3.25.04.1.05.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	240,800.00	0	0,00	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000
3.25.04.1.05.0002 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut (Unit)	255	2.000	8,515,056,400.00	683	2,547,413,216	786	2,752,025,216	2.307	11,846,968,600	2.281	11,686,968,600	2.197	11,186,968,600
3.25.04.1.05.0004 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Terjaminnya Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut (Unit)	1	2	288,406,200.00	3	305,720,000	4	600,000,000	8	1,442,031,400	8	1,442,031,400	8	1,442,031,400
3.25.04.1.05.0007 - Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya (Orang)	40	40	2,280,000.00	40	12,000,000	40	12,000,000	200	60,000,000	200	60,000,000	200	60,000,000

3.25.04.1.05.0010 - Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya Ikan yang memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan (Unit)	0	0	-	1	100,000,000	1	100,000,000	2	300,000,000	2	300,000,000	2	300,000,000
3.25.04.1.05.0011 - Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan dan Ikan	Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia (Unit)	0	1	32,033,000.00	1	999,892,000	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000
3.25.04.1.05.0013 - Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Termonitornya Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	0	1	4,872,000	1	4,872,000	1	100,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000
<b>3.25.04.1.06 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat</b>	<b>Persentase pemanfaatan sarana pembudidaya ikan di perairan darat</b>	<b>Persentase pemanfaatan sarana pembudidaya ikan di perairan darat</b>		<b>20</b>	<b>1,003,314,259</b>	<b>40</b>	<b>1,061,572,000</b>	<b>60</b>	<b>1,061,572,000</b>	<b>80</b>	<b>5,750,000,000</b>	<b>100</b>	<b>6,000,000,000</b>	<b>100</b>	<b>6,500,000,000</b>
3.25.04.1.06.0003 - Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	3	3	797,989,400.00	2	811,572,000	2	811,572,000	6	4,000,000,000	6	4,000,000,000	6	4,000,000,000
3.25.04.1.06.0004 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	5	1	205,324,859.00	1	250,000,000	1	250,000,000	7	1,750,000,000	8	2,000,000,000	10	2,500,000,000
<b>3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>Meningkatnya kelestarian laut melalui pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan</b>	<b>Cakupan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1,163,714,850</b>	<b>100</b>	<b>907,505,500</b>	<b>100</b>	<b>907,505,500</b>	<b>100</b>	<b>1,000,000,000</b>	<b>100</b>	<b>1,000,000,000</b>	<b>100</b>	<b>1,000,000,000</b>
<b>3.25.05.1.01 - Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</b>		<b>Persentase Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</b>		<b>20</b>	<b>1,116,573,250</b>	<b>40</b>	<b>883,613,500</b>	<b>60</b>	<b>812,505,500</b>	<b>80</b>	<b>995,623,600</b>	<b>100</b>	<b>948,138,600</b>	<b>100</b>	<b>948,138,600</b>
3.25.05.1.01.0007 - Penanganan perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi	Perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi yang ditangani	Jumlah perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi yang ditangani (Perkara)	0	0		1	1,940,000	1	1,940,000	1	1,940,000	1	1,940,000	1	1,940,000
3.25.05.1.01.0009 - Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk (Orang)	0	0		0	0,00	2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000
3.25.05.1.01.0010 - Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan (Hari Operasi)	0	0		63	372,445,000	63	372,445,000	63	372,445,000	63	372,445,000	63	372,445,000

3.25.05.1.01.0011 - Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang dirawat	Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang dirawat (Unit)	0	0		5	82,474,900	1	125,000,000	6	90,000,000	6	90,000,000	6	90,000,000
3.25.05.1.01.0012 - Pengadaan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang diadakan	Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang diadakan (Unit)	0	0		0	0,00	0	0,00	1	400,000,000		0,00		0,00
3.25.05.1.01.0013 - Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi (Pelaku Usaha)	13	2	27,721,200.00	14	11,238,600	14	11,238,600	14	11,238,600	14	11,238,600	14	11,238,600
3.25.05.1.01.0014 - Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi (Pelaku Usaha)	0	500	1,038,171,050.00	600	302,975,800	200	129,366,900	200	100,000,000	500	200,000,000	500	200,000,000
3.25.05.1.01.0015 - Pembangunan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibangun	Jumlah Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibangun (Unit)	0	0		0	0,00	1	50,000,000	0	0,00	1	150,000,000	1	150,000,000
3.25.05.1.01.0016 - Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi (Pelaku Usaha)	0	3	28,496,000.00	20	17,515,000	20	17,515,000	3	4,000,000	20	17,515,000	20	17,515,000
3.25.05.1.01.0017 - Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan (Kelompok Masyarakat)	0	3	18,345,000.00	3	95,024,200	3	90,000,000	1	5,000,000	3	90,000,000	3	90,000,000
3.25.05.1.01.0018 - Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) tingkat Daerah	Forum Koordinasi Penanganan TPKP tingkat Daerah yang dilaksanakan	Jumlah Forum Koordinasi Penanganan TPKP tingkat Daerah yang dilaksanakan (Forum)	0	1	3,840,000.00	0	0,00	1	5,000,000	1	1,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000
<b>3.25.05.1.02 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>		<b>Persentase Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>		<b>20</b>	<b>47,141,600</b>	<b>40</b>	<b>23,892,000</b>	<b>60</b>	<b>95,000,000</b>	<b>80</b>	<b>4,376,400</b>	<b>100</b>	<b>51,861,400</b>	<b>100</b>	<b>51,861,400</b>
3.25.05.1.02.0004 - Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi (Pelaku Usaha)	0	12	23,243,600.00	12	7,956,000	30	35,000,000	2	2,000,000	20	21,861,400	20	21,861,400

3.25.05.1.02.0005 - Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku usaha Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diriksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi (Pelaku Usaha)	0	14	12,625,200.00	12	7,956,000	14	30,000,000	2	1,376,400	24	15,000,000	24	15,000,000
3.25.05.1.02.0006 - Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	Usaha pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi (Pelaku Usaha)	0	3	11,272,800.00	8	7,980,000	32	30,000,000	2	1,000,000	16	15,000,000	16	15,000,000
<b>3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan dan nilai ekonomi hasil perikanan yang memenuhi standar mutu keamanan hasil perikanan</b>	<b>Nilai Ekonomi Hasil Perikanan (Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Pengolahan) Trilyun Rp (Rp)</b>	<b>0</b>	<b>32,03</b>	<b>451,692,200</b>	<b>33,2</b>	<b>562,558,700</b>	<b>34,42</b>	<b>562,558,700</b>	<b>35,68</b>	<b>4,000,000,000</b>	<b>37</b>	<b>4,000,000,000</b>	<b>38,39</b>	<b>4,000,000,000</b>
		<b>Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan yang memenuhi standar mutu keamanan pangan (%)</b>	<b>0</b>	<b>80</b>		<b>85</b>		<b>87,5</b>		<b>90</b>		<b>95</b>		<b>100</b>	
		<b>Produksi Olahan Hasil Perikanan (Ton)</b>	<b>6.963,2</b>	<b>7.311,4</b>		<b>7.676,9</b>		<b>8.060,8</b>		<b>8.463,8</b>		<b>8.887,0</b>		<b>9.331,4</b>	
<b>3.25.06.1.01 - Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>		<b>Persentase Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>		<b>0</b>		<b>20</b>	<b>407,700</b>	<b>40</b>	<b>407,700</b>	<b>60</b>	<b>1,000,000</b>	<b>80</b>	<b>1,000,000</b>	<b>100</b>	<b>1,000,000</b>
3.25.06.1.01.0004 - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko (Dokumen)	1	0		1	407,700	1	407,700	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000
<b>3.25.06.1.02 - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</b>		<b>Persentase UPI yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan</b>		<b>20</b>	<b>441,698,200</b>	<b>40</b>	<b>502,997,000</b>	<b>60</b>	<b>502,997,000</b>	<b>80</b>	<b>3,300,000,000</b>	<b>100</b>	<b>3,300,000,000</b>	<b>100</b>	<b>3,300,000,000</b>
3.25.06.1.02.0003 - Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Terlaksananya Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing (Kegiatan)	0	3	255,181,200.00	5	362,079,000	6	362,079,000	7	2,000,000,000	7	2,000,000,000	7	2,000,000,000

3.25.06.1.02.0004 - Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Terlaksananya Pembinaan Terhadap Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam	0	3	186,517,000.00	3	140,918,000	3	140,918,000	5	1,300,000,000	5	1,300,000,000	5	1,300,000,000
<b>3.25.06.1.03 - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Meningkatnya utilisasi kapasitas industri pengolahan ikan</b>	<b>Persentase ketersediaan bahan baku industri pengolahan ikan lintas daerah Kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi</b>		<b>20</b>	<b>9,994,000</b>	<b>40</b>	<b>59,154,000</b>	<b>60</b>	<b>59,154,000</b>	<b>80</b>	<b>699,000,000</b>	<b>100</b>	<b>699,000,000</b>	<b>100</b>	<b>699,000,000</b>
3.25.06.1.03.0001 - Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Dokumen)	1	1	9,826,400.00	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000
3.25.06.1.03.0004 - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku	Meningkatnya ketersediaan bahan baku untuk konsumsi dan usaha pengolahan ikan	Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan bahan baku usaha pengolahan dan pemasaran ikan (Ton)	0	0		0,54	44,154,000	0,54	44,154,000	6,11	500,000,000	6,11	500,000,000	6,11	500,000,000
3.25.06.1.03.0005 - Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dari hulu sampai hilir	Terkoneksinya Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dari hulu sampai hilir	Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan yang terkoneksi dari hulu sampai hilir (Sistem Informasi)	1	1	167,600.00	1	5,000,000	1	5,000,000	1	189,000,000	1	189,000,000	1	189,000,000

Uraian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan Tahun 2025 - 2029, sebagai berikut :

## **1. PROGRAM PERIKANAN TANGKAP**

**Indikator Program : Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2025 sebesar 521.583,60 Ton, tahun 2029 sebesar 564.578,74 Ton**

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap diarahkan untuk mewujudkan tata kelola usaha penangkapan ikan yang produktif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan sesuai dengan daya dukung sumber daya ikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program ini menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kontribusi subsektor perikanan tangkap terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus menjaga kelestarian sumber daya ikan di wilayah kewenangan provinsi.

Pelaksanaan program difokuskan pada penataan dan pendataan usaha perikanan tangkap, pengendalian upaya penangkapan ikan, serta fasilitasi sarana dan prasarana penangkapan yang ramah lingkungan dan mendukung keselamatan nelayan. Selain itu, dilakukan peningkatan kapasitas nelayan melalui pembinaan teknis, penerapan praktik penangkapan ikan yang bertanggung jawab (*responsible fisheries*), serta penguatan akses terhadap informasi daerah penangkapan ikan dan kondisi cuaca untuk mendukung keselamatan pelayaran.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan nelayan, program ini juga diarahkan pada penguatan kelembagaan nelayan, peningkatan akses terhadap pembiayaan dan perlindungan usaha, serta sinergi dengan program hilirisasi hasil perikanan guna memperbaiki posisi tawar nelayan dalam rantai pasok. Secara jangka menengah, Program Pengelolaan Perikanan Tangkap ditargetkan mampu meningkatkan produksi secara terukur, menjaga status keberlanjutan stok ikan, serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan. Dengan demikian, keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan ekologi dapat terwujud dalam pengelolaan perikanan tangkap yang berkelanjutan.

Adapun untuk pencapaian kinerja pada program pengelolaan perikanan tangkap, terdapat beberapa kegiatan antara lain :

### **a. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil**

Kegiatan ini diarahkan untuk menjamin pemanfaatan sumber daya ikan secara optimal, tertib, dan berkelanjutan sesuai kewenangan pemerintah provinsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dengan menjaga keseimbangan antara peningkatan produksi perikanan tangkap dan kelestarian sumber daya ikan di wilayah perairan provinsi untuk mendukung kebijakan nasional dalam penangkapan ikan terukur (PIT) melalui penggunaan sarana prasarana penangkapan ikan yang modern dan ramah lingkungan dengan penggunaan teknologi penangkapan ikan yang sesuai.

Selain itu, dilakukan pembinaan terhadap nelayan dalam penerapan praktik penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab, guna mencegah penggunaan alat tangkap yang merusak dan praktik penangkapan ilegal. Kegiatan ini juga mencakup pengumpulan dan pengelolaan data produksi perikanan tangkap sebagai dasar perumusan kebijakan, pemetaan daerah penangkapan ikan, serta peningkatan keselamatan dan perlindungan nelayan melalui penyebaran informasi cuaca dan keselamatan pelayaran.

Bantuan sarana prasarana produksi bagi nelayan, sarana prasarana yang mendukung penangkapan ikan terukur serta pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan, merupakan penjabaran utama rincian output untuk mendukung peningkatan produksi perikanan tangkap.

**b. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**

Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi diarahkan untuk menjamin pemanfaatan sumber daya ikan perairan darat secara tertib, produktif, dan berkelanjutan sesuai kewenangan pemerintah provinsi. Pengelolaan ini dilaksanakan dengan pendekatan terpadu mengingat karakteristik perairan darat yang bersifat terbuka dan melintasi batas administratif.

Pelaksanaan kegiatan difokuskan pada pendataan dan penataan usaha penangkapan ikan di perairan darat lintas kabupaten/kota, pengaturan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan, serta pembinaan kepada nelayan perairan darat dalam penerapan praktik penangkapan yang ramah lingkungan melalui bantuan sarana dan prasarana penangkapan ikan di perairan umum daratan (PUD). Selain itu, dilakukan pengendalian upaya penangkapan berdasarkan daya dukung dan potensi sumber daya ikan guna mencegah overfishing serta degradasi ekosistem perairan.

Kegiatan ini juga mencakup penguatan koordinasi antar kabupaten/kota dalam pengelolaan perairan bersama, pengumpulan dan analisis data produksi perikanan darat, serta upaya restocking atau penebaran ikan pada perairan umum tertentu untuk menjaga keberlanjutan sumber daya.

**c. Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT**

Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT dilaksanakan sebagai bagian dari kewenangan pemerintah provinsi dalam rangka mewujudkan tertib usaha, kepastian hukum, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan secara berkelanjutan. Perizinan ini merupakan instrumen pengaturan yang strategis untuk memastikan bahwa kegiatan penangkapan ikan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan daya dukung sumber daya. Kegiatan ini didukung dengan rincian output fasilitasi penerbitan izin usaha bagi nelayan dengan kapal ukuran 10 – 30 GT.

**d. Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**

Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan berukuran sampai dengan 10 GT merupakan bagian dari upaya penataan administrasi dan legalitas usaha perikanan tangkap dalam rangka mewujudkan tertib usaha, kepastian hukum, dan pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan sesuai kewenangan pemerintah provinsi. Kegiatan ini dilaksanakan pada wilayah laut sampai dengan 12 mil serta perairan darat yang menjadi kewenangan provinsi karena melintasi lebih dari satu kabupaten/kota.

Pelaksanaan kegiatan difokuskan pada proses pendaftaran dan verifikasi administrasi serta teknis kapal perikanan, penerbitan tanda daftar kapal perikanan (TDKP), serta pemutakhiran data kapal secara berkala sebagai bagian dari sistem informasi perikanan daerah. Penataan kapal perikanan hingga 10 GT ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kapal yang beroperasi telah memenuhi

persyaratan legalitas dan ketentuan teknis yang berlaku, termasuk kesesuaian alat penangkapan ikan dan daerah operasional. Kegiatan ini dilaksanakan melalui sinergi dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi dan Kabupaten / Kota.

Melalui penerbitan tanda daftar kapal perikanan yang tertib dan transparan, diharapkan tercipta basis data kapal perikanan yang akurat, meningkatnya kepatuhan pelaku usaha perikanan, serta terwujudnya tata kelola perikanan tangkap yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan di wilayah kewenangan provinsi.

**e. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi**

Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi diarahkan untuk mendukung tersedianya infrastruktur perikanan tangkap yang terencana melalui pembangunan /rehabilitasi fasilitas pelabuhan perikanan secara representatif, dan sesuai dengan kebutuhan operasional nelayan serta pelaku usaha perikanan. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penguatan sistem logistik perikanan dan peningkatan nilai tambah hasil tangkapan melalui dukungan fasilitas pelabuhan yang memadai.

Penetapan lokasi pembangunan pelabuhan perikanan dilakukan berdasarkan kajian teknis dan perencanaan tata ruang, dengan mempertimbangkan potensi sumber daya ikan, intensitas aktivitas penangkapan, aksesibilitas, daya dukung lingkungan, serta kesesuaian dengan RZWP3K dan dokumen perencanaan daerah lainnya. Proses ini bertujuan memastikan bahwa pembangunan pelabuhan perikanan efektif secara ekonomi, layak secara teknis, dan berkelanjutan secara lingkungan.

Selanjutnya, pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi dilaksanakan untuk menjamin optimalisasi fungsi pelabuhan sebagai pusat pelayanan kegiatan perikanan tangkap, meliputi pelayanan tambat labuh kapal, bongkar muat ikan, penyediaan air bersih dan es, fasilitas rantai dingin, pencatatan produksi, serta pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan. Pengelolaan yang profesional dan akuntabel menjadi kunci dalam meningkatkan efisiensi distribusi, menjaga kualitas hasil tangkapan, serta memperkuat daya saing produk perikanan. Layanan kesyahbandaran perikanan yang dilaksanakan di 19 Pelabuhan Perikanan yang beroperasi aktif di wilayah Sulawesi Selatan.

Melalui kegiatan ini diharapkan terwujud pelabuhan perikanan provinsi yang berfungsi sebagai sentra pertumbuhan ekonomi kawasan, mendukung peningkatan produksi dan nilai tambah, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha perikanan secara berkelanjutan.

**f. Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT**

Kegiatan Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT dilaksanakan dalam rangka pengendalian kapasitas armada penangkapan ikan sesuai kewenangan pemerintah provinsi, guna menjaga keseimbangan antara jumlah armada, potensi sumber daya ikan, dan keberlanjutan usaha perikanan tangkap.

Penerbitan izin pengadaan kapal dilakukan melalui proses evaluasi administratif dan teknis yang mempertimbangkan rencana usaha, kesesuaian spesifikasi kapal, jenis dan kapasitas alat penangkapan ikan, daerah operasi, serta daya dukung sumber daya ikan di wilayah pengelolaan. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa penambahan armada tidak menyebabkan kelebihan kapasitas (overcapacity) yang berpotensi mengganggu keberlanjutan stok ikan

**g. Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**

Kegiatan Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan berukuran sampai dengan 10 GT dilaksanakan sebagai bagian dari kewenangan pemerintah provinsi dalam rangka penataan dan pengendalian kapasitas armada perikanan skala kecil pada wilayah laut sampai dengan 12 mil serta perairan darat yang bersifat lintas kabupaten/kota. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penambahan armada perikanan dilakukan secara terukur, sesuai dengan potensi dan daya dukung sumber daya ikan, serta tidak menimbulkan tekanan berlebihan terhadap ekosistem perairan.

Proses penerbitan izin pengadaan kapal perikanan dilaksanakan melalui tahapan verifikasi administrasi dan evaluasi teknis terhadap rencana pengadaan kapal, meliputi spesifikasi kapal, jenis alat penangkapan ikan, daerah operasi, serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini menjadi instrumen pengendalian agar pengadaan kapal mendukung peningkatan produktivitas nelayan tanpa mengabaikan prinsip keberlanjutan.

**h. Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT**

Pada kegiatan pendaftaran kapal perikanan di atas 10 sampai 30 GT dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penataan administrasi dan pengendalian armada perikanan tangkap sesuai kewenangan pemerintah provinsi. Pendaftaran kapal merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tertib usaha, kepastian hukum, serta penyediaan basis data armada yang akurat dan terintegrasi.

Pelaksanaan kegiatan meliputi proses verifikasi administrasi dan teknis kapal perikanan, pencatatan spesifikasi kapal dan alat penangkapan ikan, serta pemutakhiran data secara berkala. Melalui pendaftaran yang tertib, setiap kapal yang beroperasi dapat teridentifikasi dengan jelas status legalitasnya, daerah operasi, dan kesesuaian alat tangkap yang digunakan. Data kapal yang terdaftar menjadi dasar dalam pengendalian upaya penangkapan ikan, perencanaan kebijakan pengelolaan perikanan, serta pelaksanaan pengawasan dan pembinaan.

**i. Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**

Pada kegiatan ini difokuskan pada pendaftaran kapal perikanan di atas 10 sampai 30 GT yang beroperasi di wilayah laut sampai 12 mil serta yang dioperasikan di perairan umum daratan (PUD) yang diusahakan lintas wilayah Kabupaten/Kota. Ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penataan administrasi dan pengendalian armada perikanan tangkap sesuai kewenangan pemerintah provinsi, pendaftaran kapal merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tertib usaha, kepastian hukum, serta penyediaan basis data armada yang akurat dan terintegrasi.

Pelaksanaan kegiatan meliputi proses verifikasi administrasi dan teknis kapal perikanan, pencatatan spesifikasi kapal dan alat penangkapan ikan, serta pemutakhiran data secara berkala. Melalui pendaftaran yang tertib, setiap kapal yang beroperasi dapat teridentifikasi dengan jelas status legalitasnya, daerah operasi, dan kesesuaian alat tangkap yang digunakan. Data kapal yang terdaftar menjadi dasar dalam pengendalian upaya penangkapan ikan, perencanaan kebijakan pengelolaan perikanan, serta pelaksanaan pengawasan dan pembinaan

## **2. PROGRAM PERIKANAN BUDIDAYA**

**Indikator Program : Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2025 sebesar 4.928.496,0 Ton, tahun 2029 sebesar 6.004.465 Ton**

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya diarahkan untuk meningkatkan produksi, produktivitas, dan daya saing komoditas perikanan budidaya secara berkelanjutan melalui penerapan inovasi teknologi, penguatan kelembagaan, dan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab. Program ini menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung ketahanan pangan, peningkatan pendapatan masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi daerah berbasis sektor kelautan dan perikanan.

Pelaksanaan program difokuskan pada pengembangan budidaya berbasis kawasan dan komoditas unggulan di Sulawesi Selatan antara lain komoditas rumput laut, udang windu, bandeng dan ikan air tawar seperti ikan nila dan ikan mas. Selain itu pada program ini difokuskan untuk peningkatan mutu benih dan pakan, penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), serta pengendalian penyakit ikan dan penerapan biosecurity. Untuk penguatan kapasitas kelembagaan pembudidaya dilakukan untuk pembudidaya di kawasan konservasi dna laut serta pembudidaya di darat yang dilakukan melalui bimbingan teknis, pendampingan usaha, untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan usaha.

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya mendorong integrasi hulu–hilir melalui pengembangan sistem produksi yang terencana, peningkatan akses terhadap sarana produksi dan pembiayaan, serta sinergi dengan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan guna meningkatkan nilai tambah. Aspek keberlanjutan menjadi perhatian utama dengan tetap menjaga kualitas lingkungan perairan dan daya dukung ekosistem.

Dalam jangka menengah, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya ditargetkan mampu meningkatkan volume dan nilai produksi budidaya, memperluas lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan pembudidaya yang ditandai dengan peningkatan NTPi, serta memperkuat kontribusi subsektor budidaya terhadap PDRB sektor perikanan daerah.

Adapun untuk pencapaian kinerja pada program pengelolaan perikanan budidaya didukung oleh 2 (dua) kegiatan utama antara lain :

### **a. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**

Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang laut dalam mendukung pengembangan usaha budidaya perikanan yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai kewenangan pemerintah provinsi dengan tetap memperhatikan kesesuaian tata ruang laut, daya dukung lingkungan, serta prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan sumber daya.

Pelaksanaan kegiatan difokuskan pada penataan dan pengembangan kawasan budidaya laut melalui penyediaan sarana prasarana budidaya bagi POKDAKAN antara lain untuk komoditi rumput laut, budidaya keramba di laut, pengembangan inovasi kebun bibit rumput laut, pengelolaan sistim pengairan budidaya pengembangan pemanfaatan air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, serta penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB).

Selain itu, pada kegiatan ini dilakukan pembinaan teknis kepada pembudidaya di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi dalam penerapan teknologi budidaya yang efisien dan ramah lingkungan, termasuk pengelolaan kualitas air dan pengendalian penyakit ikan, penguatan kelembagaan pembudidaya, peningkatan akses terhadap permodalan dan pasar, serta integrasi dengan sistem rantai dingin dan pengolahan hasil untuk meningkatkan nilai tambah.

Pendekatan berbasis kawasan dan komoditas unggulan menjadi strategi utama guna menciptakan sentra budidaya laut yang terstruktur dan berkelanjutan, untuk peningkatan produksi dan produktivitas, serta peningkatan kualitas dan daya saing produksi.

#### **b. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat**

Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Darat diarahkan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas usaha budidaya air tawar dan payau secara berkelanjutan, melalui penguatan sistem produksi, penerapan teknologi tepat guna, serta pengelolaan lingkungan budidaya yang bertanggung jawab yang bersifat lintas kabupaten/kota atau memiliki dampak strategis terhadap pengembangan sektor perikanan daerah.

Pelaksanaan kegiatan difokuskan pada penataan dan pengembangan budidaya darat yang dikelola melalui UPT Pengembangan Budidaya Air Payau dan Laut (PBAPL) untuk komoditas unggulan udang, penyediaan benur berkualitas serta melalui Balai Benih Ikan Sentral (BBIS Lajoa) untuk komoditas ikan air tawar, ikan nila dan mas. Untuk mendukung peningkatan produksi perikanan darat, maka pada kegiatan ini juga difokuskan pada bantuan sarana produksi berbasis teknologi seperti mini bioflok, sarana inovasi desiminasi udang, fasilitasi bantuan pakan, serta fasilitasi pembinaan kelompok masyarakat pembudidaya untuk pembentukan kampung pembudidaya.

### **3. PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**

**Indikator Program : Persentase Luas Kawasan Pesisir dan Konservasi Yang Dikelola secara berkelanjutan Tahun 2025 sebesar 97,60 % dan tahun 2029 sebesar 99,67 Ton.**

Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil diarahkan untuk mewujudkan tata kelola ruang laut dan wilayah pesisir yang terpadu, berkelanjutan, serta mampu menyeimbangkan kepentingan ekologi, sosial, dan ekonomi. Program ini menjadi instrumen strategis dalam menjaga kelestarian sumber daya kelautan sekaligus mendorong pemanfaatan yang produktif dan bertanggung jawab untuk mendukung kebijakan nasional **ekonomi biru**

Pelaksanaan program difokuskan pada implementasi rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K), pengelolaan 13 kawasan konservasi perairan daerah (KKPD), di

Sulawesi Selatan, rehabilitasi ekosistem pesisir seperti mangrove, terumbu karang, dan lamun, serta pengendalian pemanfaatan ruang laut agar sesuai dengan daya dukung lingkungan melalui pembangunan apartemen ikan (rumah ikan) pada lokasi yang telah ditetapkan melalui kajian akademi/regulai/aturan lainnya. Selain itu, dilakukan penguatan sistem perizinan dan pengawasan pemanfaatan ruang laut guna mencegah konflik pemanfaatan dan kerusakan lingkungan

Program ini juga mendorong pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pengembangan usaha berbasis sumber daya lokal, peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat, serta dukungan terhadap kegiatan ekonomi biru (blue economy) yang ramah lingkungan. Pendekatan kolaboratif dengan pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam memastikan efektivitas pengelolaan wilayah pesisir serta untuk pengelolaan jasa kelautan melalui sektor wisata bahari dan pengembangan sentra usaha garam.

Dalam jangka menengah, program ini ditargetkan mampu meningkatkan kualitas dan luas ekosistem pesisir yang terlindungi dan direhabilitasi, mengurangi potensi konflik pemanfaatan ruang laut, memperkuat ketahanan wilayah pesisir terhadap perubahan iklim dan risiko bencana, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan.

Adapun untuk pencapaian kinerja pada program pengelolaan kelautan pesisir dan pulau-pulau kecil didukung oleh 3 (tiga) kegiatan utama antara lain :

**a. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**

Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi dilaksanakan sebagai bagian dari kewenangan pemerintah provinsi dalam mengatur pemanfaatan ruang laut secara tertib, terencana, dan berkelanjutan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pemanfaatan ruang laut dilakukan sesuai dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K), serta memperhatikan daya dukung lingkungan dan kepentingan masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan difokuskan pada penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang laut, evaluasi kesesuaian kegiatan terhadap ketentuan zonasi, guna mencegah tumpang tindih pemanfaatan dan konflik antar sektor serta pengelolaan wilayah pesisir antara lain melalui : 1) penanaman mangrove, 2) pembangunan apartemen ikan, 3) transplantasi karang, 4) pengelolaan pariwisata bahari/kemaritiman melalui Penyelenggaraan Turnamen Memancing mendukung Program Perikanan Terukur dan Bangga Berwisata di Indonesia, 5) pengelolaan kawasan KKPD dan penyediaan sarana prasarana pendukungnya, 6) mitigasi bencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, 7) Penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil/Dokumen Final RZWP-3-K, 8) Peningkatan kapasitas masyarakat pengelola ekosistem blue carbon, 9) Pengelolaan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat serta penyediaan data dan informasi pergaraman.

Pendekatan berbasis perencanaan dan pengendalian menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian ekosistem laut, sehingga diharapkan tercipta kepastian hukum bagi pelaku usaha, meningkatnya tertib pemanfaatan ruang laut, serta terjaganya keberlanjutan sumber daya kelautan di wilayah kewenangan provinsi sebagai bagian dari implementasi pembangunan kelautan yang berkelanjutan

## **b. Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**

Kegiatan Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi dilaksanakan sebagai bentuk kewenangan pemerintah provinsi dalam mengatur dan mengendalikan pemanfaatan ruang laut secara tertib, terencana, dan berkelanjutan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha sekaligus memastikan bahwa setiap aktivitas pemanfaatan ruang laut sesuai dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan kegiatan meliputi 1) Pencatatan dan Pengadministrasian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber daya Pesisir dan Laut sebagai database perizinan berusaha, serta 2) Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan. Proses pengelolaan perijinan melalui evaluasi administratif dan teknis terhadap permohonan izin, penilaian kesesuaian lokasi dengan zonasi, pertimbangan tehnis pengelolaan perijinan serta koordinasi lintas sektor untuk mencegah tumpang tindih pemanfaatan ruang. Pemanfaatan ruang laut yang dimaksud mencakup kegiatan seperti perikanan budidaya laut, pemasangan kabel dan pipa bawah laut, pariwisata bahari, reklamasi, serta kegiatan lainnya di luar sektor minyak dan gas bumi.

## **c. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diarahkan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat yang bermukim dan berusaha di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penguatan ekonomi lokal berbasis potensi sumber daya kelautan dan perikanan dengan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan lingkungan.

Pelaksanaan kegiatan difokuskan pada 1) Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 2) Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 3) Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, 4) Peningkatan kapasitas kelompok usaha garam rakyat melalui bantuan sarana dan prasarana produksi. Untuk mendukung potensi komoditi lokal seperti hasil perikanan tangkap tangkap skala kecil dna tradisional, budidaya, pengolahan hasil perikanan, ekowisata bahari, usaha garam rakyat serta usaha ekonomi kreatif pesisir lainnya maka pada kegiatan ini dilaksanakan juga untuk Fasilitasi Akses Kemitraan Usaha dengan perbankan /industri perikanan.

Kegiatan ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir, termasuk dalam kegiatan konservasi, rehabilitasi ekosistem, dan pengawasan berbasis masyarakat. Pendekatan kolaboratif antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi strategi penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan sosial wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk pembangunan kelautan yang berkelanjutan.

#### **4. PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN**

**Indikator Program : Cakupan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan tahun 2025 sebesar 100 %, tahun 2026 sebesar 100 %**

Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan diarahkan untuk menjamin pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara tertib, bertanggung jawab, dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program ini menjadi instrumen strategis dalam menjaga kelestarian sumber daya ikan, mencegah praktik ilegal, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang taat aturan.

Pelaksanaan program difokuskan pada penguatan sistem pengawasan di wilayah kewenangan provinsi, baik di laut sampai dengan 12 mil maupun pada perairan darat lintas kabupaten/kota. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi patroli pengawasan, pembinaan dan penguatan kapasitas pengawas perikanan dan PPNS, penguatan sarana dan prasarana pengawasan, serta pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas).

Selain itu, program ini juga mencakup pengawasan terhadap kepatuhan perizinan usaha perikanan, penggunaan alat tangkap yang sesuai ketentuan, pemanfaatan ruang laut, serta perlindungan ekosistem pesisir dan laut dari praktik yang merusak, pengawasan pemanfaatan sumberdaya di perikanan darat yang pemanfaatannya lintas Kabupaten/Kota, Pengawasan Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan. Pendekatan pengawasan berbasis risiko, pemanfaatan teknologi informasi, serta sinergi lintas sektor menjadi strategi utama dalam meningkatkan efektivitas pengawasan. Dalam jangka menengah, Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan ditargetkan mampu menurunkan tingkat pelanggaran, meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, memperluas cakupan wilayah pengawasan, serta memperkuat perlindungan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan, untuk mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Adapun untuk pencapaian kinerja pada program pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan didukung oleh 2 (dua) kegiatan utama antara lain :

##### **a. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**

Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 mil dilaksanakan sebagai bagian dari kewenangan pemerintah provinsi dalam rangka menjamin pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang tertib, legal, dan berkelanjutan. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah dan menindak praktik penangkapan ikan ilegal, penggunaan alat tangkap yang dilarang, serta pelanggaran pemanfaatan ruang laut yang berpotensi merusak ekosistem.

Pelaksanaan kegiatan dalam bentuk 1) Penanganan perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi, 2) Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, 3) Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan (Patroli Pengawasan), 4) Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan, 5) Pengadaan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan, 6) Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi, 7) Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi, 8) Pembangunan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, 9) Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi, 10) Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS), 11) Koordinasi Penanganan Tindak Pidana

## Kelautan dan Perikanan (TPKP) tingkat Daerah

Selain tindakan represif terhadap pelanggaran, kegiatan ini juga mengedepankan pendekatan preventif melalui sosialisasi dan pembinaan kepada nelayan dan pelaku usaha perikanan agar memahami dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Pengawasan berbasis risiko dan pemanfaatan teknologi informasi menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan efektivitas dan jangkauan pengawasan. Untuk menertibkan pelaku usaha dalam administrasi perijinan usaha, maka pada kegiatan ini difasilitasi pelaku usaha untuk penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) serta pendataan pelaku usaha kelautan perikanan (KUSUKA-KP). Melalui pelaksanaan pengawasan yang konsisten dan terintegrasi, diharapkan meningkatnya tingkat kepatuhan pelaku usaha, menurunnya pelanggaran di wilayah perairan sampai dengan 12 mil untuk mendukung pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

### **b. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**

Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi dilaksanakan sebagai bagian dari kewenangan pemerintah provinsi dalam menjaga kelestarian sumber daya ikan perairan darat. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan dilakukan secara tertib, tidak merusak lingkungan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan kegiatan difokuskan pada 1) Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi, 2) Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi, dengan mekanisme pengawasan melalui pemantauan dan pengendalian aktivitas penangkapan ikan di perairan umum darat, pemeriksaan penggunaan alat tangkap, serta pengawasan terhadap praktik penangkapan yang dilarang seperti penggunaan bahan peledak, racun, atau setrum, terhadap kepatuhan pelaku usaha dan nelayan terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk ketentuan ukuran ikan yang boleh ditangkap dan musim penangkapan, 3) Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi.

Kegiatan ini juga mencakup pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat nelayan perairan darat mengenai pentingnya praktik penangkapan yang ramah lingkungan serta perlindungan habitat perairan. Penguatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, aparat penegak hukum, dan kelompok masyarakat pengawas menjadi bagian penting dalam menciptakan sistem pengawasan yang efektif dan partisipatif.

## 5. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PRODUK PERIKANAN

- Indikator Program :**
- **Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan yang memenuhi standar mutu keamanan pangan tahun 2025 sebesar 80 %, tahun 2026 sebesar 95 %**
  - **Produksi Olahan Hasil Perikanan tahun 2025 sebesar 7.311,36 Ton, tahun 2026 sebesar 8.887 Ton**
  - **Nilai Ekonomi Hasil Perikanan (Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Pengolahan) Tahun 2025 sebesar Rp.32.2 T, tahun 2026 sebesar Rp. 37,43 T**

Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing, mutu, dan akses pasar produk kelautan dan perikanan guna mendukung peningkatan pendapatan pelaku usaha serta kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian daerah. Program ini menjadi bagian strategis dalam memperkuat hilirisasi hasil perikanan dan memperluas jangkauan pemasaran, baik di pasar domestik maupun ekspor.

Pelaksanaan program difokuskan pada 1) Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar, 2) Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi serta 3) Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.

Untuk meningkatkan kapasitas unit pengolahan ikan (UPI), maka melalui UPT Balai Penerapan Mutu Produk Perikanan (BPMPP) dilalukan pembinaan dan sertifikasi mutu serta keamanan pangan, serta fasilitasi penerapan standar dan jaminan mutu (seperti GMP, SSOP, HACCP), Pengembangan diversifikasi produk olahan berbasis potensi lokal untuk meningkatkan nilai tambah dan memperluas segmentasi pasar. Selain itu untuk mendukung pencapaian kinerja program, melalui Bidang Perikanan Budidaya dan Daya Saing Produk dilakukan pembinaan terhadap UMKM dan penguatan kelembagaan serta manajemen usaha pengolahan. Untuk mendorong pemasaran hasil perikanan dikembangkan sistim manajemen pemasaran dan logistik hasil perikanan melalui digitalisasi mencakup fasilitasi promosi dan temu bisnis, penguatan branding produk perikanan daerah yang disinergikan dengan lembaga perindustrian dan perdagangan daerah.

Dukungan juga diberikan dalam bentuk penyediaan data dan informasi pasar, penguatan rantai pasok dingin (cold chain system), serta kemitraan antara pelaku usaha kecil, koperasi, dan industri skala lebih besar. Program ini juga mendorong pemberdayaan pelaku usaha mikro dan kecil, termasuk perempuan dan kelompok masyarakat pesisir, agar mampu meningkatkan kualitas produk, efisiensi produksi, serta daya saing usaha, sehingga diharapkan meningkatnya nilai tambah produk perikanan, bertambahnya UPI yang memenuhi standar mutu, meluasnya akses pasar, yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pengolahan dna pemasaran hasil perikanan.

Adapun untuk pencapaian kinerja pada program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan didukung oleh 3 (tiga) kegiatan utama antara lain :

**a. Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**

Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi dilaksanakan sebagai bagian dari kewenangan pemerintah provinsi dalam menjamin tertib usaha, kepastian hukum, dan peningkatan kualitas pelayanan perizinan di sektor kelautan dan perikanan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang beroperasi lintas kabupaten/kota telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan standar mutu yang berlaku.

Pelaksanaan kegiatan difokuskan pada Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi melalui proses verifikasi dokumen, penilaian kesesuaian lokasi dan kegiatan usaha, serta evaluasi pemenuhan persyaratan teknis dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**b. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**

Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar dilaksanakan dalam rangka menjamin produk perikanan yang beredar memenuhi standar mutu, keamanan pangan, dan persyaratan kelayakan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk perikanan daerah di pasar domestik maupun internasional melalui penerapan sistem jaminan mutu yang konsisten dan berkelanjutan.

Pelaksanaan kegiatan difokuskan pada 1) Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing, serta 2) Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar berorientasi pada peningkatan kapasitas UMKM /Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, melalui penyediaan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran serta pembangunan/rehabilitasi fasilitas bangsal/bangunan produksi

Pada kegiatan ini juga untuk mendukung hasil kelautan dan perikanan yang memenuhi standar mutu keamanan pangan melalui penyediaan alat laboratorium yang sesuai standar, bahan pengujian yang standar, serta penguatan pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi ekspor, ketertelusuran (traceability), dan persyaratan negara tujuan, sehingga produk yang dihasilkan mampu memenuhi standar pasar global. Selain itu, dilakukan pendampingan teknis, evaluasi penerapan standar, serta pembinaan terhadap manajemen mutu dan sistem pengendalian internal perusahaan. Sinergi dengan instansi terkait dan lembaga sertifikasi menjadi bagian penting dalam memastikan proses pembinaan berjalan efektif dan terintegrasi.

- c. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

## **6. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERUNTAHAN DAERAH PROVINSI**

**Indikator Program : Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi Tahun 2025 sebesar 100 % , tahun 2026 sebesar 100 %**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah merupakan program yang diarahkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah melalui penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Program ini menjadi fondasi utama dalam memastikan seluruh program teknis dan prioritas pembangunan sektor dapat berjalan secara optimal dan terukur.

Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada OPD Dinas Kelautan dan Perikanan mencakup penyediaan layanan administrasi perkantoran, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, penyediaan sarana dan prasarana pendukung kerja, serta penguatan sistem perencanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Dengan dukungan manajemen internal yang tertata baik, diharapkan tercipta tata kelola organisasi yang profesional serta mampu merespons dinamika kebijakan dan kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat. Dalam konteks pembangunan sektor kelautan dan perikanan, program penunjang ini berperan strategis dalam memastikan seluruh program teknis dan prioritas dapat terlaksana sesuai perencanaan, tepat waktu, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, diharapkan terwujud peningkatan kualitas pelayanan publik, tertib administrasi, pengelolaan anggaran yang akuntabel, serta meningkatnya kinerja organisasi yang berdampak pada pencapaian target pembangunan daerah.

Adapun untuk menunjang pencapaian kinerja pada program ini maka didukung oleh 9 (sembilan) kegiatan antara lain :

### **a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel melalui proses perencanaan yang terarah, penganggaran yang tepat sasaran, serta evaluasi kinerja yang terukur dan berkelanjutan. Kegiatan ini menjadi instrumen strategis dalam memastikan keselarasan antara dokumen perencanaan daerah (RPJMD dan RKPD) dengan dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja), serta konsistensi antara perencanaan dan pengalokasian anggaran dalam APBD.

Pelaksanaan kegiatan mencakup penyusunan dokumen perencanaan RENJA OPD, RENSTRA, Penyusunan RKA dan DPA perangkat daerah, fasilitasi dan koordinasi penyelarasan program dan kegiatan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program , penyusunan laporan kinerja perangkat daerah (LKjIP) untuk analisis capaian indikator kinerja dan realisasi anggaran sebagai bahan perbaikan kebijakan dan penyempurnaan perencanaan pada tahun berikutnya, Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah, serta Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

#### **b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah dilaksanakan dalam rangka mendukung pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan, berjalan secara efektif dan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pelaksanaan kegiatan mencakup penatausahaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah, pengelolaan dokumen anggaran, verifikasi dan pengujian dokumen pembayaran untuk belanja pegawai, belanja operasi dan belanja modal, penyusunan laporan realisasi anggaran, rekonsiliasi data keuangan secara berkala, serta penyusunan laporan keuangan daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Selain itu, dilakukan koordinasi dan pengendalian internal OPD Dinas Kelautan dan Perikanan guna meminimalkan risiko kesalahan administrasi serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah.

#### **c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib, efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan seluruh barang milik daerah yang berada dalam penguasaan dan pemanfaatan perangkat daerah tercatat, terinventarisasi, terpelihara, dan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Pelaksanaan kegiatan meliputi 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD , 2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, 3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD , 4) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD , 5) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD dengan ruang lingkup antara lain penatausahaan Barang Milik Daerah melalui pencatatan dan pembukuan aset, penyusunan Kartu Inventaris Barang (KIB), inventarisasi dan sensus aset, pengamanan administrasi, fisik dan hukum atas aset, rekonsiliasi data aset dengan pengelola barang, serta penyusunan laporan barang milik daerah secara berkala dan tepat waktu. Selain itu, dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan aset guna menjaga kondisi dan nilai ekonomis barang milik daerah.

#### **d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**

Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah dilaksanakan dalam rangka mendukung optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan proses perencanaan target pendapatan, pemungutan, penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan pendapatan daerah dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

Pelaksanaan kegiatan meliputi 1) Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah , 2) Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah dengan ruang lingkup penyusunan dan penetapan target pendapatan daerah, pendataan dan verifikasi objek serta subjek pendapatan, penerbitan dokumen penagihan sesuai ketentuan, penatausahaan dan pencatatan realisasi pendapatan, rekonsiliasi data penerimaan, serta penyusunan laporan realisasi pendapatan secara

berkala. Selain itu, dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pendapatan guna meningkatkan efektivitas pengelolaan retribusi serta pemetaan proyeksi potensi PAD baru.

#### **e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dilaksanakan dalam rangka mendukung pengelolaan sumber daya aparatur yang profesional, tertib administrasi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan seluruh proses administrasi kepegawaian berjalan secara sistematis, akurat, dan tepat waktu guna mendukung peningkatan kinerja organisasi.

Pelaksanaan kegiatan meliputi 1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai, 2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian, 4) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, 5) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, 6) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan ruang lingkup pengelolaan data dan dokumen kepegawaian, pengusulan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala, pengelolaan cuti dan disiplin pegawai, penyusunan daftar urutan kepangkatan (DUK), fasilitasi penilaian kinerja pegawai, serta pengusulan pengembangan kompetensi dan peningkatan kapasitas aparatur. Selain itu, dilakukan pembaruan data pada sistem informasi kepegawaian serta koordinasi dengan instansi pembina kepegawaian untuk memastikan kesesuaian administrasi dengan regulasi yang berlaku

#### **f. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dilaksanakan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah melalui penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran yang tertib, efektif, dan efisien. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan tersedianya dukungan layanan umum yang memadai guna menunjang operasional organisasi secara optimal.

Pelaksanaan kegiatan meliputi 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, 5) Fasilitasi Kunjungan Tamu, 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, 7) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan ruang lingkup pengelolaan tata naskah dinas dan persuratan, kearsipan, pengelolaan rumah tangga kantor, penyediaan perlengkapan dan kebutuhan operasional perkantoran, pengelolaan rapat dan kegiatan kedinasan, serta pelayanan administrasi lainnya yang mendukung kelancaran kerja perangkat daerah. Selain itu, dilakukan penataan arsip dan dokumen secara sistematis guna menjamin ketersediaan data yang akurat dan mudah diakses.

#### **g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dalam rangka menyediakan sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan operasional organisasi melalui pengadaan barang yang direncanakan secara tepat, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pelaksanaan kegiatan meliputi perencanaan kebutuhan barang milik daerah berdasarkan analisis kebutuhan dan standar barang, penyusunan spesifikasi teknis, proses pemilihan penyedia sesuai metode yang berlaku, pelaksanaan kontrak, pemeriksaan dan serah terima hasil pekerjaan, serta pencatatan dan penatausahaan barang sebagai aset daerah. Pengadaan dilakukan dengan memperhatikan prinsip efektif, efisien, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel guna menjamin kualitas serta ketepatan pemanfaatan barang.

#### **h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah melalui penyediaan berbagai jasa operasional yang dibutuhkan organisasi. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan terselenggaranya pelayanan administrasi dan operasional perkantoran secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Pelaksanaan kegiatan meliputi penyediaan 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik , 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor , 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan ruang lingkup jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada kantor dinas, 4 UPT dan 7 Cabang dinas, penyediaan jasa untuk tenaga outsourcing (jasa tenaga kebersihan, keamanan kantor, jasa jasa tenaga supir), jasa tenaga pendukung administrasi, serta jasa lainnya yang menunjang operasional perangkat daerah sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Penyediaan jasa dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan regulasi.

#### **i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dalam rangka menjaga kondisi dan fungsi barang milik daerah agar tetap layak pakai, aman, dan optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk memperpanjang umur manfaat aset, menjaga nilai ekonomis barang, serta memastikan kelancaran operasional pemerintahan.

Pelaksanaan kegiatan meliputi 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, 4) Pemeliharaan Aset Tak Berwujud (website, aplikasi), 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, 6) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan ruang lingkup pemeliharaan rutin dan berkala terhadap kendaraan dinas, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan instalasi, serta sarana dan prasarana lainnya yang menjadi penunjang operasional perangkat daerah. Kegiatan ini juga mencakup pemeriksaan kondisi barang, perbaikan ringan maupun berat sesuai kebutuhan, serta pencatatan hasil pemeliharaan dalam administrasi barang milik daerah guna menjamin tertib pengelolaan aset. Pemeliharaan dilaksanakan secara terencana berdasarkan kebutuhan riil dan standar pemeliharaan yang berlaku, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh barang milik daerah dalam kondisi baik dan siap digunakan, sehingga mendukung efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

#### **4.2. Program Prioritas Kelautan dan Perikanan**

Program prioritas pembangunan kelautan dan perikanan berperan untuk mengakselerasi pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan selama 5 (lima) tahun pada periode rencana strategis tahun 2025 – 2029. Program prioritas ini merupakan penjabaran dari prioritas kepala daerah sesuai Visi dan Misi yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029.

Pengelompokan prioritas pembangunan dimaksud sebagaimana tertuang dalam tabel 4.3.

berikut ini :

Tabel 4.3 Daftar sub Kegiatan priotitas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Rincian Output
1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap. Indikator : Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap (ton)	<b>Kegiatan</b> Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 mil	
			Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Penyediaan Prasarana Penangkapan Ikan (Kapal Perikanan)
			Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Penyediaan perlindungan nelayan, sarana penangkapan (alat tangkap/ alat bantu penangkapan (rumpon), sarana keselamatan dan keamanan nelayan
			<b>Kegiatan</b> Penetapan lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	

			Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Infrastruktur pelabuhan perikanan, Sarana penangkapan ikan Terukur, tata kelola pelabuhan dan kesyahbandaran perikanan
2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	<b>Kegiatan</b> Pembudidayaan ikan di Laut	
		Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya. Indikator : Jumlah produksi budidaya (Ton)	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di laut	Penyediaan Sarana Prasarana Budidaya Rumput Laut
			Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan sarana Pembudidayaan Ikan di laut	Pengembangan Inovasi Kebun bibit rumput laut
			<b>Kegiatan</b> Pengelolaan pembudidaya ikan di perairan darat	
			Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan budidaya darat dan balai benih air payau, Penyediaan sarpras budidaya darat
			Sub kegiatan : Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi prasarana perbenihan
3	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil	Persentase Luas Kawasan Pesisir dan Konservasi Yang Dikelola secara berkelanjutan	<b>Kegiatan</b> Pengelolaan Ruang laut Sampai Dengan 12 mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	
			Sub Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Penyusunan rencana aksi KKPD, Penyediaan Sarpras KKPD
			Sub Kegiatan Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil	Peluasan kawasan konservasi mendukung ekonomi biru
			Sub Kegiatan Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil	Sarana informasi mitigasi bencana wilayah pesisir
			Sub Kegiatan Penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil/Dokumen Final RZWP-3-K	Penyusunan materi tehnik pengelolaan wilayah pesisir (naskah akademik/Detail Desain/aturan lainnya)
			Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas masyarakat pengelola ekosistem blue carbon	Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat pengelola blue karbon (mangrove/padang lamun/ transplantasi karang)
			<b>Kegiatan</b> Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau Pulau Kecil	

			Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau Pulau Kecil	Penyediaan sarpras mendukung konektifitas di wilayah pesisir (tambatan/dermaga perahu, sarana pengelola sampah, sarana prasarana garam
			Sub Kegiatan Sarana Usaha Pergaraman	Penyediaan sarpras garam
4	Program Pengawasan	Meningkatnya kelestarian laut melalui pengawasan	<b>Kegiatan</b> Pengawasan Sumberdaya kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 mil	

	Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	sumberdaya kelautan dan perikanan. <b>Indikator</b> : Cakupan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Pendangkapan Ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil sesuai kewenangan provinsi	Pengawasan usaha perikanan melalui Fasilitasi layanan perijinan dan pendataan pelaku usaha KP
			Sub Kegiatan Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Pengamanan wilayah laut sampai dengan 12 mil melalui patroli, penyediaan sarana prasarana pengawasan
			Sub Kegiatan Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Pemeliharaan speedboat pengawasan
			Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Pembinaan dan Penyediaan perlengkapan POKMASWAS
			<b>Kegiatan</b> Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
			<b>Sub Kegiatan</b> Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi lainnya sesuai kewenangan provinsi	Pengawasan pelaku usaha pemasaran/pengolahan usaha perikanan
			<b>Sub Kegiatan</b> Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau,waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	Pengawasan pelaku penangkapan/pengangkutan ikan di PUD
			<b>Sub Kegiatan</b> Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan airlainnya sesuai kewenangan provinsi	Pengawasan pelaku usaha pembudidaya di PUD
5	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan dan nilai ekonomi hasil perikanan yang memenuhi standar mutu keamanan hasil perikanan.	<b>Kegiatan</b> Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	

	<p>Indikator : Produksi Olahan Hasil Perikanan Indikator : Nilai Ekonomi Hasil Perikanan (Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Pengolahan)</p>	<p><b>Sub Kegiatan</b> Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing</p>	<p>Sertifikasi dan Pengujian Produk, Pengadaan Alat dan Bahan Laboratorium, Akreditasi Laboratorium dan Standarisasi Produk, Pembinaan UMKM</p>
	<p>Indikator : Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan yang memenuhi standar mutu keamanan pangan</p>	<p><b>Sub Kegiatan</b> Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</p>	<p>Pembinaan UPI, Penyediaan Sarpras Pengolahan dan Pemasaran, Gerakan Menasyarakatkan Makan Ikan, Promosi Produk</p>

### **4.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) tahun 2025 - 2029**

Sasaran Strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata, yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil dari satu atau beberapa program. Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

#### **Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Perangkat Daerah dalam mendukung sasaran pembangunan daerah selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.4**  
**Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah**

No.	Indikator	Satuan	Target Kinerja					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kontribusi PDRB Perikanan terhadap PDRB Sulsel	%	8.05	8.20	8.34	8.40	8.46	8.52
2	Volume Produksi Perikanan	Ton	5,499,143.50	5,759,539.10	6,033,823.00	6,320,920.90	6,622,152.30	6,937,731.50
3	Tingkat kepatuhan sektor kelautan dan perikanan	%	82.00	84.00	87.00	89.00	91.00	93.00
4	Angka Konsumsi Ikan	Kg/KAP/T H	73.50	74.70	75.90	77.10	80.00	81.70
5	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Indeks	115,3	118.7	122.3	126	129.7	133.6
6	Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi)	Indeks	109.83	112.90	116.06	119.31	122.66	126.09
7	Luas kawasan konservasi perairan yang ditetapkan dan yang efektif dikelola (Ha)	Ha	505897.34	569384.57	580847.17	828206.68	843231.00	847657.44

No.	Indikator	Satuan	Target Kinerja					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
8	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	88.00	90.00	92.00	94.00	96.00	98.00

### Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah untuk sektor kelautan dan perikanan merupakan indikator yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada masa jabatan pemerintah daerah 2024 - 2029. Indikator Kinerja Kunci disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintah provinsi. Penetapan indikator kinerja kunci untuk sektor kelautan dan perikanan disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.5**  
**Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah**

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Luas Kawasan Pesisir dan Konservasi Yang Dikelola secara berkelanjutan (%)	%	59.44%	66.93%	68.30%	97.38%	99.17%	100%
2	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	Ton	521,583.60	532,015.20	542,655.50	553,508.60	568,380.00	578,747.60

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	Ton	4,928,496.00	5,177,477.80	5,440,121.00	5,715,345.10	6,004,465.00	6,308,290.60
4	Cakupan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	%	100	100	100	100	100	100
5	Produksi Olahan Hasil Perikanan	Ton	6,638.70	6,771.50	6,906.90	7,045.00	7,185.90	7,329.70
6	Nilai Ekonomi Hasil Perikanan (Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Pengolahan)	Rp M	32,03	33,2	34,42	35,68	37	38,39
7	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan yang memenuhi standar mutu keamanan pangan	%	80	85	87,5	90	95	100

### Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan dan kewenangan pemerintah provinsi sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah dan permendagri nomor 19 tahun 2024 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,

**Tabel 2.37**  
**Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pilhan Kelautan dan Perikanan**

No.	Indikator	Satuan	Base Line	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi <i>Sumber data : one data KKP</i>	Ton	4.869.692.2	4.869.692.2	4.869.692.2	4.869.692.2	4.869.692.2	4.869.692.2	4.869.692.2
2	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	%	46,33	82	84	87	89	91	93

Tabel 2.38

## Indikator Tujuan Pembangunan berkelanjutan /SDGs yang diampuh oleh Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Sulawesi Selatan

No	Tujuan Target Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/indikator TPB	Satuan	Baseline	Target Kinerja Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>14</b>	<b>Tujuan : Ekosistem Kelautan (TPB 14)</b>								
<b>14.1</b>	<b>Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi</b>								
14.1.1	Indikator : Presentase penurunan sampah terbuang ke laut.	%	Belum ada data	6,25	7,03	9,38	10,94	11,25	12,50
<b>14.2</b>	<b>Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif</b>								
14.2.1	Indikator : Penerapan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan areal lautan.	Kegiatan	Belum ada daya	2	2	2	2	2	2
<b>14.4</b>	<b>Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya.</b>								
14.4.1	Indikator : Proporsi tangkapan jenis ikan laut yang berada dalam batasan biologis yang aman.	%	55,01	56,11	57,23	58,38	59,55	60,74	61,95
<b>14.5</b>	<b>Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.</b>								
14.5.1	Indikator : Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut.	Ha	578,435.5	816.529,08	827.901,68	829.561,67	833.868,11	833.932,29	834.175,03
<b>14.6</b>	<b>Melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan &amp; tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang &amp; negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization (WTO) pada tahun 2020.</b>								





**BAB V**

**PENUTUP**

## **BAB V PENUTUP**

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra - PD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan berfungsi sebagai pedoman dan rujukan, penentu arah kebijakan, sasaran dan tujuan dalam pembangunan Kelautan dan Perikanan yang telah mengalami pergeseran kebijakan baik nasional maupun daerah yang diimplementasikan pada tugas penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan, dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun kedepan dari tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra - PD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2029 dalam pelaksanaannya menjabarkan rencana program kegiatan tahunan, yang memuat, Prioritas pembangunan, Rencana kerja dan penganggaran yang direncanakan setiap tahunnya dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra - PD) merupakan pedoman bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam menyusun program-program pembangunan dalam rangka pelaksanaan pembangunan bidang Kelautan dan Perikanan di wilayah Sulawesi Selatan periode 2025-2029. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan menyelaraskan antara RPJMD Pemerintah Provinsi dan Rencana tahunan, sesuai tugas dan fungsi pokok. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam pelaksanaan program kegiatan memperhatikan dan mengacu pada visi misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama 5 tahun kedepan sebagaimana tertuang pada Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 2025-2029.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra - PD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 2025-2029 ini merupakan dokumen yang disusun untuk menjabarkan mengukur tingkat keberhasilan 5 (lima) tahun kebelakang, yaitu tahun 2020 – 2024 dan merancang ulang sesuai kebutuhan dan arah kebijakan atas tantangan, isu – isu strategis dan target pembangunan yang telah ditetapkan untuk 5 (lima) tahun ke depan tahun 2025-2029. Dengan adanya Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra - PD) ini diharapkan kinerja dan kontribusi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan menjadi lebih baik dan target-target pembangunan yang telah ditetapkan di tiap level indikator baik Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dapat terpenuhi dengan baik.

Dengan melaksanakan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra - PD) ini sangat diperlukan adanya partisipatif dan komitmen dari seluruh unit kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dan semua pihak/lembaga terkait untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam mencapai keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai paradigma dan arah kebijakan. Dengan demikian Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra - PD) bukan hanya sebagai dokumen administrasi tetapi merupakan substansi cerminan tuntutan pembangunan berkelanjutan yang dibutuhkan oleh stakeholders sebagai penerima manfaat pembangunan kelautan dan perikanan yang hendak dicapai.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra - PD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya Pemerintahan yang maju dan berkarakter.